



Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman 2021



Seri 1.0

Pengabdian kepada Masyarakat dalam Akuntansi untuk Keberlanjutan

Editor:

Wulan I R Sari

Hariman Bone

Dwi Risma Deviyanti

Muhammad Iqbal

Pengabdian kepada Masyarakat dalam Akuntansi untuk Keberlanjutan

Seri 1.0

Pengabdian kepada Masyarakat dalam Akuntansi untuk Keberlanjutan

Editor:

Wulan I R Sari
Hariman Bone
Dwi Risma Deviyanti
Muhammad Iqbal

Tata Letak dan Desain Sampul:

Puncak Jaya Indonesia

ISBN

Diterbitkan oleh Mata Bangsa dan Puncak Jaya Indonesia dengan Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Didistribusikan oleh Puncak Jaya Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya “**Book Chapter Pengabdian kepada Masyarakat dalam Akuntansi untuk Keberlanjutan: Seri 1.0**”. Semoga *Book Chapter* ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan pengembangan ilmu serta praktik akuntansi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Book Chapter* ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman (FEB Unmul) tahun 2021.

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB Unmul meliputi kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan; pendampingan tata kelola keuangan level mikro, meso, dan makro; praktik akuntansi keuangan sektor privat dan *refocusing* serta *review* anggaran sektor publik; dan penguatan pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Semoga hasil PKM ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan teknologi bidang akuntansi dalam mendukung program kemasyarakatan, kewilayahan, dan kewirausahaan sesuai indikator kinerja PKM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini. Oleh karena itu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Universitas Mulawarman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajaran, pemerintah daerah, para kepala desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat aktif dan membantu dalam kegiatan PKM ini.

Kami menyadari atas ketidaksempurnaan penulisan *Book Chapter* Seri 1.0 ini. Namun, kami berharap *Book Chapter* Seri 1.0 memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Demi perbaikan, kami juga mengharapkan adanya masukan berupa kritik atau saran yang konstruktif. Atas perhatian, bantuan, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Samarinda, Desember 2021

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dwi Risma Deviyanti

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam akuntansi untuk keberlanjutan ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman sebagai bentuk dharma bakti dan kontribusi kepada masyarakat. Aktualisasi ilmu dan praktik akuntansi di masyarakat sangat diperlukan dan saat ini telah menjadi kebutuhan penting baik bagi individu dan bagi lembaga atau organisasi privat maupun organisasi publik. Kegiatan PKM tahun 2021 ini meliputi sosialisasi peraturan perpajakan dan literasi standar akuntansi keuangan; pendampingan tata kelola keuangan level mikro, level *meso*, dan level makro; praktik akuntansi keuangan sektor privat dan *refocusing* serta *review* anggaran sektor publik; dan penguatan pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Area kegiatan PKM dimaksudkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dari bidang ilmu akuntansi. Sehingga, hasil PKM ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan teknologi dalam mendukung program kemasyarakatan, kewilayahan, dan kewirausahaan sesuai indikator kinerja PKM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Kata kunci: pengabdian kepada masyarakat; akuntansi untuk keberlanjutan; praktik akuntansi; sektor privat; sektor publik; pembangunan berkelanjutan

ABSTRACT

Community service (PKM) in accounting for sustainability is carried out by lecturers and students of the Accounting Department, the Faculty of Economics and Business, the Mulawarman University as a form of dharma bhakti and contribution to society. Actualization of accounting knowledge and practice in society is very necessary and has now become an important need both for individuals and for private organizations and public organizations. PKM activities in 2021 include socialization of tax regulations and financial accounting standards; assistance in financial governance at the micro level, meso level, and macro level; financial accounting practices of private sector and refocusing, as well as reviewing public sector budgets; and strengthening sustainable development of local governments and village governments. The PKM activity area is intended to support sustainable development in the field of accounting. Thus, the results of this PKM are useful for the development of science and technology in supporting community, regional, and entrepreneurial programs according to the PKM performance indicators of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia.

Keywords: community service; accounting for sustainability; accounting practices; private sector; public sector; sustainable development

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1:	
LITERASI LAPORAN KEUANGAN MASJID DI KOTA SAMARINDA....	1
<i>Jamaluddin</i>	
BAB 2:	
MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS DAN	
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN GEREJA	
DI TANJUNG REDEB, KABUPATEN BERAU	15
<i>Set Asmapane</i>	
BAB 3:	
PENATALAKSANAAN DAN PENCATATAN TRANSAKSI UNIT	
USAHA BUMDES SEPAKAT KECAMATAN LOA KULU	
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA	23
<i>Yunita Fitria</i>	
BAB 4:	
SOSIALISASI ISAK 35: PENYAJIAN	
LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA	29
<i>Ferry Diyanti</i>	
BAB 5:	
PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA	
PADA IBU-IBU DASAWISMA PERUMAHAN	
BUMI SEMPAJA BLOK H SAMARINDA.....	38
<i>Ledy Setiawati</i>	
BAB 6:	
TELAAH ANGGARAN DISDIKPORA TAHUN 2021:	
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM MASA PANDEMI AKIBAT	
PENURUNAN POTENSI PENDAPATAN	47
<i>Hariman Bone</i>	

BAB 7:

SOSIALISASI TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BUMDES KARYA MANDIRI DESA SEPAKAT, KECAMATAN LOA KULU, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 56

Dwi Risma Deviyanti

BAB 8:

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA MANDIRI DESA SEPAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 63

Ibnu Abni Labaya

BAB 9:

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BUMDES PADA BUMDES KARYA MANDIRI DESA SEPAKAT, KECAMATAN LOA KULU, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 72

Eka Febriani

BAB 10:

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN BUMDES KARYA MANDIRI, DESA SEPAKAT, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 78

Muhammad Iqbal

BAB 11:

LITERASI MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA..... 87

Rusdiah Iskandar dan Annisa Abubakar Lahjie

BAB 12:

RASIONALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA DUKUNGAN PENDANAAN PENANGANAN COVID-19 98

Yana Ulfah

BAB 13:

FOCUS GROUP DISCUSSION BINCANG SOLUSI PEMETAAN SOSIAL POTENSI EKONOMI PRODUKTIF DI DESA SONGKA KABUPATEN PASER..... 108

Mega Norsita

BAB 14:
OPTIMALISASI POTENSI DAN PENGUATAN SDGs DESA DALAM RANGKA MENUJU DESA SAMURANGAU BERKEHIDUPAN BERKELANJUTAN..... 112
Wulan I R Sari

BAB 15:
PENYUSUNAN KELAYAKAN BISNIS USAHA BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 129
Irwansyah

BAB 16:
EDUKASI MENYUSUN ANGGARAN KEUANGAN KELUARGA DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KOTA SAMARINDA 137
Salma Pattisahusiwa

BAB 17:
PENDAMPINGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DALAM PENILAIAN INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU PADA PT. INDO PUSAKA BERAU 145
Muhammad Ikbal

BAB 18:
SOSIALISASI ETIKA DALAM MELAKUKAN PELAYANAN TERHADAP PUBLIK (MASYARAKAT) BAGI PEGAWAI UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA..... 171
Anisa Kusumawardani

BAB 19:
TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI PEMBUATAN *WEBSITE* OLEH KELURAHAN LONG KALI BERBASIS WORDPRESS 177
Zaki Fakhroni

BAB 1

LITERASI LAPORAN KEUANGAN MASJID DI KOTA SAMARINDA

LITERASI LAPORAN KEUANGAN MASJID DI KOTA SAMARINDA

Jamaluddin

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
jamaluddin@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Islam adalah ajaran yang sempurna, mengatur aktivitas kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya, baik ibadah mahdah maupun ibadah gairuh mahdah (Supardi dan Amiruddin, 2001). Pada dasarnya Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas sehari-hari. Termasuk keberadaan masjid telah mempunyai tuntunan dalam pengelolaannya (Sitompul dan Harmain, 2015).

Karim (2004) menjelaskan bahwa Islam memiliki syariah yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti Syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam bidang apa pun. Bidang tersebut baik bersifat ritual (ibadah) maupun dalam hubungan sosial (muamalah). Universal berarti syariah Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di setiap waktu dan tempat sampai akhir kehidupan atau sampai hari kiamat.

Berkaca dari sejarah, dahulu pada zaman Rasulullah, masjid dijadikan sebagai pusat peradaban umat Islam. Masjid sebagai sentral aktivitas umat Islam dalam segala hal. Masjid Quba sebagai masjid pertama umat Islam, dalam pembangunannya menggunakan bahan-bahan sederhana yang tersedia ketika itu di sekitar wilayah pembangunan masjid. Makna esensialnya bukan pada bentuk bangunan, kemegahan, dan besarnya bangunan masjid tetapi diupayakan agar pembangunan masjid cepat selesai agar dapat segera dimanfaatkan. Tentu bentuk bangunan, kemegahan, dan besarnya masjid akan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya.

Masjid kala itu menjadi pusat peradaban umat Islam, selain sebagai pusat peribadatan. Masjid merupakan pusat peribadatan umat muslim yang harus dijunjung tinggi dan dijaga sebaik mungkin terutama dalam perawatan dan pengelolaannya. Menurut penelitian Nariasih, Kurrohman, dan Andriana (2017) bahwa banyak takmir masjid yang belum melakukan pencatatan keuangan masjid sesuai standar akuntansi keuangan PSAK 45 dan

atau PSAK 109 sebagaimana yang disyaratkan dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Hal ini penting dilakukan karena potensi masjid yang begitu besar tidak dapat dikelola dengan baik jika tidak terdapat laporan keuangan yang baik dan benar. Banyak masjid yang mempunyai saldo yang besar tetapi hanya bersifat *idle cash* (kas menganggur).

Fenomena lain yang biasanya terjadi pada sebagian takmir masjid adalah tidak transparannya pengelolaan keuangan masjid. Hal ini diperparah lagi dengan kemampuan melakukan pencatatan akuntansi keuangan yang terbilang rendah. Oleh karena itu, kami dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman akan melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan masjid. Semoga dengan kegiatan ini kendala yang dialami takmir masjid secara bertahap bisa dikurangi.

Laporan keuangan yang baik dan benar ditambah kemampuan manajerial takmir yang memadai akan meningkatkan sinergi takmir, jamaah, dan penduduk di sekitar masjid. Hal ini penting, karena sinergitas ini dapat mewujudkan suatu peradaban Islam yang tangguh baik spiritualitas maupun materialitas. Artinya, masyarakat yang ada di lingkungan masjid merasakan manfaat masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adnan (2018) menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya pada tahun 2012 masih ditemukan *idle cash* dana masjid (kas yang menganggur). Contohnya, sebanyak Rp304,542 miliar dana yang tersebar di masjid-masjid di seluruh Yogyakarta masih belum digunakan secara optimal. Dana potensial tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan secara optimal melalui pengelolaan yang tepat. Pengelolaan yang tepat dapat dilakukan jika terdapat pencatatan yang baik dan benar. Baik dan benar di sini, tentu sesuai dengan aturan pemerintah yaitu pengelolaan keuangan masjid sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk organisasi non-profit.

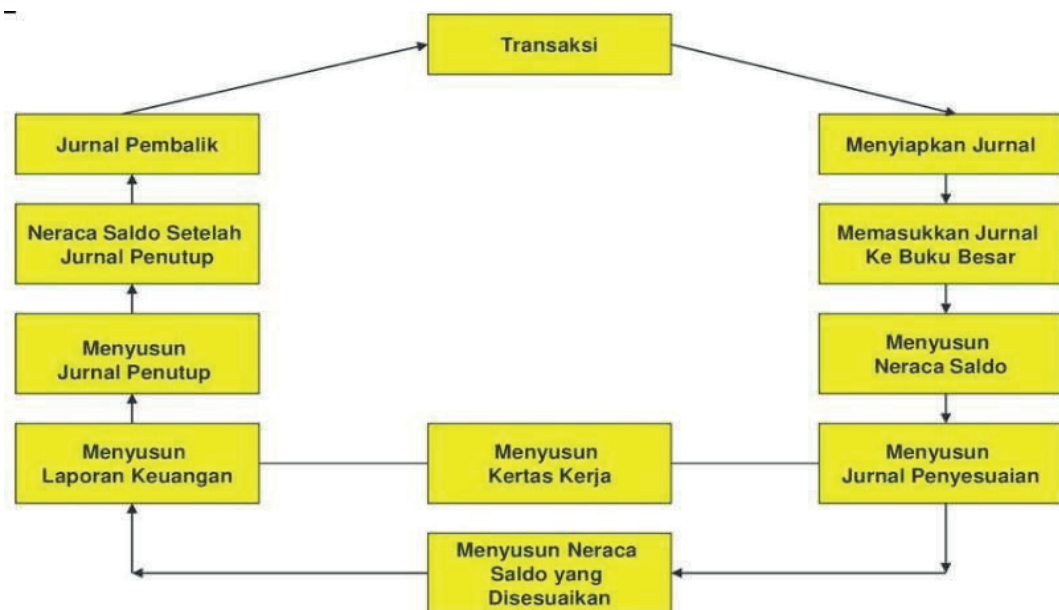
Selanjutnya, Adnan (2018) menambahkan bahwa setiap pengelolaan masjid harus memiliki keterbukaan dalam transaksi keuangan. Karena dana tersebut merupakan titipan dari umat untuk kemaslahatan bersama. Jika suatu masjid memiliki dana yang cukup besar disarankan untuk membantu masjid yang masih kekurangan dana terutama dalam hal pembangunan masjid. Selain itu, hal yang perlu ditekankan dalam pengelolaan masjid adalah transparansi dana, tanggung jawab takmir dan laporan keuangan yang akuntabel, dan alokasi dana yang tepat sasaran.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba) termasuk diantaranya Masjid. Masjid adalah *pure* organisasi non-profit yang dapat mengacu pada PSAK 45 ini dalam penyusunan laporan keuangannya. Namun, PSAK 45 telah dicabut diganti dengan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba (PPSAK No.13: Pencabutan PSAK 45).

Apa itu Akuntansi Nirlaba?

Akuntansi nirlaba adalah suatu metode pencatatan keuangan yang diperuntukkan pada organisasi yang tidak berorientasi mencari keuntungan dari aktivitas yang dijalankannya. Biasanya organisasi nirlaba ini beraktivitas berdasarkan anggaran (Halim dan Kusufi, 2013). Sumber daya organisasi nirlaba berasal dari donator yang dikumpulkan secara sukarela tanpa mengharapkan timbal balik dari dana yang diserahkan pada organisasi yang dibantunya. Dengan demikian, tidak terdapat kepemilikan modal ataupun pendapatan pada organisasi nirlaba. Karena tidak ada kepemilikan, maka organisasi nirlaba tidak dapat dijual, ditebus, atau dialihkan. Keuntungan suatu aktivitas tidak menjadi milik organisasi, akan tetapi menjadi milik suatu kegiatan dari organisasi tersebut. Namun organisasi nirlaba membutuhkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur, yayasan, penyumbang dana, dan pihak ketiga. Hal ini penting, sebagai dasar untuk pertimbangan keputusan partisipasi bantuan donator.

Proses akuntansi nirlaba sama dengan tahapan akuntansi pada umumnya yang dimulai dari transaksi, jurnal, buku besar, neraca lajur, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Perbedaannya terletak pada sifat organisasi nirlaba, yaitu tidak diperkenalkannya memperoleh keuntungan dari setiap kegiatannya. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut digunakan untuk operasional organisasi atau kembali disalurkan untuk kegiatan utama organisasi. Berikut disajikan proses/siklus akuntansi secara umum adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Akuntansi

Menurut PSAK Nomor 45 (IAI, 2018) laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memerhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- b. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- c. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- d. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat

Penyusunan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba dalam hal ini adalah Masjid se-Kota Samarinda diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Sumber utama yang menjadi acuan dalam pelatihan ini adalah ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba. Acuan tambahan adalah berbagai buku akuntansi untuk organisasi non profit. Selain itu, digunakan juga standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas Publik (SAK ETAP). PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah serta PSAK 45 tetap dijadikan sebagai sumber acuan tambahan walaupun telah dicabut, karena masih terdapat hal-hal relevan yang digunakan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan masjid.

Solusi yang Ditawarkan

Pelaksanaan pelatihan ini akan berdampak peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan khususnya dalam penyusunan laporan keuangan masjid. Kemampuan takmir masjid dalam penyusunan laporan keuangan pada umumnya masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena masjid pada umumnya dikelola secara sederhana/*amatiran*. Para takmir menjadi pengurus masjid hanya karena keikhlasan, hanya sukarela tanpa *reward*. Kondisi seperti ini jika terus dipertahankan, tidak akan banyak diharapkan merubah keadaan.

Masalah Pengabdian kepada Masyarakat

Pencatatan laporan keuangan masjid pada umumnya masih dilakukan secara tradisional melalui papan pengumuman. Setiap pekan diumumkan secara terbuka dengan membacakan penerimaan dan pengeluaran selama sepekan. Biasanya ini dilakukan setiap hari Jumat pada saat pelaksanaan ibadah Jumat. Setelah itu, pengumuman secara tertulis ditempel di papan pengumuman (Rini, 2018). Model tradisional seperti ini sebenarnya sudah cukup transparan, namun tidak maksimal untuk dapat dianalisis dalam rangka pengambilan keputusan. Hal ini karena poin-poin yang dilaporkan masih sebatas rangkuman transaksi pekanan. Belum terdapat laporan kekayaan, laporan penerimaan masih sebatas penerimaan sumbangan dari kotak amal. Padahal penerimaan tidak hanya sumbangan dari kotak amal, terdapat sumber-sumber keuangan yang berasal dari beberapa sumber yang dapat dikelompokkan sebagaimana diatur dalam ISAK 35 dan PSAK 45.

Melalui kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan masjid ini diharapkan menjadi solusi yang dapat meningkatkan kemampuan para takmir masjid khususnya di bidang keuangan. Materi yang disajikan pada pelatihan ini dimulai dari proses akuntansi secara umum, yaitu: transaksi, jurnal, *posting* ke buku besar, neraca lajur, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pelatihan penyusunan laporan keuangan masjid ini dilakukan secara *offline*. Hal ini dilakukan karena permintaan Takmir Masjid Al-Mujibah sebagai tuan rumah penyelenggara pelatihan ini. Pertemuan luring dilakukan pada hari Ahad, tanggal 12 September 2021, bakda salat subuh sampai sekitar jam 08.00 pagi. Waktu ini dipilih dengan pertimbangan bahwa kemungkinan peserta akan banyak mempunyai waktu luang. Salah satu berkah adalah waktu setelah salat subuh. Kondisi tubuh masih fit dan masih segar. Harapannya materi yang disampaikan akan mudah diserap oleh peserta.

Pelatihan penyusunan laporan keuangan masjid didahului oleh adanya permintaan pemateri dengan topik di atas pada tanggal 6 September 2021 yang dikirimkan ke Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Cq Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan membalas surat permintaan Takmir Masjid Al-Mujibah dan merekomendasikan penulis sebagai pemateri pada kegiatan ini dengan surat nomor: 1536/UN17.1/KP/2021. Berdasarkan surat ini, Ketua Takmir Masjid Al-Mujibah mengundang secara tertulis para takmir masjid se-Kota Samarinda. Dewan Masjid Indonesia memberikan dukungan dengan ikut menghimbau masjid-masjid agar mengikuti pelatihan ini. Selain itu, undangan ini juga diumumkan secara lisan dan melalui *social media* WhatsApp *group* masjid-masjid secara terbatas.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Pada saat pelaksanaan, setelah salat subuh tidak langsung pelatihan tetapi didahului zikir setelah salat yang dipimpin oleh Imam salat. Setelah zikir ini, baru kegiatan dilaksanakan dengan dibantu oleh remaja masjid dan dua orang mahasiswa menyiapkan layar proyektor dan LCD serta laptop yang akan digunakan oleh pemateri.

Pelatihan dimulai dengan penjelasan laporan keuangan bagi para pengambil keputusan. Jika diumpamakan sebagai suatu makhluk hidup, maka laporan keuangan itu adalah jantungnya. Dengan laporan keuangan, maka takmir dapat memahami potensi dan kelemahan masjid, sehingga dapat merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu diprioritaskan.

Selanjutnya disampaikan bentuk-bentuk laporan keuangan berupa: laporan posisi keuangan pada akhir periode (Gambar 2), laporan aktivitas untuk suatu periode akuntansi (Gambar 3), laporan perubahan aset neto (Gambar 4), laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan (Gambar 5), dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dipilih untuk dijelaskan lebih awal agar para peserta mempunyai gambaran tentang bentuk laporan yang akan dibuat. Filosofinya sebagaimana tukang batu yang membuat rumah. Maka tukang tersebut harus mempunyai gambaran atau bayangan bentuk, model, besaran, warna, dan sekat-sekat rumah yang akan dibangunnya.

ENTITAS NIRLABA
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 20X2 dan 20X1
(dalam jutaan)

		20X2		20X1
Aset:				
Kas dan Setara Kas	Rp	188	Rp	1.150
Piutang bunga		5.325		4.175
Persediaan dan biaya dibayar di muka		1.525		2.500
Piutang lain-lain		7.562		6.750
Investasi Lancar		3.500		2.500
Properti investasi		13.025		11.400
Aset Tetap		154.250		158.975
Investasi jangka panjang		545.175		508.750
Jumlah Aset	Rp	730.550	Rp	696.200
Liabilitas dan Aset Neto:				
Utang dagang	Rp	6.425	Rp	2.625
Pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan				1.625
Utang Lain-lain		2.187		3.250
Utang Wesel				2.850
Kewajiban Tahunan		4.213		4.250
Kewajiban Jangka Panjang		13.750		16.250
Jumlah Liabilitas	Rp	26.575	Rp	30.850
Aset Neto:				
Tidak Terikat	Rp	288.070	Rp	259.175
Terikat temporer (Catatan B)		60.855		63.675
Terikat Perrmanen (Catatan C)		355.055		342.500
Jumlah Aset Neto		703.975		665.350
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	Rp	730.550	Rp	696.200

Gambar 2. Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS NIRLABA
Laporan Aktivitas
Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)

Perubahan Aset Neto Tidak Terikat

Pendapatan

Sumbangan	21.600
Jasa Layanan	13.500
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	14.000
Penghasilan investasi (Catatan E)	2.125
Penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi	20.570
Lain-Lain	375
<i>Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat</i>	<i>72.170</i>

Aset Neto yang Berakhir Pembatasannya (Catatan D):

Pemenuhan program pembatasan	29.975
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	3.750
Berakhimya pembatasan waktu	3.125
Jumlah aset yang telah berakhir pembatasannya	36.850
<i>Jumlah Pendapatan, Penghasilan dan</i>	<i>109.020</i>

Beban dan Kerugian:

Program A	32.750
Program B	21.350
Program C	14.400
Manajemen dan umum	6.050
Pencarian dana	5.375
Jumlah Beban (Catatan F)	79.925
Kerugian akibat kebakaran	200
<i>Jumlah Beban dan Kerugian</i>	<i>80.125</i>
<i>Kenaikan Jumlah Aset Neto Tidak Terikat</i>	<i>28.895</i>

Gambar 3a. Laporan Aktivitas Bentuk A

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER:

Sumbangan	20.275
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	6.450
Penghasilan neto terealisasi dan belum panjang terealisasi dari investasi jangka (Catatan E)	7.380
Kerugian alctuarial untuk kewajiban tahunan Aset neto terbebaskan dari pembatasan (Catatan D)	(75)
	<u>(36.850)</u>
Penurunan Aset Neto Terikat Temporer	(2.820)

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN:

Sumbangan	700
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	300
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (Catatan E)	<u>11.550</u>
Kenaikan Aset Neto Terikat Permanen	12.550

Kenaikan Aset Neto	38.625
Aset Neto Pada Awal Tahun	<u>665.350</u>
Aset Neto Pada Akhir Tahun	<u>703.975</u>

Gambar 3b. Laporan Aktivitas Bentuk A (lanjutan)

ENTITAS NIRLABA
Laporan Pendapatan, Beban, dan Perubahan Aset Neto Tidak Terikat
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)

PENDAPATAN DAN PENGHASILAN TIDAK TERIKAT:

Sumbangan	21.600
Jasa Layanan	13.500
Penghasdan dari investasi jangka panjang (Catatan E)	14.000
Penghasilan dari investasi lain-lain (Catatan E)	2.125
Penghasilan neto dari investasi jangka panjang yang telah terealisasi dan belum terealisasi (Catatan E)	20.570
Lain-lain	375
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat	72.170

ASET NETO YANG DIBEBASKAN DARI PEMBATASAN (Catatan D)

Penyelesaian program pembatasan	29.975
Penyelesaian pembatasan pemerolehan peralatan	3.750
Berakhirnya waktu pembatasan	3.125
Jumlah aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	36.850
Jumlah pendapatan, penghasilan, dan sumbangan lain yang tidak terikat	109.020

BEBAN TIDAK TERIKAT

Program A	32.750
Program B	21.350
Program C	14.400
Manajemen dan Umum	6.050
Pencarian Dana	5.375
Jumlah Beban (Catatan F)	79.925
Kerugian akibat kebakaran	200
Jumlah beban dan kezugian tidak terikat	80.125

KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT

28.895

Gambar 4. Perubahan Aset Neto

ENTITAS NIRLABA
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)

AKTIVITAS OPERASI:

Kas dari pendapatan jasa	13.050
Kas dari pemberi sumber daya	20.075
Kas dari piutang lain-lain	6.537
Bunga dan dividen yang diterima	21.425
Penerimaan lain-lain	375
Bunga yang dibayarkan	(955)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan suplier	(59.520)
Utang lain-lain yang dilunasi	(1.062)
	(75)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi</i>	<i>(75)</i>

AKTIVITAS INVESTASI:

Ganti rugi dari asuransi kebakaran	625
Pembelian peralatan	(3.750)
Penerimaan dari penjualan investasi	190.250
Pembelian investasi	(187.250)
	(125)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi</i>	<i>(125)</i>

AKTIVITAS PENDANAAN:

Penerimaan dari kontribusi terbatas dari:	
Investasi dalam endowment	500
Investasi dalam endowment berjangka	175
Investasi bangunan	3.025
Investasi perjanjian tahunan	500
	4.200
Aktivitas pendanaan lain:	
Bunga dan dividen terbatas untuk reinvestasi	750
Pembayaran kewajiban tahunan	(362)
Pembayaran utang wesel	(2.850)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(2.500)
	(762)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan</i>	<i>(762)</i>

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	(962)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.150
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	188

Gambar 5. Laporan Arus Kas

Setelah peserta mempunyai gambaran tentang laporan keuangan yang akan dibuat. Maka pemateri melanjutkan dengan menjelaskan proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai karena adanya transaksi. Transaksi ini harus disertai bukti sebagai dasar untuk membuat jurnal. Setelah membuat jurnal, maka langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Setelah proses buku besar maka dihitung saldo masing-masing buku besar, untuk dilanjutkan dibuat neraca saldo.

Neraca saldo harus seimbang untuk selanjutnya mengumpulkan data untuk melakukan jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian selesai, maka akan diperoleh neraca saldo setelah disesuaikan. Selanjutnya menyusun laporan keuangan. Dan terakhir adalah membuat jurnal penutup sebelum melakukan transaksi lagi pada periode berikutnya. Harapan peserta adalah ada tindak lanjut setelah pelatihan ini berupa pendampingan teknis

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Setelah pelatihan penyusunan laporan keuangan masjid ini berakhir, maka harapannya peserta dapat memahami pentingnya peranan laporan keuangan pada suatu organisasi. Selain itu, yang paling pokok adalah kemampuan pada peserta dapat meningkat dengan menyusun laporan keuangan secara mandiri. Walaupun harapan peserta setelah pelatihan ini, mereka mengharapkan akan pendampingan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Bahkan, para peserta mengharapkan tersedia aplikasi penyusunan laporan keuangan masjid yang mereka bisa gunakan dan dibimbing dalam penggunaannya.

Saran

Sekretaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Samarinda, Abdul Jalil, yang hadir saat pelatihan, mengharapkan ada kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul dengan DMI. Kerja sama ini untuk melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan masjid-masjid yang ada di Kota Samarinda. DMI bersedia membantu agar program ini dapat terlaksana. Oleh karena itu, mereka langsung meminta agar segera ditandatangani MOU antara FEB Unmul dan DMI.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini tidak dapat terealisasi tanpa campur tangan banyak pihak. Ucapan terima kasih kami berikan kepada Takmir Masjid Al-Mujibah, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Samarinda, dan takmir masjid se-Kota Samarinda yang telah memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pemahaman akuntansi untuk masjid yang kami miliki; sehingga kegiatan PKM ini dapat diselesaikan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan penuh serta pendanaan Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2013, *Akuntansi Sektor Publik: Teori Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Akhyar, Adnan Muhammad. 2018. *Manajemen Keuangan Masjid Upaya Memaksimalkan Fungsi Masjid Seutuhnya*. Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://www.umy.ac.id/manajemen-keuangan-masjid-upaya-memaksimalkan-fungsi-masjid-seutuhnya>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. SAK, *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Grha Akuntan. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. ISAK 35, *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35*. Ikatan Akuntan Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Grha Akuntan. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan, Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No.13 tentang pencabutan PSAK No.45*. Ikatan Akuntan Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Grha Akuntan. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019 & 2020. *Standar Akuntansi Keuangan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)*. Ikatan Akuntan Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Grha Akuntan. Jakarta
- Nariasih DY, Kurrohman T, dan Andriana. 2017. *Financial Statement of Mosque Based on A Combination of PSAK Number 45*. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Vol IV (1): 6-11
- Karim, Adiwarmaz Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 4-5
- Rini R. 2018. *Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol 6 (2) E-ISSN: 2549-3876
- Supardi dan Amiruddin, Teuku. 2001. *Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 8.
- Sitompul, Harahap N dan Harmain, H. 2015. *Akuntansi Masjid*. FEBI UIN-SU Press

BAB 2

MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN GEREJA DI TANJUNG REDEB, KABUPATEN BERAU

MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN GEREJA DI TANJUNG REDEB, KABUPATEN BERAU

Set Asmapane

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
set.asmapane@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Sebagai sebuah organisasi keagamaan yang di dalamnya juga terdapat *man*, *money* dan *method*, maka Gereja sebagai sebuah entitas harus mampu mengelola salah satu sumber daya yang dimiliki yakni *money* (keuangan) yang dikumpulkan dari jemaat untuk kepentingan penyelenggaraan persekutuan atau peribadahan jemaat (umat). Dengan demikian, maka dari sudut pandang teori *stewardship* yang mengedepankan kepentingan organisasi dan kepuasan bersama. Pengelolaan keuangan dalam suatu gereja atau jemaat benar-benar harus mengedepankan kualitas akuntabilitas dan transparansi. Karena ini merupakan kewajiban pemangku kepentingan dalam organisasi untuk menunjukkan kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah umat atau jemaat. Terlebih pengelolaan ini bersifat suatu amanah atau kepercayaan yang diberikan anggota jemaat kepada pemangku jabatan yakni pejabat gerejawi yakni Majelis Gereja (Pendeta, Penatua, dan Diaken)

Gereja Toraja Jemaat Gideon Tanjung Redeb di Berau, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Jemaat dalam lingkungan Gereja Toraja Klasis Kaltara Berau, Wilayah V Kalimantan. Berdasarkan Laporan Keuangan yang disusun pada tahun 2020, jumlah penerimaan kas sebesar Rp.1.015.495.497,- yang seluruhnya berasal dari persembahan jemaat. Besarnya jumlah kas yang berputar dalam jemaat setiap tahun mencerminkan kesadaran warga jemaat dalam memberikan persembahan. Sekaligus mencerminkan besarnya kepercayaan umat kepada pejabat gereja, bahwa mereka akan mengelola kas tersebut dengan akuntabilitas dan transparansi yang memadai sesuai dengan peraturan yang ada. Namun demikian, masih saja ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam proses pengelolaan keuangan gereja mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan sehingga dipandang perlu untuk melakukan pelatihan secara komprehensif agar pengelolaan keuangan gereja semakin transparan, akuntabel dan berkualitas.

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara umum dalam lingkungan Gereja Toraja, teridentifikasi ada beberapa hal yang mengakibatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan gereja terkadang mengalami masalah antara lain;

- a. Latar belakang pengetahuan dan pengalaman pejabat gerejawi yang belum tentu dibidang keuangan atau akuntansi
- b. Periode kepengurusan hanya tiga tahun dan memungkinkan untuk terjadi penggantian
- c. Pemahaman terhadap Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi serta Sistem Informasi Akuntansi Gereja Toraja yang masih perlu ditingkatkan
- d. Pengelolaan keuangan di Gereja terkadang masih didasarkan pada persepsi atau pengalaman dunia usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mendasar dan praktis kepada Pejabat Gerejawi khususnya Bendaharawan Jemaat dan Organisasi Intra Gerejawi (OIG) dan Verifikasi serta Majelis Gereja pada umumnya dalam pengelolaan keuangan gereja berdasarkan buku Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja dan Sistem Informasi Akuntansi Gereja Toraja.

Solusi yang ditawarkan

Berdasarkan beberapa masalah yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh Majelis Gereja, Pengurus Organisasi Intra Gerejawi (OIG) khususnya pejabat gerejawi yang secara langsung mengelola keuangan gereja, sehingga pengelolaan keuangan gereja sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi serta Sistem Informasi Akuntansi Gereja Toraja.
- b. Meningkatkan ketrampilan teknis pengelolaan penatalaksanaan keuangan gereja bagi Penanggung Jawab Keuangan dan Bendahara Jemaat dan OIG berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja.
- c. Meningkatkan ketrampilan teknis dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan gereja bagi Komisi Verifikasi Gereja berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Verifikasi Gereja Toraja

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan sasaran PKM sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan yang diikuti oleh seluruh Majelis Gereja

dan Pengurus OIG tentang Pengelolaan Keuangan Gereja berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja

- b. Melaksanakan pelatihan teknis penatausahaan keuangan gereja berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja khususnya bagi para Bendahara Jemaat dan Bendahara OIG
- c. Melaksanakan pelatihan teknis pemeriksaan keuangan gereja berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Verifikasi Keuangan Gereja Toraja khususnya bagi para anggota Komisi Verifikasi

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Setelah tim melakukan diskusi awal dengan pihak Pejabat Gerejawi setempat mengenai masalah sekitar pengelolaan keuangan gereja, maka pihak gereja telah mengirim surat Permohonan sebagai Penerima kepada ketua tim pengabdian kepada masyarakat dimana surat tersebut sudah disetujui dengan adanya Surat Penugasan sebagai Penerima dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pelatihan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom, sehingga Tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang terdiri dari 2 (dua) materi yakni Pengelolaan Keuangan Gereja serta materi Tugas Pokok Verifikasi, dimana materi tersebut dilengkapi dengan ilustrasi transaksi keuangan di Gereja. Sedangkan pihak Gereja mempersiapkan peserta pelatihan, yakni seluruh Majelis Gereja dalam Jabatan Penatua dan Diaken khususnya yang dalam struktural menjabat sebagai Bendaharawan dan Verifikasi serta seluruh Pengurus khususnya Bendahara Organisasi Intra Gerejawi (OIG).

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Untuk memberikan pemahaman awal kepada segenap peserta, maka materi pelatihan akan dikirim tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk didistribusikan kepada segenap peserta agar peserta berkesempatan mempelajari lebih awal materi-materi tersebut. Adapun proses tahapan pelaksanaan PKM melalui pembinaan dan pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Penyampaian materi kepada para peserta pelatihan baik materi dalam bentuk Teori, maupun yang dalam bentuk kasus dilakukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pelatihan
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan dilakukan secara daring via Zoom Meeting, dimana tim PKM diberikan waktu untuk menjelaskan secara teori konsep, peraturan pengelolaan keuangan gereja berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja.

- c. Pelatihan secara praktik pelaksanaan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan gereja dengan menggunakan kasus yang sudah dipersiapkan
- d. Diskusi interaktif dengan peserta membahas beberapa kasus atau masalah pengelolaan keuangan yang mereka alami atau hadapi.
- e. Foto bersama dengan seluruh peserta secara daring melalui Zoom Meeting
- f. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Pembinaan dan Pelatihan ini seluruhnya dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021 sebanyak dua sesi yakni jam 19.30 – 20.30 dan jam 20.45 – 22.00.

2. Penyusunan Laporan

Setelah kegiatan PKM melalui pembinaan dan pelatihan Pengelolaan Keuangan Gereja selesai dilakukan maka tim PKM melakukan proses penyusunan Laporan Akhir pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kontribusi Mitra PKM dan Pihak Lainnya Terhadap Pelaksanaan

Teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan gereja dan pemeriksaan keuangan gereja berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja. Sedangkan, target capaian adalah terciptanya pemahaman yang benar terhadap pengelolaan keuangan dalam lingkungan Gereja Toraja bagi segenap Majelis Gereja, Penanggung Jawab Keuangan Jemaat, Bendaharawan Jemaat, Bendaharawan Organisasi Intra Gerejawi (OIG), serta Komisi Verifikasi sehingga akan meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan gereja.

Dampak Persepsi Bagi Warga Jemaat

Sebagaimana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan gereja bagi segenap Majelis Gereja dan Pengurus OIG khususnya para Bendaharawan Jemaat dan OIG. Maka diharapkan pembinaan dan pelatihan ini akan menciptakan persepsi yang positif bagi seluruh warga jemaat bahwa Majelis Gereja baik Pendeta, Penatua dan Diaken serta Pengurus Organisasi Intra Gerejawi khususnya para Bendaharawan. Bendaharawan sungguh-sungguh telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan gereja sehingga persembahan setiap jemaat benar-benar dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi yang memadai.

Persepsi demikian harus terus dipertahankan dan dikembangkan dengan baik dalam jemaat, sehingga akan menumbuhkan semangat, sukacita, dan keikhlasan untuk memberikan persembahan. Hal ini menjadi penting karena seluruh jemaat percaya bahwa seluruh persembahan yang mereka serahkan ke gereja dikelola dengan transparan dan akuntabel oleh pejabat gerejawi. Sehingga, keuangan jemaat dapat terus tumbuh atau meningkat dari waktu ke waktu.

Kontribusi Mitra PKM dan Pihak Lainnya

Sehubungan dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka mitra dalam kegiatan ini adalah Gereja Toraja Jemaat Gideon Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Adapun kontribusi mitra PKM dalam kegiatan ini adalah:

- a. Menyiapkan peserta pembinaan yakni seluruh Majelis Gereja (Pendeta, Penatua, dan Diaken) serta pengurus OIG khususnya Ketua dan Bendahara.
- b. Menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan yakni sebagian di Gereja dan sebagian lagi mengikuti secara daring karena masa pandemi COVID-19
- c. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada seluruh warga jemaat baik itu melalui warta jemaat maupun melalui pamflet yang disebarakan.
- d. Menyiapkan fasilitas Zoom Meeting sebagai media daring dalam proses pembinaan dan pelatihan tersebut.

Faktor Penghambat, Pendukung dan Tindak Lanjut

Sebagaimana dialami bersama bahwa saat pelaksanaan pelatihan ini, kondisi di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya masih dalam masa pandemi Covid-19 sehingga ada pembatasan untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak dengan durasi waktu yang lama, oleh karena itu kondisi tersebut cukup menghambat Tim PKM dan mitra PKM untuk maksimal dalam menjalankan program pembinaan dan pelatihan tersebut.

Sekalipun pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di masa pandemi dengan pembatasan berkumpul yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi pembinaan dan pelatihan ini bisa berjalan dengan baik karena didukung oleh fasilitas teknologi komunikasi yang memadai dengan menggunakan Zoom Meeting, sehingga Tim PKM dan Mitra PKM dapat menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang ada. Namun demikian, pelaksanaan pelatihan secara *online* menyebabkan pemateri dan peserta tidak bisa maksimal dalam pembahasan kasus-kasus secara detail karena keterbatasan pada media dan waktu.

Sebagaimana telah dikemukakan mengenai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan gereja di jemaat Gideon Tanjung Redeb Berau, maka setelah pembinaan dan pelatihan ini selesai maka solusi dan tindak lanjut yang harus dilakukan adalah membangun terus komunikasi melalui *group* diskusi antara peserta khususnya bendaharawan dengan pemateri untuk terus meng-*update* kemampuan dalam penatausahaan keuangan gereja sehingga kualitas transparansi dan akuntabilitas dapat dipertahankan

Solusi dan Tindak Lanjut

Masalah krusial yang dihadapi dalam upaya penatausahaan keuangan gereja dalam meningkatkan kualitas dan transparansi keuangan gereja adalah keterampilan para bendaharawan dalam menyelenggarakan pencatatan keuangan dan penyajian laporan

keuangan. Berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja, karena periode kepengurusan hanya berlangsung tiga tahun dan setelah itu kemungkinan akan berpindah ke orang lain sehingga keterampilan itu bisa saja tidak tertularkan kepada orang yang menggantikannya. Sehingga, bisa berdampak mendistorsi kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan gereja.

Untuk itu, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengalihkan pekerjaan pencatatan, administrasi dan penyusunan Laporan Keuangan Gereja dari Bendahara kepada Pegawai Tata Usaha yang khusus diangkat untuk pekerjaan tersebut. Sehingga memudahkan untuk melatih pengetahuan, serta keterampilan dalam penatausahaan keuangan gereja sehingga kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan gereja terus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Mencermati masalah, solusi, dan strategi yang telah dikemukakan di atas, maka simpulan yang dapat kami kemukakan adalah:

- a.** Latar belakang pendidikan dan pengalaman para Majelis Gereja dan pengurus OIG yang khusus menangani penatausahaan keuangan gereja dan pemeriksa (Verifikasi) keuangan gereja tidak semuanya bidang keuangan atau akuntansi.
- b.** Periode kepengurusan hanya tiga tahun dan berpotensi tidak terpilih lagi sebagai Bendahara atau Verifikator. Sehingga jika yang menggantikannya tidak punya pengetahuan dan ketrampilan yang memadai tentang penatausahaan keuangan gereja berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja, maka berarti proses pembelajaran dimulai lagi dari awal sehingga berpotensi mendistorsi kualitas transparansi dan akuntabilitas.
- c.** Jika pola pengelolaan atau penatausahaan keuangan gereja tetap dilakukan dengan mekanisme seperti ini, maka kualitas transparansi dana akuntabilitas pengelolaan keuangan gereja akan terus mengalami fluktuasi tergantung siapa yang menjadi pengelola keuangan gereja.
- d.** Menyadari kelemahan dengan sistem tersebut, maka tim PKM mengusulkan agar untuk pekerjaan penatausahaan transaksi keuangan gereja mulai dari pengadministrasian, pencatatan, dan penyusunan Laporan Keuangan Gereja diselenggarakan oleh tenaga Tata Usaha yang diangkat khusus untuk tugas tersebut, sehingga Majelis Gereja yang menjabat sebagai Bendahara hanya bertanggung jawab atas fisik uang yang diterima, disimpan, dan dikeluarkan.

Saran

Untuk merealisasikan beberapa hal tersebut maka Gereja:

- a. Melakukan perubahan sistem pencatatan transaksi yakni dari sistem *cash* basis ke sistem aktual basis modifikasi sehingga Laporan Keuangan Gereja lebih informatif dan akuntabel.
- b. Perlu dilakukan pelatihan khusus untuk penerapan sistem akuntansi aktual basis di jemaat
- c. Perlu pengangkatan tenaga Tata Usaha yang *full time* dan permanen untuk ditugaskan melaksanakan proses penatausahaan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan gereja
- d. Perlu diupayakan penggunaan *software* akuntansi yang dimodifikasi sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja dan Sistem Informasi Akuntansi Gereja Toraja, sehingga akuntabilitas dan transparansinya semakin berkualitas.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak dapat terealisasi tanpa campur tangan banyak pihak. Ucapan terima kasih kami berikan kepada Gereja Toraja Jemaat Gideon Tanjung Redeb di Berau, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pemahaman akuntansi untuk gereja yang kami miliki; sehingga kegiatan PKM ini dapat diselesaikan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan penuh kegiatan PKM serta pendanaan Tahun Anggaran 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Standar Akuntansi Pemerintahan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, 2020
- Gereja Toraja, *Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja*, Rantepao, PT. Sulo, Cetakan 1, 2019.

BAB 3

PENATALAKSANAAN DAN PENCATATAN TRANSAKSI UNIT USAHA BUMDES SEPAKAT KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

PENATALAKSANAAN DAN PENCATATAN TRANSAKSI UNIT USAHA BUMDES SEPAKAT KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

Yunita Fitria

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
yunita.fitria@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian usahanya dimiliki oleh desa. BUMDes melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, akuntabilitas BUMDes dalam pengelolaan kegiatan operasional harus dilaksanakan dengan baik karena akan diberikan kepada masyarakat desa.

Reformasi yang terjadi dalam hal tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya termasuk BUMDes merupakan fenomena yang besar pada akhir-akhir ini. Pengelolaan keuangan publik merupakan tuntutan yang sangat khusus, yaitu melalui aspek akuntabilitas dan transparansi (Agustana et al., 2017; Ebrahim, 2003). Tuntutan ini akan berpengaruh besar terhadap organisasi khususnya terhadap tujuan organisasi.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip dari *good governance* yang nantinya sangat diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada suatu organisasi. Akuntabilitas merupakan alat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Fitria, 2017). Sedangkan, transparansi adalah pemberian informasi secara terbuka terhadap pemangku kepentingan (Agustana et al., 2017; Badu & Hambali, 2017). Salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi adalah laporan keuangan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 188 BUMDes semenjak 2015 tetapi yang tercatat pada saat ini hanya 84 BUMDes yang aktif. BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat merupakan salah satu BUMDes yang masih menggunakan sistem pembukuan secara manual. Oleh karena itu, diperlukannya pencatatan yang sesuai dengan SAK ETAP sehingga terlaksana akuntabilitas keuangannya dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan kegiatan ini untuk membantu BUMDes dalam memahami pencatatan akuntansi. BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat hanya mencatat menggunakan pengeluaran dan pemasukan dalam pembukuan sederhana Sehingga dalam hal ini tidak terdapat laporan keuangan secara lengkap. BUMDes merupakan organisasi sektor publik yang butuh pertanggungjawaban untuk diberikan kepada masyarakat melalui laporan keuangan. Selain laporan keuangan yang tidak lengkap, tidak terdapat sumber daya manusia yang melakukan pencatatan keuangan berdasarkan data yang tersedia. Sehingga, sumber daya yang tersedia tidak memahami tentang pencatatan akuntansi.

Solusi yang ditawarkan

Melihat kondisi tersebut maka diperlukan upaya tentang peningkatan pengetahuan pencatatan akuntansi demi menyediakan laporan keuangan kepada masyarakat yang ikut bergerak dalam BUMDes tersebut. Salah satu upaya dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia adalah dengan mengadakan diskusi dan pendampingan kepada BUMDes tentang pencatatan akuntansi, khususnya standar yang mengatur akuntansi untuk BUMDes.

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran kegiatan diskusi ini mengenai pencatatan keuangan pada BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

B. METODE YANG DIJALANKAN/DIGUNAKAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di BUMDes Karya Mandiri pada Desa Sepakat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan metode pemberian materi dan wawancara dengan unit usaha BUMDes Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan kegiatan didahului rapat internal dengan pihak Fakultas mengenai tahapan yang dilakukan pada pengabdian ke masyarakat. Rapat ini diadakan dengan para dosen yang akan melakukan pengabdian ke Desa Sepakat. Hasil rapat yaitu kegiatan yang awalnya akan dilakukan secara luring maka diubah menjadi daring. Daring yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melakukan tatap maya dengan Zoom Meeting. Kegiatan diawali dengan pembukaan dari masing-masing pihak, lalu dimulai dengan penyampaian materi dan wawancara kepada pihak BUMDes.
3. Penutupan kegiatan diakhiri dengan kegiatan konsultasi staf keuangan mengenai laporan keuangan yang ada.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Kegiatan pengabdian masyarakat pada BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat meliputi pemberian materi dan wawancara. Pemberian materi ini terdiri dari materi dasar yaitu, pencatatan akun berdasarkan posisi normalnya pada aturan debit kredit transaksi pencatatan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pencatatan akuntansi. Selanjutnya, materi konsep aturan BUMDes tentang bagaimana pencatatan akuntansi dalam BUMDes sampai menjadi laporan keuangan.

Setelah penjabaran materi, tim mengadakan wawancara tentang permasalahan apa saja yang dihadapi dalam mencatat transaksi keuangan. Dalam hal ini, pihak BUMDes sendiri menjabarkan permasalahan yang dihadapi tidak bisa mencatat transaksi sesuai aturan dan tidak dapat membedakan kumpulan-kumpulan akun atau *chart of account*. Sehingga diperlukan pemahaman materi lebih mendalam.

Perbaikan pencatatan keuangan pada BUMDes Karya Mandiri dapat memberikan dampak sosial perbaikan pencatatan transaksi keuangan. Juga, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi staf pada khususnya karena masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan dengan pencatatan yang transparan. Pencatatan akuntansi yang baik dapat memberikan keuntungan bagi BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat yaitu perbaikan laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran tentang perolehan untung dan rugi organisasi.

Program PKM ini memberikan Universitas Mulawarman, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis semakin dikenal sebagai institusi yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan masyarakat khususnya dalam bidang akuntansi yaitu pencatatan akuntansi dalam pentingnya penyusunan laporan keuangan sehingga masyarakat, khususnya BUMDes, dapat mencatat akun-akun secara tepat dan benar. Setelah melakukan kegiatan PKM ini ada beberapa evaluasi yaitu dari faktor penghambat, pendukung, serta langkah-langkah yang harus diambil:

Faktor Penghambat

- a. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) BUMDes karya mandiri diadakan secara daring, sehingga penyerapan materi tidak bisa sempurna. Ketika diadakan secara luring, para staf bisa mendapatkan praktek pencatatan secara langsung.
- b. Penghambat yang kedua yaitu pengurus BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat tidak memiliki kemampuan yang memadai pada akuntansi dasar, maka akan sulit untuk membuat laporan keuangan.

Faktor Pendukung:

- a. Peran serta staf BUMDes yang bersedia dalam menceritakan kesulitan mereka sehingga masalah bisa dianalisis.

- b. BUMDes Karya Mandiri bersedia menerima pendampingan secara luring setelah keadaan pandemi berangsur pulih.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pengabdian kepada masyarakat pada BUMDes Karya Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian kepada masyarakat yang diadakan secara daring sehingga penyerapan dilakukan kurang efektif sehingga diperlukan pendampingan secara praktek pada BUMDes Karya Mandiri.
2. Masalah yang terjadi pada BUMDes Karya Mandiri adalah kurangnya penguasaan dasar-dasar pencatatan akuntansi, sehingga diberikan materi dasar-dasar pencatatan akuntansi seperti pencatatan debit, pencatatan kredit, dan pendalaman tentang *chart of account* dalam pencatatan transaksi.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian-penyelesaian masalah pencatatan yang terjadi di BUMDes Karya Mandiri di Desa Sepakat. Masalah-masalah yang dihadapi oleh BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat dilakukan dengan metode pemberian materi dan wawancara. Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari BUMDes Karya Mandiri terbukti dengan keaktifan dalam memberikan pernyataan tentang kesulitan yang dialami dalam pencatatan akuntansi. Sehingga diperlukan pendampingan di lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat. Oleh karena itu, dengan pencatatan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan maka diperlukan pendampingan secara luring tentang pencatatan akuntansi pada BUMDes Karya Mandiri. Selain itu, pemberian secara praktik dalam pencatatan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP. Diperlukan juga untuk diadakan kegiatan pengabdian yang sama, sehingga dapat meningkatkan kemampuan BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat dalam melakukan pencatatan akuntansi.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Sepakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustana, G. W., Atmaja, N. T. H., & Tungga, A. 2017. *Analisis Sumber Dana Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pura Khayangan Tiga Di Desa Pakraman Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Badu, R. S., & Hambali, I. R. 2017. *Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid*. Universitas Negeri Gorontalo, 1–60.
- Ebrahim, A. 2003. *Accountability In Practice : Mechanisms for NGOs*. 31(5), 813–829. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7)
- Fitria, Y. 2017. *Akuntabilitas pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. Akuntabel*, 14(1), 38. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1353>

BAB 4

SOSIALISASI ISAK 35: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA

SOSIALISASI ISAK 35: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA

Ferry Diyanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
ferry.diyanti@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi lainnya karena tidak hanya berfokus pada orientasi laba. Organisasi nirlaba berfokus pada sumber daya manusia karena merupakan aset yang berharga, mengingat kegiatan yang dijalankan tidak akan dapat terlepas dari dan untuk manusia yang memiliki peran sebagai pelaku utama (Rahayu dkk, 2019). Salah satu bentuk organisasi nirlaba ini adalah yayasan yang pengelolaannya dilakukan oleh sekelompok orang yang disahkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yayasan Insan Nusantara Malanga merupakan salah satu yayasan yang berada di Kota Samarinda dan telah memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan operasional. Yayasan yang didirikan pada tahun 2017 ini bergerak di bidang pendidikan, seperti: TK, Bimbingan Belajar, dan Kursus. Saat ini yayasan sedang merintis usaha percetakan, dimana jenis usaha ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan di masa depan. Jumlah pengurus inti Yayasan pada tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) orang. Pembagian tugas dan wewenang dilakukan sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

Pengurus yayasan dalam hal ini memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Adanya bentuk pertanggungjawaban keuangan yang baik akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal. Hal ini mendorong yayasan untuk dapat memberikan bukti akuntabilitas dalam bentuk penyajian laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dan bagian dari proses pelaporan keuangan (Hamidu, 2013). Adapun standar akuntansi yang digunakan sebagai rujukan untuk menyajikan laporan keuangan yaitu ISAK 35. ISAK 35 merupakan standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba terlepas dari bentuk badan hukumnya.

Masalah Pengabdian kepada Masyarakat

Komitmen yang tinggi dari pengurus yayasan untuk dapat menyusun dan menyajikan

laporan keuangan menghadapi kendala tersendiri. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus yayasan dari tahun 2017 ketika yayasan tersebut mulai didirikan. Proses pencatatan keuangan yang dijalankan oleh yayasan lebih bersifat sederhana, dimana pencatatan hanya dilakukan berdasarkan kas masuk dan kas keluar saja. Pencatatan kas masuk dan keluar tersebut dilakukan baik secara manual maupun terkomputerisasi. Pelaporan keuangan dilakukan setiap akhir tahun, namun hanya dalam bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang sederhana.

Kondisi yang sedang berjalan di yayasan saat ini lebih disebabkan minimnya kemampuan pengurus dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Latar belakang pendidikan pengurus yayasan yang bukan berasal dari jurusan akuntansi menjadi salah satu penyebab hal ini terjadi. Penyebab lainnya adalah pengurus yayasan sangat jarang mengikuti kegiatan pelatihan akuntansi, sehingga pengetahuan mengenai akuntansi yayasan masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil wawancara awal, terdapat beberapa pengurus yang mengetahui siklus akuntansi dan mengetahui bagaimana cara penyusunan laporan keuangan, namun tidak dipraktikkan. Hal ini mengakibatkan beberapa pengurus tersebut cenderung lupa ketika kembali ditanya terkait dengan penguasaan dalam penyusunan laporan keuangan. Pemahaman terhadap standar akuntansi yang berkaitan dengan yayasan juga masih sangat kurang sehingga berdampak langsung pada proses pertanggungjawaban keuangan yang terkesan “seadanya”. Permasalahan yang dihadapi oleh yayasan ini perlu ditindaklanjuti sehingga pertanggungjawaban keuangan yayasan dapat berjalan dengan baik.

Solusi yang Ditawarkan

Permasalahan yang dihadapi Yayasan Insan Nusantara Malanga secara garis besar dapat diidentifikasi menjadi 3 pokok utama, yaitu: 1) Latar belakang pendidikan pengurus yayasan yang bukan berasal dari jurusan akuntansi; 2) Sebagian besar pengurus yayasan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan akuntansi, sehingga pengetahuan mengenai akuntansi yayasan masih sangat terbatas; dan 3) Adanya perubahan standar akuntansi yayasan dari PSAK 45 menjadi ISAK 35 yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2020. Standar akuntansi untuk yayasan sebelumnya telah diatur dalam PSAK 45, namun standar ini sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ISAK 35 yang mengatur tentang akuntansi organisasi nirlaba, termasuk di dalamnya penyajian laporan keuangan nirlaba. ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1 dimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam penyajian laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri (IAI, 2020). Standar ini mulai berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2020. Adanya standar ini diharapkan mampu memberikan arah dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba, khususnya Yayasan Insan Nusantara Malanga.

Merujuk dari berbagai fenomena dan permasalahan tersebut, maka dirancang suatu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi standar akuntansi yang sedang berlaku saat ini. Kegiatan PKM ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus yayasan untuk menyusun laporan keuangan sekaligus memberikan sosialisasi mengenai isi ISAK 35 yang mencakup ruang lingkup, permasalahan dan implementasinya dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah adanya peningkatan kemampuan pengurus yayasan dalam penyusunan laporan keuangan sekaligus mampu memahami standar akuntansi yang menjadi rujukan yaitu ISAK 35. Manfaat lainnya yaitu diharapkan pengurus yayasan mampu mengimplementasikan pemahaman tersebut ke dalam penyajian laporan keuangan.

Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pengurus Yayasan Insan Nusantara Malanga yang berjumlah 11 (sebelas) orang. Semua pengurus terlibat sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi ini karena berdasarkan informasi dari Ketua Pengurus Yayasan, diketahui bahwa laporan keuangan nantinya akan disusun secara bersama-sama mengingat belum pernah dibuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Alasan lainnya, para pengurus dapat saling membantu ketika terjadi kesulitan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Kegiatan PKM dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan secara daring kepada peserta kegiatan mengingat adanya pembatasan tatap muka sesuai aturan pemerintah. Pembatasan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 Jam 09.00 WITA sampai dengan selesai. Sebelum kegiatan dilaksanakan, terdapat beberapa persiapan awal yang dilakukan oleh Tim PKM. Adapun persiapan awal yang dilakukan yaitu:

1. Pembagian tugas tim PKM

Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Dosen dengan melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa. Pembagian tugas dilakukan oleh Dosen dengan berdasarkan pada kapasitas dan kompetensi yang dimiliki masing-masing personil. Pembagian tugas ini perlu dilakukan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan dapat meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi selama kegiatan.

2. Persiapan berkas pendukung kegiatan

Berkas pendukung kegiatan ini menjadi salah satu poin penting dalam pelaksanaan sosialisasi. Adapun berkas yang perlu dipersiapkan antara lain:

a. Materi kegiatan

Materi kegiatan yang disiapkan adalah materi mengenai penyusunan laporan keuangan secara garis besar beserta standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba yaitu ISAK 35. Materi juga dilengkapi dengan contoh soal dan studi kasus beserta pembahasan secara singkat untuk meningkatkan pemahaman peserta. Materi ini disajikan dalam bentuk *powerpoint* mengingat penyampaian materi kepada peserta kegiatan akan dilakukan dalam bentuk presentasi.

b. Absensi kegiatan

Absensi kegiatan dibuat dalam bentuk *google form* yang akan dibagikan pada saat proses diskusi antara narasumber dan peserta kegiatan. Absensi ini sekaligus sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

c. Kuesioner evaluasi pelaksanaan kegiatan

Kuesioner ini dibuat dalam bentuk *google form* yang berisi penilaian peserta terhadap penyampaian materi oleh narasumber. Kuesioner juga berisi hasil evaluasi peserta terhadap pelaksanaan kegiatan serta saran yang diberikan untuk perbaikan atau pelaksanaan pelatihan berikutnya.

3. Media pelaksanaan kegiatan

Media pelaksanaan kegiatan menggunakan link Zoom Meeting yang disediakan oleh pengurus yayasan. Tim PKM melakukan koordinasi dengan pengurus yayasan pada H-2 untuk memastikan bahwa media pelaksanaan kegiatan telah siap digunakan. *Link* Zoom dibagikan kepada peserta melalui grup Whatsapp pengurus saat H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan. Peserta kegiatan dalam hal ini pengurus yayasan dapat menggunakan komputer, laptop, tablet maupun *handphone* untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi *zoom* pada media *gadget* yang digunakan.

Setelah proses persiapan selesai, tim PKM melakukan koordinasi lanjutan dengan pengurus yayasan untuk memastikan mekanisme kegiatan yang akan dilakukan. Adapun mekanisme kegiatan diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh moderator, pemberian kata sambutan oleh Ketua Pengurus Yayasan dan dilanjutkan dengan pembacaan doa.

Proses sosialisasi selanjutnya akan dilaksanakan dengan menggunakan metode pemaparan materi selama 1 jam. Penyampaian materi disampaikan secara langsung oleh Dosen sebagai narasumber kegiatan tersebut. Proses diskusi antar narasumber dan peserta kegiatan dilanjutkan setelah pemaparan materi dengan waktu diskusi selama 1,5 jam. Kegiatan inti ini juga melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa yang memiliki tugas masing-masing. 1 orang mahasiswa bertugas mencatat setiap pertanyaan yang muncul

dalam *chat room* untuk kemudian disampaikan kepada narasumber. Mahasiswa lainnya bertugas membagikan *link* presensi kehadiran dalam bentuk Google Form dan kuesioner evaluasi pelaksanaan kegiatan pada saat proses diskusi berlangsung. Setelah penyampaian materi dan diskusi selesai, selanjutnya adalah penutupan acara yang kembali dilakukan oleh moderator.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dimana setiap peserta kegiatan telah hadir tepat waktu. Acara dibuka oleh moderator, dilanjutkan dengan sambutan dari ketua pengurus yang menjelaskan secara singkat mengenai pentingnya diadakan kegiatan ini. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa dan dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi terkait ISAK 35 yang disampaikan oleh Dosen sebagai narasumber kegiatan.

Materi awal yang disampaikan adalah mengenai proses penyusunan laporan keuangan secara garis besar kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai latar belakang ditetapkannya ISAK 35 serta urgensinya mengapa ISAK 35 perlu diterapkan pada organisasi nirlaba. Pada bagian awal ini juga dijelaskan secara singkat mengenai PSAK 45 yang sebelumnya pernah dijadikan pedoman dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba.

Pemaparan berikutnya adalah materi mengenai tujuan dan definisi-definisi yang terkait pelaporan keuangan nirlaba. Adapun tujuan utama pelaporan keuangan organisasi nirlaba yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Materi selanjutnya yang disampaikan adalah definisi-definisi yang terkait dalam memahami pelaporan keuangan nirlaba, seperti: tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen (IAI, 2020). Adapun perbedaan tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen adalah sebagai berikut:

1. Tidak terikat artinya dana dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat, dimana entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini.
2. Terikat sementara artinya kontribusi yang masuk dalam terikat sementara disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Beberapa lembaga menggunakan batasan waktu hingga 5 tahun sebelum ditarik atau dialihkan ke jenis tidak terikat.
3. Terikat permanen artinya karakteristik jenis ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen dan membolehkan mengambil manfaat darinya, contohnya adalah wakaf. Hasil dari investasinya dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara.

Setelah materi awal selesai, dilanjutkan dengan penyampaian materi inti dari isi ISAK 35 kepada peserta, mulai dari ruang lingkup dan permasalahan sampai dengan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan organisasi nirlaba. Penyampaian materi beserta contoh soal dan studi kasus yang dilengkapi dengan pembahasan secara singkat ini dilaksanakan selama sekitar satu jam. Proses pemahaman dilakukan secara bertahap dengan memberikan contoh-contoh aplikatif yang berhubungan dengan ISAK 35. Setelah penyampaian materi selesai dilakukan, acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi antara narasumber dan peserta kegiatan.

Peserta ternyata banyak yang belum memahami bagaimana siklus akuntansi dan penyusunan laporan keuangan mengingat latar belakang pendidikan yang bukan berasal dari akuntansi. Sehingga pertanyaan yang diberikan juga mengarah ke permasalahan mengenai topik tersebut. Pertanyaan yang diajukan melalui *chat room* maupun pertanyaan yang disampaikan secara langsung melalui forum juga banyak yang berkaitan dengan masalah penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi ini, narasumber kemudian memberikan penjelasan tambahan mengenai siklus akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan. Penjelasan ini kemudian dikaitkan dengan standar akuntansi yang berlaku khusus untuk organisasi nirlaba yaitu ISAK 35.

Proses diskusi ini dilaksanakan sekitar dua jam disertai dengan pembagian *link* absensi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dapat diisi oleh peserta. Waktu diskusi bertambah lama karena antusiasme dari semua peserta yang memiliki motivasi kuat untuk mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Setelah selesai kegiatan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan acara penutupan yang dilakukan oleh moderator.

Proses evaluasi selanjutnya dilakukan setelah selesai pelaksanaan kegiatan. Adapun hasil evaluasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi pra kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi, persiapan yang telah dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan terarah. Proses persiapan yang meliputi pembagian tugas tim PKM, materi kegiatan, *link* Google Form untuk absensi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta media kegiatan berupa *link* Zoom Meeting telah dipersiapkan dengan baik. Hal ini berdampak pada tidak adanya masalah yang muncul selama pelaksanaan kegiatan terkait dengan berkas dan media kegiatan yang digunakan.

2. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

Hasil evaluasi menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

Secara umum, materi yang disajikan sampai dengan akhir kegiatan mampu dipahami sebagian besar peserta. Beberapa contoh soal maupun studi kasus serta pembahasan yang diberikan mampu membantu peserta untuk dapat memahami materi secara keseluruhan. Sebagian besar peserta terlibat aktif dalam proses diskusi karena materi yang disampaikan sangat aplikatif dan berguna dalam mendukung kegiatan operasional yayasan. Adapun kendala yang terjadi lebih ke arah proses pengulangan materi yang disampaikan selama diskusi mengingat peserta tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Kendala lainnya yaitu jaringan internet yang digunakan oleh sebagian peserta kurang memadai, sehingga beberapa peserta seringkali keluar masuk Zoom.

3. Hasil evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan

Hasil evaluasi ini diperoleh melalui *link* kuesioner yang dibagikan kepada peserta pada saat proses diskusi sedang berlangsung. Berdasarkan kuesioner tersebut, dapat diketahui hasil penilaian peserta terhadap penyampaian materi narasumber dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan sudah sangat baik. Saran yang diberikan oleh peserta melalui kuesioner sebagian besar berisi harapan dan masukan agar ada pelatihan lanjutan dalam bentuk pendampingan kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yayasan.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Sebagian besar peserta dapat memahami proses penyusunan laporan keuangan serta memahami isi penting dari standar akuntansi yang berlaku yaitu ISAK 35. Standar akuntansi ini dijadikan dasar dalam penyajian laporan keuangan yayasan.

Saran

Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berlanjut dalam bentuk kegiatan pendampingan bagi peserta sehingga implementasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat dinilai ketepatannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Adapun peserta kegiatan diharapkan dapat menyiapkan dan memastikan ketersediaan jaringan internet yang digunakan jika pelatihan berikutnya dilaksanakan secara *online*.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengurus Yayasan Insan Nusantara Malanga yang telah bersedia bekerja sama sebagai mitra dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua peserta dan pihak-pihak lainnya yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidu, Novia P. 2013. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan di BEI. Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 3. Hal: 711-721
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *ISAK 35: Akuntansi organisasi nirlaba*. Jakarta:Ikatan Akuntan Indonesia
- Rahayu, Desy Rustiyanti, Moh. Halim, Gardina Aulin Nuha. 2019. *Penerapan Akuntansi Nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Kasus pada Masjid Al-Baitul Amien di Jember)*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol 17 No 1. Hal 37-48

BAB 5

PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA PADA IBU-IBU DASAWISMA PERUMAHAN BUMI SEMPAJA BLOK H SAMARINDA

PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA PADA IBU-IBU DASAWISMA PERUMAHAN BUMI SEMPAJA BLOK H SAMARINDA

Ledy Setiawati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
ledy.setiawati@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memerlukan penghasilan. Setiap keluarga tentunya memiliki sumber penghasilan yang berasal dari berbagai bidang pekerjaan yang ditekuninya. Seberapa besar penghasilan dalam suatu keluarga, sebaiknya dapat dikelola secermat dan sebaik mungkin agar pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diterima, sehingga seluruh kebutuhan penting dalam keluarga dapat terpenuhi sesuai kemampuan masing-masing.

Kebutuhan hidup manusia dibagi dua, yaitu; (1) kebutuhan jasmani, seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya; (2) kebutuhan rohani, seperti pendidikan, agama, kasih sayang, hiburan, dan sebagainya. Setiap manusia tentunya menginginkan kebutuhan jasmani dan rohani dapat terpenuhi secara seimbang, karena keseimbangan pemenuhan kedua kebutuhan tersebut berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga sangat memerlukan keterampilan untuk mengatur dan mememanajemennya dengan cermat dan baik.

Besar kecilnya penghasilan keluarga bukan satu-satunya penentu cukup tidaknya pemenuhan kebutuhan. Penghasilan yang kecil pun bila dikelola dengan cermat dan baik akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting oleh keluarga tersebut. Sebaliknya penghasilan yang besar belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhan jika salah atau kurang cermat dalam mengelolanya.

Seperti kita ketahui, saat ini kebutuhan manusia semakin bertambah dan beraneka ragam, karena kemajuan zaman memunculkan berbagai pilihan barang kebutuhan hidup yang luar biasa banyaknya. Namun demikian kita harus tetap bersikap bijaksana dalam memilih kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan kebutuhan mana yang dapat ditunda pemenuhannya.

Manajemen keuangan keluarga adalah cara mengatur keuangan keluarga dengan

teratur dan cermat melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/ penilaian. Keterampilan manajemen ini sangat penting dimiliki oleh setiap keluarga, karena cukup tidaknya penghasilan keluarga tergantung pada bagaimana cara mengatur ekonomi keluarga. Tanpa pengetahuan tentang manajemen keuangan, khususnya perencanaan keuangan, maka ekonomi keluarga dapat “*kocar-kacir*”, sehingga kehidupan keluarga menjadi tidak tenteram dan kesejahteraan keluarga tidak tercapai. Bahkan akibat lebih jauh dapat menyebabkan keretakan keluarga. Ekonomi yang teratur merupakan salah satu syarat dalam mencapai ketenteraman jiwa seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, perlu diupayakan terutama bagi ibu rumah tangga sebagai pemegang keuangan keluarga untuk selalu bersikap bijaksana dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Manajemen keuangan sangat penting dilakukan, karena:

1. Uang sebagai pemenuhan kebutuhan sifatnya terbatas.
2. Daya ingat manusia sangat terbatas, akibatnya kita tidak mengingat untuk apa saja uang dikeluarkan.
3. Kebutuhan hidup sangat beraneka ragam, sehingga perlu skala prioritas.
4. Bahan diskusi dan sarana komunikasi antar anggota keluarga.
5. Mencegah pemborosan.

Mengelola keuangan bukan merupakan soal yang mudah dan dapat dikerjakan begitu saja oleh semua orang. Seperti diketahui bahwa kebutuhan manusia sangatlah banyak seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan sebagainya. Sedangkan alat pemenuh kebutuhan yang berupa uang jumlahnya terbatas. Hal inilah yang menyebabkan manusia cenderung berkata kurang daripada lebih, karena kurang tahunya mereka bagaimana memajemen keuangannya. Melalui manajemen keuangan, kita akan belajar cara mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi masing-masing keluarga.

Kita dapat memprioritaskan kebutuhan yang sangat penting, penting, dan kurang penting, sehingga harapannya ada uang yang tersisa untuk kebutuhan di masa depan dengan cara menabung. Pengetahuan dan keterampilan manajemen keuangan penting dimiliki, karena setiap keluarga memiliki kemampuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan material “jasmani” maupun non-material “rohani”. Kemampuan tersebut sangat tergantung pada sumber pendapatan serta kesungguhan keluarga dalam mencapainya.

Melalui pengelolaan yang baik, maka uang yang terbatas pun dapat dikendalikan penggunaannya, sehingga akan membawa kesejahteraan bagi keluarga. Bagi keluarga dengan pendapatan pas-pasan, manajemen keuangan sangat penting dimiliki. Karena dengan uang yang dimiliki, sangat sedikit jenis kebutuhan yang dapat dipenuhi. Demikian pula bagi keluarga yang berkecukupan, manajemen keuangan juga sangat

penting dimiliki, karena keinginan itu sifatnya tidak terbatas dan sangat memungkinkan untuk terjadinya pengeluaran yang tidak terkontrol.

Ibu-ibu Dasawisma adalah sebuah perkumpulan para ibu yang ada di Blok H Perumahan Bumi Sempaja Samarinda. Perkumpulan tersebut diadakan sebagai ajang silaturahmi antar tetangga yang diadakan setiap bulan sehingga hubungan diantaranya menjadi dekat dan adanya penyampaian informasi-informasi penting terkait dengan urusan keluarga dan rumah tangga. Pertemuan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik bagi ibu-ibu setempat. Banyaknya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, menuntut para istri atau ibu untuk dapat mengelola keuangan keluarga dengan tepat.

Setelah melakukan diskusi lebih dalam dengan ketua Dasawisma, pemicu kurang pemahannya ibu-ibu terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga adalah bervariasinya latar belakang pendidikan. Dari ibu-ibu tersebut ada yang lulus S1, tetapi ada juga yang hanya lulus SMA, sehingga tidak semua memiliki pemahaman yang memadai terkait tentang cara mengelola keuangan keluarga yang baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap ibu-ibu yang ada pada Dasawisma. Pemahaman tersebut terkait pengelolaan keuangan keluarga sehingga bisa membuat perencanaan yang tepat untuk keuangan keluarga. Tujuan tersebut dicapai melalui pemberian materi tentang cara mengelola keuangan keluarga berdasarkan pendapatan yang mereka terima dari kepala keluarga dan membuat pencatatan terkait pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan dalam sebuah keluarga.

Secara khusus pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para ibu-ibu Dasawisma untuk membuat pencatatan semua pendapatan dan pengeluaran yang terjadi di dalam rumah tangga. Serta mampu mengidentifikasi pengeluaran mereka ke dalam pengeluaran yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Hal ini dilakukan agar para ibu Dasawisma dapat disiplin dalam melakukan pencatatan dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kesejahteraan keluarga bisa terjamin. Secara umum, pengabdian ini menjadi bagian kecil dalam pengelolaan keuangan keluarga yang bisa memberikan informasi kepada para ibu untuk mengambil keputusan dalam menentukan segala macam pengeluaran dalam keluarga.

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Merujuk uraian sebelumnya beberapa permasalahan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

- a. Bervariasinya latar belakang pendidikan para ibu Dasawisma yang membuat tidak memadainya ilmu akuntansi yang dipahami, dan
- b. Tidak adanya pemberian pelatihan terkait pengelolaan keuangan keluarga yang benar.

Berdasarkan identifikasi tersebut, langkah awal yang diusulkan adalah pemberian pengetahuan kepada para ibu Dasawisma untuk mengelola keuangan keluarga yang benar sehingga segala kebutuhan bisa terpenuhi dan kesejahteraan keluarga bisa tercapai. Alternatif lain adalah mengusulkan untuk melakukan kursus atau pelatihan secara berkala kepada ibu-ibu tersebut, akan tetapi hal ini sulit diimplementasikan karena penunya waktu mereka dalam mengurus rumah tangga.

Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang paling mungkin adalah pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada ibu-ibu Dasawisma untuk mengelola keuangan keluarga yang tepat agar terjaminnya kesejahteraan yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah memberikan pendampingan kepada mereka untuk implementasi pengelolaan keuangan keluarga tersebut. Fokus pengabdian kepada masyarakat yang akan diusulkan masih pada tahap awal yaitu pemberian pengetahuan. Untuk program pengabdian selanjutnya bisa memfokuskan pada pendampingan.

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan atas permintaan dari ketua Dasawisma Blok H perumahan Bumi Sempaja Samarinda dalam rangka untuk melakukan penyampaian informasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah: memberikan informasi dalam bentuk pelatihan kepada ibu-ibu Dasawisma mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang benar agar kesejahteraan keluarga bisa tercapai.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan informasi dalam bentuk pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, sehingga sasaran dalam kegiatan ini adalah memberikan informasi dan keterampilan kepada ibu-ibu Dasawisma yang tergabung pada Blok H Perumahan Bumi Sempaja Samarinda agar diperoleh nilai tambah dan masukan yang berarti terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga.

B. METODE PELAKSANAAN

Tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) telah sepakat untuk mengadakan pelatihan singkat terkait pengelolaan keuangan keluarga. Pelatihan tersebut akan diadakan secara *offline* atau tatap muka. Tim PKM bertugas untuk menyusun materi dan ilustrasi pengelolaan keuangan keluarga. Pihak ketua Dasawisma Blok H pada perumahan Bumi Sempaja Samarinda bertugas untuk memastikan para ibu menghadiri pelatihan yang akan diadakan secara *offline* pada salah satu rumah yaitu di rumah Ibu Desy.

Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam, tim akan memberikan materi pelatihan selama satu hari selama tiga jam. Pelaksanaan pelatihan akan dilakukan melalui media ceramah, ilustrasi kasus, dan diskusi kepada ibu-ibu Dasawisma, serta membagikan materi agar ibu-ibu dapat lebih memahami penjelasan yang akan disampaikan oleh tim PKM.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) akan diadakan pada salah satu rumah yang ada di Blok H Perumahan Bumi Sempaja Samarinda yaitu rumah Ibu Desy pada tanggal 06 Juni 2021. Kegiatan tersebut dimulai pukul 16.00 sampai dengan selesai. Kegiatan PKM ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman kepada ibu-ibu Dasawisma terkait pengelolaan keuangan keluarga yang benar dan tepat agar segala kebutuhan terpenuhi serta tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga yang tepat dan dapat memilah pengeluaran berdasarkan kebutuhan bukan pada keinginan agar semua kebutuhan dapat terpenuhi.

Dampak Sosial

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan hasil dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama kepada pihak ibu-ibu yang ada di Blok H Perumahan Bumi Sempaja Samarinda. Dari hasil kegiatan pengabdian ini, dapat memberikan manfaat dan masukan dalam hal pengelolaan keuangan keluarga yang tepat. Dengan penghasilan yang diterima, mampu di distribusikan ke seluruh kebutuhan keluarga setelah adanya kegiatan pelatihan ini. Para ibu Dasawisma dapat menjadikannya sebagai dasar dalam membuat pertanggungjawaban keuangan kepada keluarga, sehingga seluruh keluarga mengetahui sumber dan penggunaan uang yang telah diterima serta memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dalam hal pengelolaan keuangan.

Selain itu, dampak dari hasil kegiatan ini juga dapat dirasakan oleh keluarga dari ibu-ibu Dasawisma tersebut karena terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga. Hal ini sebagai manfaat adanya pengelolaan keuangan yang tepat sehingga kesejahteraan keluarga yang diidamkan bisa tercapai

Dampak Ekonomi

Selain dampak sosial, dari hasil kegiatan ini dapat memberikan dampak ekonomi, hal ini dapat dirasakan tentunya dengan adanya pelatihan tentang pengelolaan keuangan keluarga kepada ibu-ibu Dasawisma blok H perumahan Bumi Sempaja Samarinda akan berdampak terhadap pemenuhannya kebutuhan pokok keluarga karena adanya kemampuan dan ketrampilan dalam memilah kebutuhan mana yang didahulukan dan kebutuhan mana yang bisa ditunda serta seberapa besar uang yang bisa di tabung untuk digunakan di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga akan bisa dicapai.

Kontribusi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang Kami lakukan tidak akan terlaksana tanpa ada kontribusi dari ketua Dasawisma Blok H Perumahan Bumi Sempaja Samarinda dalam menyediakan waktu, tempat dan menghadirkan para ibu-ibu yang ada di sekitar Blok

H untuk datang dalam kegiatan yang akan dilaksanakan walaupun dalam keadaan situasi pandemi COVID-19. Ketua Dasawisma sangat mengapresiasi rencana kami sebagai tim pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pelatihan pengelolaan keuangan keluarga. Ketua Dasawisma sangat memahami bahwa masalah pengelolaan keuangan keluarga bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena cukup tidaknya penghasilan yang di kelola tidak dilihat dari besar atau kecilnya penghasilan tersebut melainkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Kegiatan dilaksanakan pada salah satu rumah yang ada di Blok H yaitu di rumah Ibu Desy.

Faktor yang Menghambat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang kami laksanakan tentang pengelolaan keuangan keluarga. Hal ini kami sampaikan karena pentingnya pengelolaan keuangan keluarga yang tepat akan berdampak pada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Adapun faktor yang menghambat kegiatan yang kami laksanakan adalah terkait dengan bervariasinya latar belakang pendidikan ibu-ibu Dasawisma yang mengakibatkan bervariasinya juga daya tangkap untuk memahami dan mempraktikkan pengelolaan keluarga yang tepat. Hambatan juga terdapat pada personal ibu-ibu Dasawisma yang merasa malas atau tidak punya waktu untuk melakukan pencatatan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dalam keluarga. Hambatan lain juga dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak semua ibu-ibu bisa datang ke acara arisan sekaligus penyampaian informasi tentang pengelolaan keuangan keluarga.

Faktor yang Mendukung

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada ibu-ibu Dasawisma Blok H di perumahan Bumi Sempaja Samarinda karena adanya dukungan yang sangat baik dari ketua Dasawisma. Beliau sangat antusias menerima tim kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan menyampaikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga karena hal ini akan memberikan manfaat positif bagi ibu-ibu dalam hal mengelola keuangan keluarga yang akan berdampak pada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Dukungan lainnya juga berasal dari ibu-ibu Dasawisma yang menerima kami dengan hangat dan bersahabat serta bersedia mendengarkan penyampaian kami terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga. Walaupun dalam suasana Covid-19, ibu-ibu Dasawisma tetap berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian yang kami laksanakan.

Solusi dan Tindak Lanjut

Dengan melihat kondisi yang ada, tentunya diperlukan sebuah solusi dalam rangka memberikan nilai manfaat bagi ibu-ibu Dasawisma untuk melakukan pengelolaan keuangan keluarga yang benar dan tepat. Adapun solusi yang diberikan adalah

menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh semua ibu-ibu dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Pendekatan secara persuasif serta memberikan motivasi perlu dilakukan. Karena untuk mendukung konsistensi ibu-ibu, dalam melakukan pencatatan penerimaan dan segala pengeluaran agar perencanaan keuangan bisa berjalan dengan lancar. Solusi lainnya juga bisa dengan mengadakan pertemuan kepada ibu-ibu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar ibu-ibu yang datang bisa dalam jumlah yang lebih banyak.

Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bisa lebih bermanfaat dan mengena kepada ibu-ibu Dasawisma, maka perlu ditindak lanjuti dengan adanya pendampingan yang dilakukan secara berkala agar ibu-ibu dapat dengan konsisten dalam melaksanakan pengelolaan keuangan keluarga yang tepat sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga bisa tercapai.

Langkah Strategis untuk Realisasi Selanjutnya

Melihat pentingnya pengelolaan keuangan yang tepat dalam sebuah keluarga, maka untuk kedepannya diharapkan tidak hanya ibu-ibu yang ada di Blok H saja yang mendapatkan informasi ini. Tetapi seluruh ibu-ibu Dasawisma yang ada di Perumahan Bumi Sempaja Samarinda bisa ikut berpartisipasi, agar informasi-informasi terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga bisa dirasakan ibu-ibu yang lain.

Hal ini dikarenakan masalah pengelolaan keuangan bukan hanya untuk keluarga yang mempunyai penghasilan kecil saja tetapi juga bagi mereka yang mempunyai penghasilan besar. Memiliki penghasilan besar tanpa ada pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan keluarga pastinya juga akan membuat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga. Oleh karena itu, masalah pengelolaan keuangan keluarga ini perlu disampaikan kepada seluruh ibu-ibu baik yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi maupun yang rendah.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan pada ibu-ibu Dasawisma di Blok H perumahan Bumi Sempaja Samarinda, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan penting dimiliki karena setiap keluarga memiliki kemampuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material (jasmani) maupun non-material (rohani). Kemampuan tersebut sangat tergantung pada sumber pendapatan serta kesungguhan keluarga dalam mencapainya. Melalui pengelolaan yang baik, maka uang yang terbatas pun dapat dikendalikan penggunaannya, sehingga akan membawa kesejahteraan bagi keluarga.

Saran

Setelah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada ibu-ibu Dasawisma Blok H Perumahan Bumi Sempaja Samarinda, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Ibu-ibu tetap konsisten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/penilaian terhadap kegiatan pengelolaan keuangan keluarga agar semua kebutuhan dapat terpenuhi.
- b. Bagi tim pengabdian kepada masyarakat agar dapat melaksanakan dengan tema yang berbeda tapi masih memberikan manfaat bagi ibu-ibu Dasawisma tersebut. Misalnya pelatihan membuat penganggaran keuangan keluarga.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak dapat terealisasi tanpa campur tangan banyak pihak. Ucapan terima kasih kami berikan kepada ibu-ibu Dasawisma Blok H Perumahan Bumi Sempaja Samarinda yang telah memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pemahaman akuntansi untuk penganggaran keuangan keluarga yang kami miliki; sehingga kegiatan PKM ini dapat diselesaikan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman yang telah memberikan dukungan penuh kegiatan PKM serta pendanaan Tahun Anggaran 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Salirawati, Das. 2004. *Manajemen Keuangan Keluarga*.
- Sodikin, Slamet Sugiri. 2014. *Akuntansi Pengantar 1. Edisi Kesembilan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Jusuf, Al Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi. Jilid 1*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta

BAB 6

TELAAH ANGGARAN DISDIKPORA TAHUN 2021: EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM MASA PANDEMI AKIBAT PENURUNAN POTENSI PENDAPATAN

TELAAH ANGGARAN DISDIKPORA TAHUN 2021: EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM MASA PANDEMI AKIBAT PENURUNAN POTENSI PENDAPATAN

Hariman Bone

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
hariman.bone@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun. Banyak dampak yang terasa baik secara makro maupun mikro. Secara makro perekonomian mengalami pelambatan dengan tingkat pertumbuhan hanya sebesar 2%. Target pajak tidak terpenuhi terutama dari sektor industri. Secara keseluruhan per Agustus 2020 terjadi kontraksi 15,6% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar kontraksi tersebut dipengaruhi oleh pajak penghasilan Minyak dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 45,2% (Pangastuti, 2020). Secara mikro, pendapatan masyarakat mengalami penurunan akibat penerapan pembatasan sosial dan PPKM (Prakoso, 2021). Hal ini jelas mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga berakibat pada menurunnya penerimaan industri penyedia barang dan jasa.

Penurunan pendapatan pajak oleh pemerintah memaksa mereka untuk menerbitkan perubahan tentang besaran postur APBD untuk tiap-tiap kota dan kabupaten. Perubahan tersebut memangkas pendapatan pada kabupaten kota di Indonesia. Peraturan no. 72 tahun 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan pada total pendapatan. Penurunan paling tajam terjadi pada salah satu kabupaten disebabkan oleh dana bagi hasil sumber daya alam, mineral dan Batu Bara yang mencapai hampir 15%.

Penurunan pendapatan tersebut perlu dijabarkan dalam bentuk rasionalisasi belanja pada tahun 2021. Anggaran belanja untuk tiap unit perlu untuk ditinjau secara mendalam untuk kepentingan rasionalisasi dan *refocusing* dalam rangka menghadapi pandemi yang sedang mewabah. Rasionalisasi dan *refocusing* perlu diterapkan pada tiap jenis belanja yang bisa diefisienkan terutama pada belanja modal. Hal ini perlu dilakukan untuk mengikuti instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang penundaan belanja modal dalam rangka *refocusing* untuk penanggulangan Covid-19.

Ketidakkampuan pemkab untuk mengidentifikasi belanja pada tiap unit akan meningkatkan defisit. Defisit tersebut semakin meningkat, jika pemkab tidak melakukan

penelusuran pada belanja tiap-tiap unit organisasi. Selain berakibat pada defisit tahun 2020, kekurangmampuan untuk mengendalikan belanja juga berdampak pada utang tahun berjalan. Banyak kegiatan-kegiatan yang berjalan yang berisiko tidak terbayar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, salah satu pemkab yang menjadi tujuan PKM mengalami permasalahan penting yang harus ditelaah pada tiap-tiap organisasi. Oleh karena itu, Pemkab meminta Tim untuk melakukan penelaahan anggaran pada salah satu unit yaitu Disdikpora. Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran untuk tahun berjalan dan masa yang akan datang.

Masalah PKM

Covid-19 sangat berdampak pada dinas pendidikan khususnya sekolah. Semua sekolah ditutup, pembelajaran dan ujian sekolah diadakan secara daring. Perubahan tersebut sangat berdampak pada struktur anggaran belanja pada unit sekolah. Belanja modal, belanja perlengkapan, konsumsi, dll dapat ditekan dan dialokasikan ke belanja lain yang lebih relevan dalam kondisi pandemi atau dialokasikan pada dinas lain yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanggulangan COVID-19.

Struktur belanja dinas pendidikan secara umum juga perlu dievaluasi. Terjadi perubahan signifikan akibat kebijakan bekerja dari rumah. Rapat-rapat banyak diadakan secara daring sehingga perlu mengevaluasi belanja-belanja yang biasanya muncul ketika rapat diadakan secara *offline*. Saat pandemi berakhir pun, terdapat kebiasaan baru yang mungkin akan bertahan dan dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan *value for money* (ekonomis, efektif dan efisien).

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, perlu pengidentifikasian dan telaah struktur anggaran pada Dinas Pendidikan dan Olahraga. Telaah tersebut dapat menjadi pedoman penganggaran dimasa yang akan datang.

Solusi yang ditawarkan

Pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan kepada pemkab, lebih khusus pada Dinas Pendidikan dan Olahraga agar dilakukan telaah dan analisis terhadap anggaran yang sedang berjalan untuk menjadi pedoman rasionalisasi dan *refocusing* pada kegiatan-kegiatan yang penting dan signifikan dalam mendukung pembangunan kabupaten secara umum.

Setelah analisis anggaran, pemkab perlu untuk memberikan arahan dan memperkuat fungsi inspektorat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan pada proses penganggaran agar dapat mencapai tujuan Dinas Pendidikan dan Olahraga serta visi dan misi kabupaten secara umum.

Sasaran PKM

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Disdikpora untuk melakukan perencanaan

penganggaran yang efektif dan efisien dalam rangka penyesuaian pendapatan Pemkab. Sasaran kegiatan yang dicapai adalah; pertama, menunjukkan mekanisme penganggaran pada Dinas Disdikpora. Kedua, membantu mengidentifikasi kesesuaian kegiatan antara RPJMD Renja, Dipa dan realisasinya. Ketiga, mengidentifikasi belanja-belanja yang memerlukan penyesuaian.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Kegiatan ini adalah menelaah anggaran Dinas Disdikpora tahun 2021. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahap. Pertama adalah tahap pendahuluan. Tim melakukan kunjungan ke kabupaten untuk mendengarkan uraian proses bisnis Dinas Disdikpora. Berdasarkan pemahaman tersebut, Tim menyusun perencanaan penelaahan yang mencakup prosedur yang akan dilakukan dan jadwal pelaksanaan.

Kedua adalah tahap pelaksanaan. Tim melaksanakan penelaahan selama 5 hari di lapangan dan dilanjutkan satu minggu di Samarinda. Ketiga adalah tahap pelaporan. Tim menyusun laporan berdasarkan hasil telaahan yang diperoleh selama pelaksanaan.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Tim melakukan kunjungan awal untuk mendengarkan uraian proses penganggaran dan proses bisnis yang dilakukan 1 minggu sebelum kunjungan lapangan. Setelah data terkumpul, tim memulai melakukan telaah dan analisis pada struktur belanja Dinas Pendidikan dan Olahraga. Telaah tersebut dilakukan dengan membandingkan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran untuk mengidentifikasi ada tidaknya belanja yang tidak teranggarkan.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang nilainya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran namun tidak tercantum dalam Rencana kerja anggaran dan rencana kerja. Jenis kegiatan tersebut meliputi belanja modal, belanja aplikasi dan monitoring serta evaluasi. Pada penganggaran selanjutnya Dinas Pendidikan sebaiknya memperhatikan kesesuaian tersebut apalagi saat pendapatan menurun semasa pandemi.

Langkah selanjutnya tim melakukan penelaahan tiap-tiap akun belanja untuk mengidentifikasi mana belanja yang perlu ditinjau kembali dalam kondisi pandemi. Peninjauan tersebut menunjukkan adanya beberapa akun belanja yang perlu ditelaah lebih dalam terkait relevansi dan signifikansinya.

a. Belanja Modal

Dinas Disdikpora perlu meninjau ulang beberapa belanja modal. Belanja modal harus dikaji besaran rupiahnya dan skala prioritas saat ini. Belanja-belanja yang bisa ditunda pengeluarannya harus dibatasi untuk kepentingan penanggulangan

Covid dan pengurangan defisit serta utang. Hasil penelaahan menunjukkan adanya beberapa belanja modal yang dapat ditekan atau ditunda semasa pandemi. Dinas dapat memutuskan belanja modal mana yang perlu ditunda dengan melihat urgensinya semasa pandemi. Belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas sekolah dapat ditunda terlebih dahulu karena proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Penundaan belanja modal ini dapat berkontribusi besar untuk mengatasi defisit yang terjadi.

b. Belanja Honorarium

Dinas Disdikpora perlu mengkaji keterkaitan honorarium dengan jenis kegiatan yang dilakukan dan tugas pokok yang memang menjadi kewajiban pegawai. Jika kegiatan tersebut merupakan tupoksi pegawai tertentu sebagaimana tidak perlu dibuatkan dalam satu kegiatan khusus agar honor terkait dapat diefisienkan.

c. Belanja Bahan Habis Pakai

Disdikpora perlu menelaah keterkaitan belanja ATK dengan kegiatan tertentu, Dampak dari kebijakan bekerja dari rumah dan belajar dari rumah adalah berkurangnya penggunaan ATK. ATK yang terkait perlu untuk ditinjau dan diefisienkan untuk dialokasikan pada kegiatan prioritas.

d. Belanja Perjalanan Dinas

Masa pandemi mempengaruhi pola kebiasaan baru. Banyak rapat-rapat dan kegiatan seminar dan monitoring dilakukan secara daring. Disdikpora perlu mengefisienkan perjalanan dinas yang jumlahnya cukup besar. Selain itu, hal yang perlu ditelaah adalah bagaimana keterkaitan antara tujuan perjalanan dengan kegiatan yang dilakukan serta output yang dihasilkan.

e. Belanja Hibah.

Dinas perlu untuk menelaah belanja hibah yang dikeluarkannya. Belanja hibah harus menyesuaikan kemampuan anggaran belanja dan dilakukan dengan perhitungan yang akurat.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Penelaahan atas akun-akun tersebut akan memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi pemkab secara umum dan Dinas Pendidikan dan Olahraga secara khusus. Penelaahan ini bertujuan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan dan belanja yang dapat diefisienkan. Efisiensi ini berdampak jelas bagi sosial dan ekonomi. Efisiensi/rasionalisasi dapat menggeser anggaran kegiatan yang kurang memiliki dampak sosial ke kegiatan yang bermanfaat bagi sosial. Belanja-belanja yang dapat dirasionalisasi bisa diarahkan ke penanggulangan pandemi Covid-19. Selain itu, penghematan tersebut dapat dipakai

dalam pengembangan masyarakat yang sesuai dengan arah pembangunan pemkab.

Kegiatan ini juga memiliki dampak ekonomi. Tahun 2020 Pemkab masih memiliki defisit yang cukup besar. Lebih lanjut, masih terdapat utang kegiatan dan utang pada instansi tertentu yang secara jumlah cukup besar. Penghematan atau rasionalisasi tersebut dapat membantu untuk menutupi defisit dan dapat dipakai untuk membayar utang kegiatan dan utang kepada entitas tertentu. Hal ini akan membuat laporan posisi keuangan dan laporan realisasi anggaran terlihat lebih sehat. Rasionalisasi juga dapat menggeser belanja dari kegiatan yang kurang menunjang perekonomian ke kegiatan yang menunjang perekonomian masyarakat.

Kontribusi Mitra PKM dan Pihak Lainnya Terhadap Pelaksanaan

Berdasarkan tahapan kegiatan, mitra memiliki kontribusi yang cukup penting pada tiap tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pada tahap pendahuluan, Tim PKM Bersama dengan mitra menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan, dan mitra memberikan gambaran tentang proses bisnisnya sehingga tim PKM mampu untuk menyusun prosedur telaah yang dibutuhkan.

Pada tahap pelaksanaan, mitra berkontribusi dengan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan menyediakan waktu untuk berdiskusi terkait persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan. Selama di lapangan, Mitra juga memberikan ruang khusus dalam rangka melaksanakan penelaahan dan memberikan fasilitas penginapan. Pada tahap pelaporan mitra aktif memberikan informasi ketika tim membutuhkannya.

Faktor penghambat dan Pendukung

Kegiatan PKM yang dilakukan secara umum berjalan dengan baik. Hanya saja dalam proses pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dihadapi. Bagian awal adalah hambatan psikologis yang diperoleh ketika Tim bertemu pertama kali dengan mitra. Beberapa orang staf menutup diri, tetapi setelah dijelaskan mereka mulai memberikan banyak informasi. Selanjutnya dalam proses memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada keterlambatan penyerahan data sehingga tim tidak optimal pada hari pertama.

Hambatan lainnya adalah dalam tataran teknis. Beberapa pekerja mitra tinggal jauh dari lokasi kantor, sehingga ada keterlambatan dalam beberapa pertemuan dengan mitra. Jarak tim PKM juga dengan lokasi sangat jauh.

Kelancaran kegiatan PKM ini tidak luput dari kesiapan tim PKM dan sumber daya yang dimiliki oleh tim PKM. Sumber daya tersebut adalah sumber daya pengetahuan dan faslilitas yang dimiliki oleh tim PKM. Mitra juga memberikan fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung pekerjaan dengan baik. Diantara fasilitas yang disediakan oleh mitra adalah Ruang tempat kegiatan berlangsung, partisipasi aktif memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, memberikan fasilitas penginapan selama melaksanakan kegiatan di lapangan.

Solusi dan Tindak Lanjut

Beberapa solusi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Dinas Disdikpora adalah sebagai berikut;

1. Dinas Disdikpora perlu memperkuat fungsi perencanaan agar menghindari terjadinya perbedaan antar dokumen penganggaran.
2. Perlu dilakukan efisiensi belanja ATK pada tiap kegiatan karena sudah teranggarkan dalam jumlah yang besar pada bagian tertentu
3. Perlu membedakan antara kegiatan yang menjadi tupoksi dan kegiatan insidental, kegiatan tupoksi tidak memerlukan honor karena merupakan pekerjaan yang telah menjadi tugas utamanya.

Langkah-Langkah Strategis Untuk Realisasi Selanjutnya.

Tim PKM hanya sebatas membantu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang potensi untuk dirasionalisasi. Sebagai langkah selanjutnya, Sebaiknya proses penganggaran terawasi dari titik awal dan di setiap tingkatan. Pada tingkatan Dinas, Disdikpora harus memperkuat perencanaan dan menentukan skala prioritas untuk menyesuaikan anggaran pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Pada tingkatan TAPD, Pemerintah harus tegas untuk memilih kegiatan-kegiatan prioritas dari setiap Dinas dan menyesuaikan dengan rencana strategis kabupaten serta potensi pendapatan pemerintah kabupaten. Hal tersebut dapat membantu Pemkab dalam mengatasi defisit yang terjadi dan membantu untuk mengurangi utang yang dimilikinya.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk membantu Dinas Disdikpora untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan atau belanja-belanja dari tiap kegiatan yang memerlukan rasionalisasi/ efisiensi dalam masa pandemi. Rasionalisasi ini dapat membantu untuk mengatasi defisit yang dialami oleh pemerintah kabupaten secara umum. Bentuk kegiatan PKM ini adalah rewiu yang dilakukan oleh tim Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Hasil kegiatan menunjukkan perlunya memperhatikan proses perencanaan dan perlu memperhatikan beberapa kegiatan dan belanja yang dapat dirasionalisasi. Hasil ini dapat menjadi pedoman dalam revisi anggaran dan penganggaran tahun berikutnya.

Secara umum kegiatan ini berjalan dengan baik karena dukungan penuh dari tim PKM dan mitra. Namun demikian, terdapat hal-hal yang menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan di masa yang akan datang. Seperti; perlunya komunikasi intens antara tim PKM dan mitra.

Saran

Terdapatnya beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan PKM membutuhkan perbaikan-perbaikan di masa mendatang.

1. Perlu koordinasi yang intens antara Tim PKM dan mitra baik dalam masa pendahuluan, lapangan maupun pada saat penyusunan laporan.
2. Mitra sebaiknya menggunakan hasil revidi ini sebagai pedoman dalam melakukan revisi dan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
3. Mitra perlu mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan jadwal kesepakatan yang telah dibuat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak dapat terealisasi tanpa campur tangan banyak pihak. Ucapan terima kasih kami berikan kepada Pemkab yang telah memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pemahaman yang kami miliki. Secara khusus, terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga yang telah memberikan dukungan yang tinggi sehingga kegiatan PKM ini dapat diselesaikan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi yang telah menunjuk kami dan memberikan dukungan penuh pada kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2021) Nomor 03/Kb/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor Hk.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
- Pangastuti, Triyani. (2020). Penerimaan Pajak Sektor Usaha Masih Kontraksi. Investor.id. diperoleh dari <https://investor.id/business/225606/penerimaan-pajak-sektor-usaha-masih-kontraksi>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020.
- Prakoso, E. S. (2021). Dampak Corona (Covid 19) terhadap Perekonomian di Indonesia. Kumparan.com. diperoleh dari <https://kumparan.com/ekiseptiano2018/dampak-corona-COVID-19-terhadap-perekonomian-di-indonesia-1uul5eunIG9/full>

BAB 7

SOSIALISASI TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BUMDES KARYA MANDIRI DESA SEPAKAT, KECAMATAN LOA KULU, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SOSIALISASI TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BUMDES KARYA MANDIRI DESA SEPAKAT, KECAMATAN LOA KULU, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dwi Risma Deviyanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
dwi.risma.deviyanti@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021, Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi dengan berdasarkan lima prinsip yaitu profesional, terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan sebuah usaha, sangat diperlukan adanya sistem tata kelola dan pengelolaan keuangan yang sesuai prosedur yang bermanfaat untuk ketertiban administrasi organisasi dan pengelolaan keuangan lebih lanjut.

Proses pembentukan dan pelaksanaan BUMDes wajib mengedepankan beberapa prinsip tata kelola khususnya transparansi dan akuntabilitas terkait AD-ART (PP No. 11 Tahun 2021 pasal 25). Atas hal tersebut, perlu diidentifikasi lebih lanjut teknis dan muatan indikator prinsip tata kelola maupun tata laksana dalam pengelolaan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa, hasil musyawarah desa, dan PP No. 11 Tahun 2021.

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Desa Sepakat merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDes bernama Karya Mandiri yang didirikan tahun 2015, akan tetapi di tahun 2020 BUMDes Karya Mandiri berstatus tidak aktif. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sepakat 2020-2026, Desa Sepakat menyebutkan adanya masalah tidak memiliki badan usaha yang mampu memberikan penghasilan kepada kas desa. Padahal terdapat potensi

adanya usaha yang dapat dikembangkan. Desa Sepakat berencana membentuk BUMDes Karya Mandiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan. Oleh karena itu, Desa Sepakat memerlukan adanya pemahaman mengenai tata kelola dan pengelolaan keuangan pada BUMDes yang akan didirikan ini.

Solusi yang Ditawarkan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu pihak pengelolaan BUMDes Karya Mandiri dalam memahami bagaimana tata kelola dan pengelolaan keuangan yang baik agar badan usaha ini bisa memenuhi 5 prinsip BUMDes yaitu profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dengan topik tata kelola dan pengelolaan keuangan BUMDes pada BUMDes Karya Mandiri, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan memberikan pemahaman tentang pengertian sistem tata kelola dan pengelolaan keuangan BUMDes. Adapun sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada BUMDes Karya Mandiri, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih membutuhkan identifikasi dan tindak lanjut teknis mengenai tata kelola maupun tata laksana dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pada awalnya direncanakan secara luring tatap muka, akan tetapi berdasarkan surat edaran Bupati Kutai Kartanegara No. B-1285/DINKES/065.11/07/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Meeting pada hari Senin, 12 Juli 2021 pukul 09.00 WITA - 12.00 WITA.

Bentuk kegiatan dalam Zoom Meeting berupa diskusi tanya jawab mengenai sistem tata kelola dan pengelolaan keuangan BUMDes bersama dengan Bapak Ismail selaku bendahara pengelola BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika BUMDes Karya Mandiri merasa masih memerlukan pendampingan, maka akan dilakukan pendampingan lebih lanjut baik secara luring maupun daring tergantung kondisi yang akan datang.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan lancar dan menyenangkan selama hampir 3 jam. Kegiatan diawali dengan pemaparan kondisi BUMDes Karya Mandiri oleh Bapak Ismail selaku bendahara pengelola BUMDes. Setelah pemaparan

selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dalam diskusi dan tanya jawab, banyak sekali informasi yang dihasilkan antara lain:

1. Sejak aktif kembali, BUMDes Karya Mandiri menjalankan unit usaha pertama yaitu jual beli Tandang Buah Segar (TBS) sawit dan baru berjalan dua (2) bulan. Pembelian dari petani di Muara Kaman dan menjualnya ke pabrik.
2. Harga beli sawit dari petani belum termasuk biaya pengiriman dan biaya lain-lain. Harga jual sawit ditentukan oleh perusahaan sehingga dibutuhkan perhitungan harga pokok penjualan yang lebih mendetail agar tidak mengalami kerugian.
3. Laporan keuangan masih manual dengan sistem pencatatan hanya pembukuan biasa dan tidak melakukan pemisahan akun pada pembukuan.
4. Bendahara tidak memiliki keahlian akuntansi dan komputer, sehingga bendahara berharap peserta perwakilan PKM bisa berkunjung dengan BUMDes Karya Mandiri untuk pembelajaran pencatatan dan pembimbingan pengoperasian aplikasi keuangan.
5. BUMDes Karya Mandiri tidak memiliki sistem pengendalian internal karena kepengurusan hanya terdiri dari tiga (3) orang dan unit usaha yang baru berjalan satu (1) unit usaha.
6. Selain jual beli Tandang Buah Segar (TBS) sawit, masih ada potensi unit usaha lain berupa: penyeberangan; pasir; Pertamina mini; apotek desa; dan air mineral.
7. BUMDes Karya Mandiri belum berani menjalankan koperasi simpan pinjam karena keterbatasan dana penyertaan modal dan kecilnya tingkat pengembalian oleh masyarakat desa. Apabila nanti BUMDes Karya Mandiri besar, bisa dipertimbangkan untuk menyalurkan pinjaman kepada usaha kecil di Desa Sepakat.
8. BUMDes Karya Mandiri tidak membuat surat perjanjian kemitraan, hanya berupa akad lisan saja. Oleh karena itu, perlu dibuatkan perjanjian atau akad secara tertulis dengan mitra agar perjanjian atau akad jelas dituangkan dalam dokumen.
9. BUMDes Karya Mandiri disarankan membuat kemitraan dengan Pertamina, LAZ, BAZNAS, dan orang-orang mampu di lingkungan desa untuk mewakafkan sebagian kecil harta untuk kepentingan desa seperti membuat tabungan haji, tabungan umrah, dan tabungan kurban.

Dampak Sosial, Dampak Ekonomi, dan Lainnya

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki beberapa dampak antara lain:

1. Dampak keilmuan berupa bertambahnya pengetahuan dan wawasan oleh pengelola BUMDes tentang akuntansi, sistem tata kelola dan tata laksana

BUMDes.

2. Dampak ekonomi yaitu bertambahnya pengetahuan dan wawasan para pengelola BUMDes Karya Mandiri, maka pengelola dapat dengan maksimal menjalankan unit usahanya dan dapat mendapatkan laba yang maksimal pula sehingga perekonomian baik pengelola maupun masyarakat desa bisa meningkat.
3. Dampak sosial dengan adanya perkembangan usaha dari BUMDes Karya Mandiri akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan Desa Sekapat yang lebih luas dan modernisasi, sehingga masyarakat pun akan sejahtera.

Kontribusi Mitra PKM dan Pihak Lainnya Terhadap Pelaksanaan

Kontribusi mitra dalam kegiatan kepada masyarakat ini adalah sebagai media dan wadah bagi terlaksananya kegiatan kepada masyarakat. Pihak lain yang berkontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Laboratorium Inkubator Bisnis telah menjembatani kemitraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara pelaksana PKM dan mitra PKM. Mitra PKM dalam hal ini adalah BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Faktor yang Menghambat/Kendala

Faktor yang menghambat atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa pandemi Covid-19 yang semakin meningkat sehingga dikeluarkannya surat edaran Bupati Kutai Kartanegara No. B-1285/DINKES/065.11/07/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM sebagai upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Surat edaran ini berefek pada tidak dapat dilaksanakannya kegiatan ini secara luring atau tatap muka. Selain itu, kesulitan yang dialami mitra PKM yaitu tidak ada yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Mitra PKM memiliki jumlah pengelola yang sedikit, sehingga membuat kesulitan dalam menjalankan unit usaha dan membuat prosedur-prosedur sistem pengendalian internal secara baik.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa kesediaan pengelola BUMDes Karya Mandiri untuk mengganti pertemuan dari luring atau tatap muka menjadi daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

Solusi dan Tindak Lanjut Strategis

Perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut jika pengelola BUMDes merasa perlu untuk dilakukan secara luring jika virus Covid-19 sudah mereda atau pun daring. Langkah-langkah strategis untuk realisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

antara lain:

1. Membekali para pengelola BUMDes Karya Mandiri pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi dan laporan keuangan.
2. Melakukan pertemuan secara tatap muka atau luring ketika Covid-19 telah mereda atau hilang dengan tujuan untuk pembimbingan keahlian akuntansi topik yang sulit dijelaskan jika melalui daring.
3. Pendampingan yang berkala dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan unit usaha BUMDes Karya Mandiri.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan pelaksanaan BUMDes Karya Mandiri, Kecamatan Loa, Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara wajib mengedepankan beberapa prinsip tata kelola khususnya transparansi dan akuntabilitas terkait AD-ART (PP No. 11 Tahun 2021 pasal 25). Atas hal tersebut, perlu diidentifikasi lebih lanjut teknis dan muatan indikator prinsip tata kelola maupun tata laksana dalam pengelolaan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa, hasil musyawarah desa, dan PP No. 11 Tahun 2021.

Saran

Kegiatan sejenis ini diharapkan dapat dikembangkan dan dilaksanakan terus menerus secara keberlanjutan dan meluas agar lebih banyak lagi BUMDes yang dengan mudah dapat memiliki pemahaman tentang tata kelola dan pengelolaan keuangan BUMDes sehingga akan lebih banyak desa yang bisa lebih sejahtera. Kegiatan ini juga diharapkan mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat terutama Universitas Mulawarman sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dalam unsur pengabdian kepada masyarakat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak dapat terealisasi tanpa campur tangan banyak pihak. Ucapan terima kasih kami berikan kepada BUM Desa Karya Mandiri Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pemahaman akuntansi. Akuntansi terkait tata kelola dan tata laksana BUM Desa yang kami miliki, sehingga kegiatan PKM ini dapat diselesaikan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan penuh kegiatan PKM serta pendanaan Tahun Anggaran 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.
- Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. B-1285/DINKES/065.11/07/2021 tentang *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Lonjakan Kasus COVID-19 Gelombang Kedua Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara*. Tenggarong.
- Yulianti dan Janie, D.N.A. (2019). *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Transparansi dan Akuntabilitas*. Tiga Media Pratama. Semarang, Indonesia.

BAB 8

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA MANDIRI DESA SEPAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA MANDIRI DESA SEPAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ibnu Abni Lahaya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
ibnu.abni.lahaya@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Rencana usaha (*bussiness plan*) merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah usaha atau bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Penyusunan rencana usaha akan menjadikan calon pelaku usaha dapat melihat dengan jelas apakah usaha yang akan dijalankan nanti memiliki prospek keberhasilan yang tinggi, sekaligus dapat meyakinkan calon investor bahwa dana investasi mereka tidak akan merugi jika melakukan kerja sama. Perencanaan usaha harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat pada barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga perencanaan usaha harus berbasis pada permintaan pasar.

Rencana usaha BUMDes menjadi sangat penting sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha ke depan yang menguntungkan. Penyusunan rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan BUMDes dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes sebagai badan usaha yang berpihak pada masyarakat berupaya untuk menggali seluruh potensi desa agar dapat di kembangkan dan dikelola dengan sebaik mungkin secara efektif dan efisien sehingga mampu menunjang keuangan desa.

BUMDes Karya Mandiri merupakan 1 dari 188 BUMDes yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan terletak di Desa Sepakat, Loa Kulu. Pengurus BUMDes Karya Mandiri terdiri dari direktur, sekretaris, dan bendahara. BUMDes Karya Mandiri berdiri sejak tahun 2016 dengan pengurus yang pertama menjalankan unit usaha sarang walet

akan tetapi berstatus tidak aktif. Pada Desember tahun 2020, BUMDes Karya Mandiri mulai aktif kembali dengan kepengurusan kedua dibentuk melalui musyawarah desa. Sejak aktif kembali, BUMDes Karya Mandiri menjalankan unit usaha pertama yaitu jual beli Tandang Buah Segar (TBS) Sawit dan baru berjalan dua (2) bulan. Pembelian dari petani di Muara Kaman dan menjualnya ke pabrik.

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bendahara BUMDes Karya Mandiri yaitu Bapak Ismail bahwa proses perencanaan dan penganggaran BUMDes telah berjalan namun belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan secara praktik, pihak BUMDes masih memiliki satu unit usaha dan sedang mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi bisnis, namun semua masih bersifat akad lisan dan tidak tertulis. Selain itu, permasalahan lainnya yang diketahui antara lain kekurangan sumber daya modal, tempat usaha yang belum representatif, manajemen perencanaan pendapatan dan belanja belum dirancang dengan baik, dan kemampuan sumber daya manusia yang belum juga memadai, serta tidak terdapat pengendalian internal yang baik.

Solusi yang Ditawarkan

Atas permasalahan dan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya upaya atas peningkatan kapasitas pengetahuan atas proses perencanaan dan penganggaran BUMDes sehingga pelaksanaan dan implementasi peran BUMDes sebagai instrumen dari pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan memenuhi visi, misi, dan tujuan RPJMDes sebagaimana peran dan kedudukan BUMDes itu sendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia yaitu dengan mengadakan diskusi dan pendampingan kepada BUMDes tentang perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “Perencanaan dan Penganggaran Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Sepakat” dilaksanakan dengan tujuan, antara lain:

1. Tujuan umum

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Tujuan khusus

- a. Menanamkan pentingnya peran perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan tanggung jawab BUMDes sebagai badan hukum.

- b. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pengelola BUMDes berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran baik yang bersifat kendala teknis maupun non-teknis.
- c. Mewujudkan pengelolaan BUMDes kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 dan visi misi RPJMDes berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sasaran kegiatan ini adalah pengelola dan penanggung jawab BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat Kutai Kartanegara yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun dikarenakan adanya jadwal yang bersamaan, kegiatan PKM ini hanya dihadiri oleh Bapak Ismail selaku Bendahara BUMDes.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “Perencanaan dan Penganggaran Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Sepakat” dilaksanakan secara daring (*online*) via Zoom Meeting. Hal ini dilakukan mengingat adanya kebijakan pemerintah daerah atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adapun metode pelaksanaan kegiatan PKM yang digunakan khususnya dalam mengidentifikasi permasalahan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya dan untuk mendukung keberhasilan kegiatan PKM ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh pengelola BUMDes. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi, dan *display* dapat memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat, dan mudah.

2. Tanya Jawab

Metode ini digunakan sebagai media diskusi untuk mengetahui lebih lanjut terkait kelebihan serta kelemahan yang dihadapi pihak BUMDes.

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan (asistensi) secara *online* dan intensif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Ceramah tentang perencanaan dan penganggaran BUMDes

Pemahaman konsep kepada para penanggungjawab BUMDes mengenai komponen dan indikator yang harus ada pada dokumen terkait perencanaan dan penganggaran, merujuk pada Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 dan beberapa aturan terkait.

2. Diskusi

Pemahaman atas penerapan maupun pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh BUMDes dan bagaimana kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 dan beberapa aturan terkait.

3. Evaluasi hasil pelaksanaan PKM

Keberhasilan pada pelaksanaan PKM ini akan dinilai dari kemampuan Penanggungjawab dan Badan Pengawas BUMDes dalam memahami tata cara dan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan untuk melihat indikator-indikator capaian merujuk pada analisis awal yang dilakukan pihak BUMDes (khususnya pada jenis usaha yang dipilih untuk dilakukan serta karakteristik lainnya sebagaimana PP No.11 Tahun 2021 pasal 38) serta bagaimana perwujudan atau dampak dalam muatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban (pasal 58).

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Luaran (*output*) kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini antara lain:

1. BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat diberikan konsep teoritis mengenai proses perencanaan dan penganggaran BUMDes yang mencakup beberapa komponen dan indikator sesuai dengan regulasi terkait khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2021.
2. Adanya keinginan pihak pengelola dalam mengembangkan unit usaha memiliki pengaruh terhadap bagaimana memproyeksikan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada periode mendatang sehingga perlu pemahaman yang lebih baik terhadap perencanaan dan penganggaran.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “Perencanaan dan Penganggaran Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Sepakat” dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat, khususnya kepada mitra. Adapun manfaat kegiatan PKM ini antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman kepada pengelola BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap rerangka konsep serta rerangka praktis atas perencanaan dan penganggaran BUMDes yang sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku.
- b. Selain sebagai pendampingan (asistensi), kegiatan PKM ini menjadi forum untuk berdiskusi dan bertukar pikiran antara pengelola BUMDes sebagai profesional dengan akademisi perguruan tinggi, khususnya dalam rangka memajukan dan menyukseskan pelaksanaan tanggung jawab BUMDes sebagai

badan hukum yang mengedepankan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainabel*.

- c. Meningkatkan kesadaran atas peran dan tanggung jawab BUMDes sebagai instrumen pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi Mitra PKM

Kontribusi mitra PKM, dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman sebagai institusi pendidikan dengan kompetensi akademisi yang memadai, memberikan masukan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran BUMDes agar menjadi lebih baik dan memenuhi visi, misi, dan tujuan RPJMDes sebagaimana peran dan kedudukan BUMDes itu sendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Tindak Lanjut

Faktor pendukung selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, antara lain:

- a. Antusiasme dan minat yang tinggi dari mitra terhadap pendampingan teknis perencanaan dan penganggaran BUMDes.
- b. Mitra sangat kooperatif dan informatif dalam menyampaikan beberapa kendala (teknis maupun non teknis) dengan dokumen pendukung sehingga pelaksana PKM dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi pengelola.
- c. Dukungan dari pihak Desa yang menginisiasi dan memfasilitasi baik terhadap BUMDes maupun berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan PKM ini hingga terlaksana dengan baik.

Adapun faktor penghambat selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan secara *online* dan bersifat panel dengan beberapa akademisi lainnya serta faktor ketersediaan waktu sehingga membatasi ruang diskusi secara intens.
- b. Mitra PKM hanya diwakili oleh Bendahara BUMDes sehingga informasi yang tersampaikan masih terbatas.

Solusi dan Tindak Lanjut

Permasalahan utama terkait perencanaan dan penganggaran pada BUMDes Karya Mandiri adalah mengenai proyeksi atas pendapatan dan belanja di masa yang akan datang, terutama dengan kondisi tidak pasti atas rencana pengembangan unit usaha BUMDes. Selain itu, kondisi berikutnya adalah minimnya pengetahuan dan *skill* atas pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, penyampaian dan diskusi mengenai peran penting dan vitalnya perencanaan sebagai unsur dan dasar panduan dalam menentukan aktivitas usaha ke depan yang menguntungkan. Perencanaan dan penganggaran BUMDes mesti disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan organisasi, dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran harus berorientasi pada kinerja organisasi sehingga perencanaan yang sudah disusun dapat tercapai. Anggaran merupakan manajerial *plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Anggaran dalam suatu organisasi menggambarkan kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas program. Perencanaan dan penganggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan organisasi dan logis dengan merujuk pada informasi pasar memungkinkan tujuan BUMDes dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang.

Langkah-Langkah Strategis

Langkah-langkah strategis dalam menghadapi permasalahan yang telah teridentifikasi antara lain:

1. Perlunya pendampingan secara langsung dan bersifat luring terkait penetapan komponen dan indikator perencanaan dan penganggaran BUMDes dengan mengedepankan adanya diversifikasi bisnis atas unit usaha sebagai dasar penetapan perencanaan dan penganggaran yang kompatibel dan sistematis.
2. Pemahaman atas potensi bisnis yang tepat dan cocok dengan karakteristik BUMDes sehingga membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran kedepannya.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha milik desa berkekuatan hukum khususnya dalam pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun sumber pendanaan BUMDes berasal dari penyisihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini berarti bahwa BUMDes dibentuk sebagai perwujudan masyarakat desa dan demi kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan tanggung jawabnya, sudah seharusnya BUMDes dikelola dengan baik, benar, dan profesional. Salah satu cara untuk perwujudan pengelolaan tersebut maka harus mengikuti kaidah-kaidah ekonomi dalam pengelolaan sebagaimana aturan-aturan terkait. Berdasarkan hasil

pemaparan materi dan diskusi, serta terlepas dari permasalahan lainnya (keterbatasan unit usaha), dapat disimpulkan bahwa mitra PKM memiliki kredibilitas, kompetensi, dan memenuhi kualifikasi dalam mengidentifikasi komponen maupun indikator berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran BUMDes dengan kondisi yang ada, sebagaimana ditunjukkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang memadai dan lengkap.

Saran

Berdasarkan evaluasi dan diskusi yang dilakukan selama kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas atas kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan.
2. Perlu adanya diversifikasi bisnis atau peningkatan kuantitas unit usaha BUMDes untuk meningkatkan jumlah penjualan (pendapatan) BUMDes sehingga tidak hanya bergantung pada sektor jual beli TBS Sawit.
3. Pentingnya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran BUMDes dengan melakukan proyeksi pendapatan di tahun yang akan datang khususnya jika pengelola BUMDes melaksanakan strategi diversifikasi bisnis.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak dapat terealisasi tanpa campur tangan banyak pihak. Ucapan terima kasih kami berikan kepada Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Sepakat yang telah memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pemahaman akuntansi terkait perencanaan dan penganggaran yang kami miliki; sehingga kegiatan PKM ini dapat diselesaikan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan penuh kegiatan PKM serta pendanaan Tahun Anggaran 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta

BAB 9

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BUMDES PADA BUMDES KARYA MANDIRI DESA SEPAKAT, KECAMATAN LOA KULU, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BUMDES PADA BUMDES KARYA MANDIRI DESA SEPAKAT, KECAMATAN LOA KULU, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Eka Febriani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
eka.febriani@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi dengan berdasarkan 5 prinsip yaitu professional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan sebuah usaha, sangat diperlukan adanya pengendalian internal guna mencegah terjadinya tindak kecurangan dan menjaga keberlangsungan usaha tersebut. Pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan guna menjaga dan melestarikan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013). Dengan sistem pengendalian internal yang baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan BUMDes yang bisa dipercaya sehingga dapat memberikan *value added* untuk membangun ekonomi desa menuju masyarakat yang sejahtera (Yulianti dan Janie, 2019).

Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDes bernama Karya Mandiri yang didirikan tahun 2015 akan tetapi di tahun 2020 Karya Mandiri berstatus tidak aktif. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sepakat 2020-2026, Desa Sepakat menyebutkan adanya masalah yaitu tidak memiliki badan usaha yang mampu memberikan penghasilan kepada kas desa, padahal terdapat potensi adanya usaha yang dapat dikembangkan. Desa Sepakat berencana membentuk BUMDes Karya Mandiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan

pelatihan dan pengembangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengendalian internal yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Karya Mandiri.

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan fenomena dan analisis situasi yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa permasalahan utama pengabdian pada masyarakat adalah BUMDes Karya Mandiri belum memiliki pengendalian internal yang baik sehingga profesionalisme, tanggung jawab, keterbukaan, partisipatif dan kapasitas sumber daya (SDM dan SDA) belum terorganisir dengan maksimal.

Solusi yang ditawarkan

Dengan melihat permasalahan yang ada, tentunya diperlukan sebuah solusi atau tindaklanjut dalam rangka memberikan nilai tambah, manfaat dan penghasilan (ekonomis) bagi masyarakat Desa Sepakat secara umum dan pengelola BUMDes Karya Mandiri secara khusus dalam memaksimalkan badan usaha dan sumber daya yang dimiliki. Solusi yang dapat diberikan adalah membekali para pengelola BUMDes Karya Mandiri pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengendalian internal pada melalui ceramah dan diskusi dengan pengelola BUMDes.

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk membantu pihak pengelola BUMDes Karya Mandiri dalam memahami bagaimana penerapan sistem pengendalian internal agar badan usaha ini bisa memenuhi lima (5) prinsip BUMDes yaitu profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 pukul 09.00-12.00 WITA secara daring dengan aplikasi Zoom Cloud Meetings sebagai bentuk tindaklanjut surat edaran Bupati Kutai Kartanegara No. B-1285/DINKES/065.11/07/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab mengenai sistem pengendalian internal BUMDes bersama dengan Bapak Ismail selaku bendahara pengelola BUMDes Karya Mandiri. Jika BUMDes Karya Mandiri merasa masih memerlukan tindak lanjut maka akan dilakukan pendampingan lebih lanjut baik secara luring maupun daring, tergantung kondisi saat yang akan datang.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berjalan lancar dan menyenangkan selama tiga jam. Kegiatan diawali dengan pemaparan kondisi BUMDes Karya Mandiri oleh Bapak Ismail selaku bendahara pengelola BUMDes. Setelah pemaparan selesai, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dalam diskusi dan tanya jawab, banyak informasi yang dihasilkan antara lain:

1. Sejak aktif kembali, BUMDes Karya Mandiri menjalankan unit usaha pertama yaitu jual beli Tandang Buah Segar (TBS) Sawit dan baru berjalan dua (2) bulan. Pembelian dari petani di Muara Kaman dan menjualnya ke pabrik.
2. Harga beli sawit dari petani belum termasuk biaya pengiriman dan biaya lain-lain. Harga jual sawit ditentukan oleh perusahaan sehingga dibutuhkan perhitungan harga pokok penjualan yang lebih mendetail agar tidak mengalami kerugian.
3. Laporan keuangan masih manual dengan sistem pencatatan hanya pembukuan biasa dan tidak melakukan pemisahan akun pada pembukuan.
4. Bendahara tidak memiliki keahlian akuntansi dan komputer, sehingga bendahara berharap peserta perwakilan PKM bisa berkunjung dengan BUMDes Karya Mandiri untuk pembelajaran pencatatan dan pembimbingan pengoperasian aplikasi keuangan.
5. BUMDes Karya Mandiri tidak memiliki sistem pengendalian internal karena kepengurusan hanya terdiri dari tiga (3) orang dan unit usaha yang baru berjalan satu (1) unit usaha.
6. Selain jual beli Tandang Buah Segar (TBS) Sawit, masih ada potensi unit usaha lain berupa:
 - a. Penyeberangan
 - b. Pasir
 - c. Pertamina Mini
 - d. Apotek Desa
 - e. Air Mineral
7. BUMDes Karya Mandiri belum berani menjalankan koperasi simpan pinjam karena keterbatasan dana penyertaan modal dan kecilnya tingkat pengembalian oleh masyarakat Desa. Apabila nanti BUMDes Karya Mandiri besar bisa dipertimbangkan untuk menyalurkan pinjaman kepada usaha kecil di Desa Sepakat.
8. BUMDes Karya Mandiri tidak membuat surat perjanjian kemitraan, hanya berupa akad lisan saja. Oleh karena itu, perlu dibuatkan perjanjian atau akad secara tertulis dengan mitra agar perjanjian atau akad jelas dituangkan dalam dokumen.
9. BUMDes Karya Mandiri disarankan membuat kemitraan dengan Pertamina, LAZ,

BAZNAS, dan orang-orang kaya di lingkungan desa untuk mewakafkan sebagian kecil harta untuk kepentingan desa seperti membuat tabungan haji, tabungan umrah, tabungan kurban.

Oleh karena berbagai keterbatasan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan, maka dianggap perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai bentuk evaluasi dan tindak lanjut untuk hasil yang lebih maksimal, seperti:

1. Membekali para pengelola BUMDes Karya Mandiri pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi dan laporan keuangan.
2. Melakukan pertemuan secara tatap muka atau luring dengan tujuan untuk pembimbingan keahlian akuntansi topik yang sulit dijelaskan jika melalui daring.
3. Pendampingan yang berkala dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan unit usaha BUMDes Karya Mandiri.

Setelah kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan, diharapkan memiliki beberapa dampak positif kepada pihak pengelola BUMDes, seperti dampak keilmuan, ekonomi, dan sosial. Dampak keilmuan berupa bertambahnya pengetahuan dan wawasan oleh pengelola BUMDes tentang akuntansi, sistem pengendalian internal BUMDes, dan mendeteksi potensi-potensi unit usaha yang dapat dikelola. Sedangkan dampak ekonomi yaitu dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan para pengelola BUMDes Karya Mandiri, maka pengelola dapat dengan maksimal menjalankan unit usahanya dan dapat mendapatkan laba yang maksimal pula sehingga perekonomian baik pengelola maupun masyarakat desa bisa meningkat serta dampak sosial yaitu dengan adanya perkembangan usaha dari BUMDes Karya Mandiri akan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa dan pembangunan Desa Sekapat yang lebih luas dan modernisasi, sehingga masyarakat pun akan sejahtera.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Mandiri, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki sistem pengendalian internal BUMDes dan kemampuan di bidang pencatatan akuntansi. Sehingga pihak pengelola BUMDes Karya Mandiri menginginkan pendampingan lebih lanjut, secara luring atau tatap muka agar dapat pembimbingan dalam membuat sistem pengendalian internal BUMDes dan dalam melakukan pencatatan akuntansi.

Saran

Kegiatan sejenis ini diharapkan dapat dikembangkan dan dilaksanakan terus menerus secara keberlanjutan dan meluas agar lebih banyak lagi BUMDes yang dengan

mudah dapat memiliki pemahaman tentang sistem pengendalian internal BUMDes sehingga akan lebih banyak desa yang bisa lebih sejahtera. Kegiatan ini juga diharapkan mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat terutama lembaga Universitas Mulawarman sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dalam unsur pengabdian kepada masyarakat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Syarifah Hudayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah mengalokasikan anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E, M.Si., Ak., CA., CSRS; Sekretaris Jurusan Akuntansi Ibu Dr. Wulan I. R. Sari, S.E., M.Si.,CSP; Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA., CSRS; dan Ketua Panitia PKM Bapak Dr. Hariman Bone, S.E., M.Sc., Ak., CSRS serta semua rekan Dosen Jurusan Akuntansi. Atas bantuan, dukungan, dan kerja sama dari Bapak/Ibu sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana sesuai yang direncanakan. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada aparat pemerintah Desa Sepakat dan pengelola BUMDes Karya Mandiri selaku mitra PKM atas perkenaanannya mengundang tim PKM untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.
- Yulianti dan Janie, D.N.A. (2019). *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Transparasi dan Akuntabilitas*. Semarang, Indonesia: Tiga Media Pratama.
- Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. B-1285/DINKES/065.11/07/2021 tentang *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Lonjakan Kasus Covid-19 Gelombang Kedua Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara*.

BAB 10

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN BUMDES KARYA MANDIRI, DESA SEPAKAT, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN BUMDES KARYA MANDIRI, DESA SEPAKAT, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhammad Iqbal

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
muhammad.iqbal@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya. Desa memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Risal, dkk. 2020). Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan desa diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 4 pada undang-undang tersebut menyebutkan ada sembilan tujuan pengaturan desa, salah satu diantaranya berbunyi “Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pembangunan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama”. Tujuan inilah yang mendorong dilaksanakannya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia.

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa (PKDSP, 2004). BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi, modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luas, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain bahkan melalui pihak ketiga.

Awal dibentuknya BUMDes ditujukan untuk mendorong dan menampung semua kegiatan peningkatan pendapatan dan sosial masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat serta kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat melalui program yang dirancang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai yang

tertuang dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, pengelolaan BUMDes juga ditujukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kemudian dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran desa. Keberhasilan desa dalam meningkatkan pendapatan desa ditentukan oleh strategi BUMDes dalam mengelola secara optimal aset-aset dan potensi yang dimiliki desa (Hayyuna, 2014). Berdirinya BUMDes diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan yang terjadi di desa dan sebagai media yang mengajarkan kemandirian dan tidak tergantung pada sumber keuangan eksternal lain serta dapat menjadi sarana pembelajaran *enterpreunership* bagi masyarakat.

Pada dasarnya, setiap desa menyimpan berbagai potensi yang jika dikelola dengan baik, akan memberikan kehidupan yang cukup bahkan berlebih kepada masyarakatnya. Selanjutnya, BUMDes dimungkinkan sebagai perusahaan milik pemerintah desa yang pengelolaannya oleh masyarakat setempat, bahkan masyarakat dapat berinvestasi dalam permodalan BUMDes tersebut, di mana tujuan akhirnya kembali lagi pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Harapannya, BUMDes menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) yaitu berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial dan komersial (*commercial institution*) yaitu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar (PKDSP, 2007).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, sumber modal/dana BUMDes selain dari pemerintah/desa juga bersumber dari hibah pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain serta kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. BUMDes memiliki tanggung jawab atas laporan keuangan seluruh usahanya untuk menginformasikan kemasyarakatan serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes, agar diketahui sumber daya apa saja yang sudah dikelola dengan efektif dan efisien. Menurut Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa pelaksana operasional BUMDes wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes. Laporan berkala meliputi laporan per semester dan laporan tahunan yang minimal masing-masing terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), perhitungan laba rugi, serta penjelasannya (catatan atas laporan keuangan).

Laporan keuangan menjadi gambaran penting di dalam melihat posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan

informasi tersebut (SAK EMKM, 2016). Pengelola BUMDes wajib mencatat semua aktivitas usaha yang telah terjadi dan membukukannya ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang tersusun nantinya juga akan digunakan oleh pengelola BUMDes dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Faktanya dalam pengelolaan BUMDes berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan penyusunan laporan keuangan secara baik. Dengan kata lain, laporan keuangan masih sangat sederhana serta belum merujuk kepada standar akuntansi yang jelas. Pembukuan yang dilakukan setiap terjadinya transaksi hanya sebatas mencatat kas masuk dan kas keluar tanpa memperhatikan kaidah akuntansi. Hal tersebut disebabkan karena pengelola BUMDes belum sepenuhnya mengetahui dan memahami proses akuntansi beserta standar akuntansi yang digunakan. Akuntansi pada dasarnya merupakan proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklarifikasian, penggabungan, peringkasan, penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, dan transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (Suwardjono, 2014).

Kendala lain yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menghambat penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDes. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan atau disiplin ilmu yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa atau pengelola BUMDes yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan BUMDes. Kualitas SDM sangat mempengaruhi kemampuan aparatur desa untuk merumuskan kebijakan ekonomi bagi desanya (Kusmayadi, dkk. 2019). Selain tentang kualitas, keterbatasan jumlah (kuantitas) pengelola juga menjadi permasalahan lain. Kondisi tersebut mengharuskan pengelola yang ada mengerjakan semua hal dengan batas otoritas yang minim. Selanjutnya permasalahan sosialisasi tentang BUMDes baik dari segi regulasi, penerapan, serta kewajiban pertanggungjawabannya belum secara rutin dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terutama wilayah terpencil mengenai BUMDes. Akses informasi yang terbatas karena kondisi geografis/keterbatasan lainnya menjadi kendala sehingga berdampak pada minimnya informasi yang diperoleh mengenai BUMDes (Kusmayadi, dkk. 2019).

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

BUMDes Karya Mandiri belum melakukan penyusunan laporan keuangan secara baik atau dengan kata lain bahwa laporan keuangan masih sangat sederhana serta belum merujuk kepada standar akuntansi yang jelas. Apabila ditelisik lebih jauh, akar permasalahan utamanya terletak pada keterbatasan SDM pengelola BUMDes. Keterbatasan SDM ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Keterbatasan dari segi disiplin pengetahuan (kualitas) SDM pengelola BUMDes.

Seluruh pengelola BUMDes Karya Mandiri tidak memiliki latar belakang akuntan atau disiplin ilmu akuntansi. Kondisi tersebut menjadikan pengelola hanya mampu menyusun laporan keuangan dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga, laporan keuangan yang dimiliki BUMDes belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

2. Keterbatasan dari segi jumlah (kuantitas) SDM pengelola BUMDes. Pengelola BUMDes Karya Mandiri hanya berjumlah tiga orang. Kondisi tersebut mengharuskan pengelola bekerja lebih keras untuk menyelesaikan seluruh rancangan dan tahapan kegiatan usaha BUMDes.
3. Keterbatasan/minimnya sosialisasi tentang BUMDes baik dari segi regulasi, penerapan, serta kewajiban pertanggungjawabannya belum secara rutin dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terutama wilayah terpencil mengenai BUMDes.

Solusi yang ditawarkan

Dengan memperhatikan kondisi yang ada, sehingga dianggap perlu melaksanakan kemitraan dengan BUMDes dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa sosialisasi/pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDes. Program ini dapat membantu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada laporan keuangan BUMDes dan memberikan informasi posisi keuangan yang akurat kepada *stakeholders*.

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan PKM bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengelola BUMDes Karya Mandiri dan Aparatur Pemerintah Desa Sepakat tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dimana salah satunya mengatur Pertanggungjawaban BUMDes dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK EMKM dan SAK ETAP) yang mengatur tentang pengertian, fungsi, siklus, jenis, dan prinsip akuntansi serta pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan keuangan unit usaha BUMDes. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memastikan penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDes sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. METODE YANG DIJALANKAN/DIGUNAKAN

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan dua metode yaitu sosialisasi/pelatihan dan pendampingan. Pertama, sosialisasi ini menggunakan metode yang dapat menjamin bahwa peserta dapat mengimplementasi pengetahuannya setelah mengikuti/menghadiri sosialisasi. Adapun metode yang digunakan antara lain:

1. Metode Pemaparan/Ceramah; Metode ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengertian, fungsi, siklus, jenis, prinsip akuntansi serta pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM).
2. Metode Diskusi/Tanya jawab; Metode ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemahaman manajemen keuangan dan penyusunan dokumen laporan keuangan peserta/pengelola BUMDes yang mengikuti kegiatan.
3. Metode Kasus/Contoh; Metode ini memberikan beberapa gambaran kasus/contoh yang berkaitan dengan laporan keuangan organisasi (BUMDes), serta cara penyelesaiannya.

Secara teoritis, kategori penerapan suatu ilmu pengetahuan terbagi menjadi empat, yaitu: (i) Tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki kemauan; (ii) Tidak memiliki pengetahuan namun memiliki kemauan; (iii) Memiliki pengetahuan namun tidak memiliki kemauan; dan (iv) Memiliki pengetahuan dan memiliki kemauan (Idrus dan Syachbrani, 2020). Setelah tahap sosialisasi, peserta diasumsikan “hanya” memenuhi kategori (iii) dan (iv). Berikut metode pendampingan yang akan diterapkan sesuai dengan kategori hasil sosialisasi (Idrus dan Syachbrani, 2020);

1. Partisipatif.

Metode ini untuk mendampingi mereka yang sudah memiliki pengetahuan/kemampuan, namun belum memiliki kemauan untuk menerapkan ilmunya. Metode ini mengharuskan peserta untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan sembari diyakinkan mengenai urgensi hal tersebut untuk dilakukan. Sehingga, peserta akan termotivasi dan menikmati pekerjaannya.

2. Delegatif.

Metode ini tepat bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dan memiliki keinginan untuk menerapkannya. Melalui metode ini, peserta akan disertai penuh tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kapan tepatnya dilaksanakan.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Sebagai bentuk respons atas permasalahan dan keterbatasan yang dialami oleh BUMDes Karya Mandiri, Tim PKM menyampaikan beberapa materi dalam beberapa tahapan serta tambahan saran-saran perbaikan. Tim PKM memulai dengan penjelasan secara singkat tentang pengertian, fungsi, siklus, jenis, prinsip akuntansi serta pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM).

Materi ini dimaksudkan sebagai pemahaman awal dalam menyusun dan memahami

laporan keuangan. Selain itu, diharapkan pula agar pengelola BUMDes menyadari bahwa laporan keuangan merupakan jantung dari setiap entitas serta titik tolak untuk memahami potensi dan kelemahan entitas usaha, sehingga dapat merencanakan hal-hal yang menjadi prioritas. Selanjutnya, Tim PKM menjelaskan dan mendampingi untuk merancang dan menyusun dokumen Pedoman Kebijakan Akuntansi BUMDes. Dari perspektif manajemen organisasi, salah satu masalah yang dihadapi BUMDes Karya Mandiri adalah belum memiliki pedoman kebijakan akuntansi dalam penyelenggaraan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Kebijakan yang disusun terdiri dari karakteristik umum pelaporan keuangan, prinsip dasar pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi penting dan bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes. Dengan adanya dokumen kebijakan akuntansi tersebut, pengelola keuangan memiliki pedoman untuk menggunakan aturan akuntansi, nama/kode akun, bentuk laporan keuangan, dan pengukuran dan penyajian setiap informasi keuangan dari BUMDes Karya Mandiri. Dengan asumsi agar lebih terbiasa dan lebih terlatih dalam mengerjakan secara langsung laporan keuangan BUMDes, Tim PKM menunjukkan beberapa gambaran/contoh kasus yang berkaitan dengan laporan keuangan organisasi khususnya BUMDes beserta cara penyelesaiannya.

Untuk lebih memudahkan dalam menyusun laporan keuangan, Tim PKM juga menunjukkan dan menjelaskan secara singkat prosedur penggunaan aplikasi laporan keuangan BUMDes. Banyak keuntungan yang diperoleh BUMDes apabila menggunakan aplikasi, seperti; 1) Penyusunan laporan menjadi lebih mudah dengan waktu yang singkat. 2) Menghindari terjadinya kesalahan perhitungan; 3) Kesalahan *input* dapat diperbaiki tanpa harus mengulangi dari tahap awal; 4) Pekerjaan menjadi lebih efisien; 5) Proses pengolahan data berjalan otomatis; 6) Menghasilkan laporan yang akurat sehingga keputusan dapat segera diambil dengan tepat; dan 7) Memantau kondisi keuangan secara *real time*.

Setelah tahapan sosialisasi dan pembimbingan, diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengelola BUMDes tentang laporan keuangan sesuai kaidah dan standar akuntansi. Laporan keuangan yang sesuai kaidah dan standar akuntansi sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat atas aktivitas dan hasil kinerja mereka dimana salah satunya dituangkan dalam laporan keuangan. Beberapa manfaat sosialisasi dan pendampingan penyusunan laporan keuangan, antara lain; 1) Pengembangan kemampuan SDM (aparatur desa dan pengelola BUMDes), sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan BUMDes dan aset ekonomi desa; 2) Mengintegrasikan potensi, produk, posisi keuangan sehingga mampu menjaga dan meningkatkan nilai tawar yang baik dalam jaringan pasar; 3) Menambah kepercayaan masyarakat dan mitra (*stakeholders*) terhadap aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam menjalankan program dan visi misi BUMDes.

Oleh karena keterbatasan ruang dan waktu, kegiatan menjadikan materi yang

disampaikan sangat terbatas sehingga pengelola BUMDes dan tim PKM merencanakan pertemuan berikutnya dengan maksud pendalaman materi. Pertemuan direncanakan akan dilaksanakan dalam sistem tatap muka dan dalam beberapa kali pertemuan.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk membantu BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun kebijakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Dasar kegiatan ini adalah permintaan kebutuhan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka memperbaiki penyusunan laporan keuangan dari BUMDes Karya Mandiri. Untuk mencapai tujuan kegiatan, Tim melakukan survei pendahuluan untuk mengumpulkan bahan dan analisis kondisi pelaporan keuangan BUMDes Karya Mandiri. Hasil analisis awal menunjukkan beberapa kelemahan dalam pelaporan keuangan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, kami menetapkan prioritas kegiatan yang segera dilaksanakan yaitu memberikan pemahaman konsep dasar akuntansi, menyusun pedoman kebijakan akuntansi, menjelaskan aplikasi laporan keuangan.

Saran

Mengingat bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ini sangat penting bagi pengelola BUMDes dan aparatur pemerintah desa. Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan lanjutan guna meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes dan mendukung program pemerintah desa agar tercapainya desa mandiri dan maju demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula bagi para pengelola BUMDes untuk meningkatkan kemampuan dalam teknologi pengoperasian komputer demi memudahkan penggunaan aplikasi laporan keuangan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, berupa dukungan moril dan materi. Pertama dan utama penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah mengalokasikan anggaran kegiatan. Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E, M.Si., Ak., CA., CSRS; Sekretaris Jurusan Akuntansi Ibu Dr. Wulan I. R. Sari, S.E., M.Si., CSP;

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA., CSRS; dan Ketua Panitia PKM Bapak Dr. Hariman Bone, S.E., M.Sc., Ak., CSRS serta semua rekan Dosen Jurusan Akuntansi. Atas bantuan, dukungan dan kerja sama dari Bapak/Ibu sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana sesuai yang direncanakan. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Pengelola BUMDes Karya Mandiri dan Aparatur Pemerintah Desa Sepakat selaku mitra PKM atas perkenaanannya mengundang tim PKM untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak/Ibu dengan kebaikan yang lebih serta mengumpulkan kita semua dalam kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2004. Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi.
- _____. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
- Risal, Renny Wulandari dan Jaurino. 2020. *Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2 No. 1 Bulan Juni 2020 halaman 49-57.
- R. Hayyuna. 2014. "Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)". Jurnal Administrasi Publik, vol. 2, no. 1.
- Ririhena, Mersy Yoselin dan Goraph, Frets Alfret. 2020. *Model Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Marahai Pitu*, MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (Vol.1 No.2).
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekrayasan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.

BAB 11

LITERASI MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA

LITERASI MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA

Rusdiah Iskandar & Annisa Abubakar Lahjie

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

rusdiah.iskandar@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam memenuhi tiga kebutuhan dasar dalam sebuah keluarga (primer, sekunder, dan tersier). Jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh satu atau beberapa anggota keluarga bukan menjadi faktor utama keberhasilan dalam manajemen keuangan, namun keterampilan dalam pengelolaan keuangan dalam memanfaatkan uang secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, awal pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020, masyarakat diharuskan melakukan berbagai aktivitas di rumah yang mendorong melakukan pembelian berbagai kebutuhan pokok dalam jumlah besar sebagai persediaan di masa akan datang (*fenomena panic buying*) (BPS Indonesia, 2020). Fenomena *panic buying* diiringi dengan penurunan rata-rata pendapatan masyarakat dimasa pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan keuangan keluarga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Mayoritas kelompok keluarga di Indonesia pada pandemi Covid-19 tahun 2020, khususnya ibu rumah tangga mengalami kesulitan dalam pengaturan keuangan diiringi sumber keuangan yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Manajemen keuangan keluarga merupakan proses pengelolaan keuangan sebuah keluarga dalam mencapai tujuan yang terbagi menjadi tujuan jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) dan jangka panjang (di atas 5 tahun) (Herujito, 2001). Untuk mencapai tujuan keuangan keluarga, setiap keluarga direkomendasikan menerapkan empat aspek manajemen keuangan keluarga yang efektif dan efisien yang berdiri dari: 1) Perencanaan; 2) Alokasi dana; 3) Pelaksanaan; dan 4) Evaluasi. Menerapkan empat aspek manajemen keuangan diharapkan setiap keluarga meningkatkan pemahaman tentang keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga dengan pendekatan *cash flow management*; pentingnya membuat anggaran, alokasi dana, komitmen dalam pelaksanaan dan mengevaluasi atas pengelolaan keuangan rumah tangga; dan termotivasi meningkatkan *cash in* dengan mencari sumber pendapatan tambahan dan menekan *cash out* dengan menekan pengeluaran- pengeluaran yang tidak dibutuhkan.

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Mitra kegiatan pengabdian masyarakat adalah Ikatan Keluarga Iskandar Armain. Semenjak kegiatan pengabdian masyarakat difokuskan untuk meningkatkan pemahaman manajemen keuangan keluarga, aktivitas ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Ikatan Keluarga Iskandar Armain tentang manajemen keuangan keluarga yang efektif dan efisien. Masassya (2004) mengidentifikasi lima faktor kenapa manajemen keuangan keluarga sangat penting untuk dipelajari, yaitu: 1) Uang sebagai pemenuhan kebutuhan sifatnya terbatas; 2) Daya ingat manusia sangat terbatas; 3) Kebutuhan hidup sangat beragam sehingga dibutuhkan skala prioritas. 4) Sarana komunikasi dan materi diskusi (bertengkar) antar anggota keluarga; 4) Mencegah pemborosan untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan.

Solusi Permasalahan

Merujuk uraian sebelumnya, kami mengidentifikasi, tantangan yang dihadapi Ikatan Keluarga Iskandar Armain, yaitu:

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kondisi Langkah-langkah keuangan dengan perbandingan komposisi hutang dan modal atas seluruh aset keluarga;
2. Kesulitan dalam pengelolaan keuangan keluarga secara efektif dan efisien dalam menghadapi fenomena *panic buying* pada pandemi Covid-19; dan
3. Kesulitan dalam mendapatkan akses informasi mengenai investasi dan sumber pendapat tambahan (*property*, portofolio atau investasi lainnya).

Solusi atas tantangan yang dihadapi Ikatan Keluarga Iskandar Armain adalah pemberian pengetahuan dan tip-tip pengelolaan keuangan yang dapat diaplikasikan langsung dalam aktivitas sehari-hari. Secara umum pengabdian ini menjadi bagian kecil dalam langkah memperbaiki pengelolaan keuangan skala rumah tangga/keluarga kecil.

B. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian masyarakat pada Ikatan Keluarga Iskandar Armain diselenggarakan Minggu, 18 Juli 2021 dimulai pada 10.00 s.d 11.30 WITA secara *online* melalui aplikasi Zoom. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi manajemen keuangan keluarga dan acara ditutup dengan tanya jawab seputar pengelolaan keuangan keluarga, asuransi dan skema investasi.

Materi yang disampaikan adalah pengelolaan keuangan keluarga dan tip-tip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Beberapa pokok bahasan yang disampaikan dalam kegiatan adalah:

1. Menekankan pentingnya manajemen keuangan keluarga pada pandemic Covid-19
2. Definisi manajemen keuangan keluarga
3. Tahapan dalam manajemen keuangan keluarga

4. Berbagai skema investasi
5. Sistem dalam pelaksanaan rencana pengeluaran yang telah dialokasikan dana

Para peserta mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya:

1. Bagaimana memulai pengelolaan keuangan dengan menerapkan 4 (empat), namun di waktu bersamaan pengelolaan keuangan telah berjalan apa adanya. Dengan menerapkan jangka pendek (1 minggu) anggaran dan tidak disiplin penerapan controlling dan evaluasi.
2. Bagaimana membedakan skema investasi yang legal dan illegal secara hukum.
3. Bagaimana pengelolaan manajemen keuangan yang efektif di saat memiliki 2 (dua) sumber pendapatan.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Pemberian pengetahuan dan tip-tip pengelolaan keuangan yang dapat diaplikasikan langsung dalam aktivitas sehari-hari meliputi manajemen keuangan keluarga, anggaran keuangan, dan jenis-jenis investasi serta pengelolaan kas.

Manajemen keuangan keluarga adalah “Seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga melalui orang lain untuk mencapai tujuan yang efisien, efektif, dan bermanfaat sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera dan keluarga sakinah” (Hermaliana, 2019). Hermaliana (2019) menekankan bahwa setiap keluarga memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan keuangan dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan untuk seluruh anggota keluarga. Sedangkan Garman dan Fogue (2000), mendefinisikan manajemen keuangan keluarga sebagai serangkaian aktivitas dalam memaksimalkan dalam memperoleh pendapatan dan meminimalisir biaya, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan sehari-hari, pengeluaran rumah tangga, kondisi darurat, dan tabungan maupun kesempatan untuk investasi. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan keluarga adalah mengelola/mengatur keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

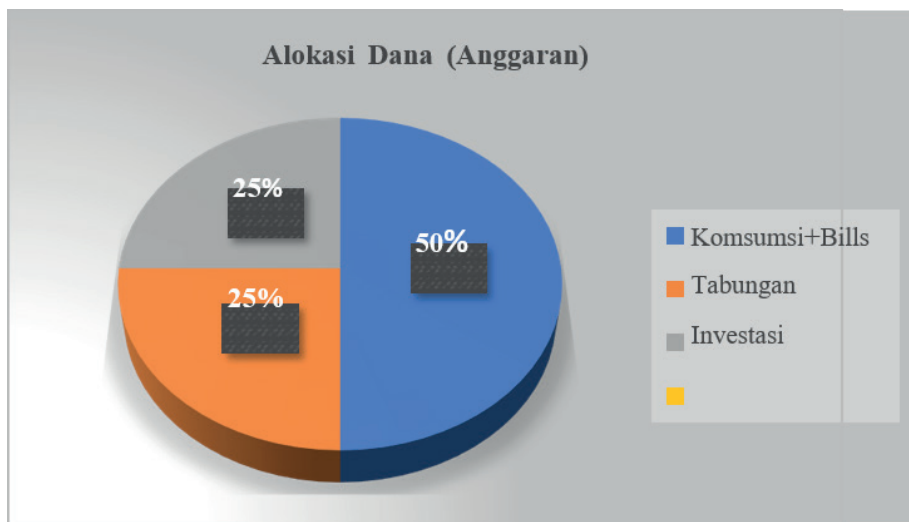
Selanjutnya, menurut Herujito (2001) manajemen keuangan keluarga mencakup empat tahap atau disebut POAC yaitu: 1) Perencanaan (*planning*); 2) Alokasi dana (*organizing*); 3) Pelaksanaan (*actuating*); dan 4) Evaluasi (*controlling*). Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber pendapatan/dana yang terbatas. Namun, masih terdapat banyak keluarga yang mengabaikan tahapan perencanaan karena kurang pemahaman/pengetahuan dan pengalaman. Menurut Masassya (2004, pp.16-17), terdapat lima tahap membuat perencanaan keuangan (*planning*), yaitu:

1. Identifikasi nilai kekayaan bersih yang dimiliki (aset, utang, dan modal);
2. Menentukan tujuan keuangan (jangka pendek, menengah, dan panjang);

3. Mengalokasikan sumber pendapatan dalam empat bagian (konsumsi, pelunasan hutang, menabung, investasi, dan asuransi);
4. Implementasi rencana atas alokasi dana (anggaran) dengan konsisten (disiplin) secara periodik; dan
5. Melakukan evaluasi tingkat kesesuaiannya dan melakukan penyesuaian kembali (fleksibel) untuk membuat anggaran yang ideal dengan kebutuhan dan tujuan keuangan keluarga.

Setelah membuat anggaran keuangan, tahap kedua dari manajemen keuangan keluarga adalah pemanfaatan atau pengalokasian identifikasi sebagai mengimplementasi perencanaan/anggaran yang telah di buat lebih terperinci. Menurut Masassya (2004, pp. 9-10), pengalokasian dana dari penghasilan bulanan di bagi dalam tiga bagian (Gambar 1), yaitu:

1. Anggaran belanja yang termasuk pengeluaran biaya tetap (*fixed cost*) yang tidak bisa di tunda, contoh: angsuran rumah, angsuran kendaraan, *utility bills*, makan, dan minum. Biaya konsumsi ini beragam tetapi lazimnya berkisar 50%.
2. *Saving* atau tabungan, pengalokasian pada tabungan bersifat tabungan tetap dan/atau tabungan untuk kejadian *urgent*/tidak terduga (keperluan kesehatan/dokter, menghadapi musibah). Tabungan lazim berkisar 25 % (25 % tersebut yang di gunakan kejadian *urgent* berkisar antara 10% - 15 %, dan sisanya dialokasikan sebagai tabungan tetap).
3. Alokasi dana sebesar 25% pada skema investasi secara terencana dan disiplin. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih, contoh: emas koin/batangan, reksa dana atau iuran dana pensiun, portofolio saham, *forex*, dan *crypto currency*.



Gambar 1. Alokasi Dana Anggaran (Masassya, 2004, hal. 9-10)

Terdapat kelemahan dalam perencanaan (*planning*) dan alokasi dana (*organizing*) alokasi keuangan keluarga, yaitu:

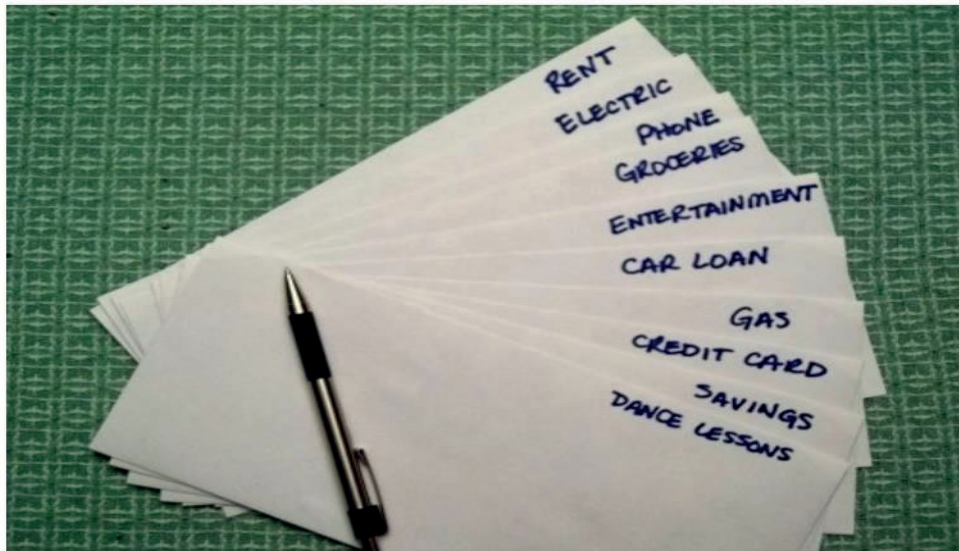
1. *Budget* disusun berdasarkan taksiran (sering kali beda pada saat pelaksanaan-*actuating*)
2. Pembuatan *budget* dan alokasi dana disusun berdasarkan data, informasi dan faktor-faktor baik yang *controllable* maupun yang *uncontrollable* sehingga jika terjadi perubahan-perubahan pada faktor-faktor itu sudah tentu akan mempengaruhi keakuratan *budget* dan alokasi dana.
3. Berhasil tidaknya *budget* tergantung pada manusia-manusia pelaksananya (*budget* beserta alokasi dana yang telah direncanakan tidak akan bisa terealisasi bila para pelakunya tidak mempunyai kecakapan yang memadai, dan kerja sama antara anggota keluarga adalah hal yang mutlak diperlukan, dan kesepakatan dalam penyusunan *budget* dan saling mengingatkan bila terjadi pelanggaran).

Tahap ketiga dalam manajemen keuangan keluarga adalah pelaksanaan (*actuating*) sehari-hari atas pengalokasian pendapatan dan pemakaian uang dalam keluarga. Namun, masing-masing keluarga mempunyai seni pengelolaan tersendiri, hal ini sangat dipengaruhi oleh 1) kebiasaan; 2) pengalaman; dan 3) pengetahuan. Selanjutnya, pengalokasian pada investasi tidak hanya terbatas jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (3-5 tahun), tetapi perlu di alokasikan untuk jangka panjang (> 5 tahun), ketika memasuki masa tidak produktif (≥ 65 tahun) tidak akan terjebak dalam kesulitan keuangan.

Rodhiyah (2012) berpendapat bahwa setiap keluarga/anggota keluarga harus memiliki deposito diri, artinya setiap orang harus menandatangani dirinya, menyiapkan uang pertanggungan atas dirinya. Sehingga ketika individu tersebut tidak berada pada umur produktif atau tidak lagi berpenghasilan, deposito diri inilah yang akan menanggung hidup. Dapat disimpulkan bahwa deposito diri ini merupakan persiapan keuangan untuk jangka panjang yaitu hari tua yang semestinya ada di setiap keluarga.

Pelaksanaan atas pengeluaran yang telah dialokasikan dapat melakukan berbagai sistem, yaitu:

1. Menggunakan sistem amplop (Gambar 2) sebagai tempat untuk menyimpan sementara uang sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah direncanakan. Jadi, uang dibagi-bagi berdasarkan amplop-amplop yang telah ditentukan dan ditulis di bagian luarnya. Hal ini berarti jumlah amplop sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah direncanakan dan dialokasikan sebelumnya.



Gambar 2. Alokasi Dana Sistem Amplop

2. Sistem buku kas yang dimaksud tentu saja tidak seperti yang diajarkan dalam pelajaran akuntansi, tetapi buku kas bisa disederhanakan seperti berikut Gambar 3 di bawah ini.

Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
Gaji bulan Agustus	Rp. 1.000.000,-		
Tambahan uang lembur	Rp. 250.000,-		
Keuntungan dagang baju	Rp. 200.000,-		
Bayar listrik		Rp. 70.000,-	
Bayar telepon		Rp. 120.000,-	
Bayar PAM		Rp. 30.000,-	
SPP 2 anak		Rp. 50.000,-	
			Rp. 1.180.000,-

Gambar 3. Alokasi Dana Sistem Buku Kas

3. Sistem Kas Keluarga adalah sistem pembukuan keuangan keluarga yang menekankan alokasi dana menjadi beberapa kelompok, yaitu: pengeluaran tetap, harian, dan tak terduga. Semua dicatat secara terperinci dalam buku dan setiap jenis pengeluaran dijumlah dan ditotal dengan pengeluaran jenis lain (Gambar 4).

Pengeluaran Tetap	
• Menabung	Rp. 100.000,-
• Listrik	Rp. 70.000,-
• PAM	Rp. 30.000,-
• Telepon	Rp. 120.000,-
• Rumah	Rp. 50.000,-
• Beras dan bumbu	Rp. 100.000,-
<hr/>	
Jumlah pengeluaran tetap	Rp. 470.000,- +
Pengeluaran Harian	
• Belanja harian	Rp. 300.000,-
• Transport	Rp. 60.000,- +
<hr/>	
Jumlah pengeluaran harian	Rp. 360.000,-
Pengeluaran Tak Terduga	
• Pengobatan	Rp. 80.000,-
• Uang jajan anak	Rp. 15.000,-
• Beli buku	Rp. 25.000,- +
<hr/>	
Jumlah pengeluaran tak terduga	Rp. 120.000,-
Jumlah keseluruhan pengeluaran	Rp. 950.000,-

Gambar 4. Alokasi Dana Sistem Kas Keluarga

4. Sistem pembukuan keuangan yang menekankan pada catatan pengeluaran setiap hari. Sistem akan berhasil apabila diterapkan oleh orang yang rajin mencatat apa pun yang dikeluarkan setiap hari tanpa malas untuk menulis, meskipun pengeluaran dalam jumlah kecil. Bagi ibu rumah tangga yang menggunakan sistem ini harus secara sabar dan telaten menulis, sebab ketinggalan satu hari saja akan mengacaukan pembukuan berikutnya, sebab daya ingat orang memang terbatas. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai aplikasi elektronik melalui *handphone* membantu anggota rumah tangga untuk memiliki sistem pembukuan keuangan.

Tahap terakhir dalam manajemen keuangan keluarga adalah evaluasi. Menurut Masassya (2004, hal. 38-39), Evaluasi atau pemeriksaan keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Evaluasi terhadap penerimaan (*cash inflow*) apakah berasal dari hasil investasi atau pendapatan lain.
2. Evaluasi terhadap pengeluaran (*cash out flow*) yang berimplikasi terhadap posisi aset atau hutang. Pertambahan pengeluaran tidak boleh melebihi persentase tertentu dari peningkatan penghasilan.
3. Pertumbuhan aset, aset di sini adalah aset neto yaitu sudah dikurangi dengan seluruh hutang.



Gambar 5. Sistem Pembukuan Keuangan Harian

Untuk menyikapi hutang, Masassya (2004) memberikan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat daftar hutang, apakah hutang masih sehat atau berbahaya, hutang dikatakan masih sehat kalau total hutang kurang dari 30% dari total aset.
2. Cermati penggunaan kartu kredit, penggunaan kartu kredit dengan pembayaran angsuran plus bunga hanya lazim dilakukan jika dalam keadaan “darurat” atau mengalami masalah likuiditas.
3. Cermati kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan kendaraan, berapa tahun lagi untuk menyelesaikan kredit dan berapa bunga yang harus di tanggung.
4. Hutang bukan merupakan hal yang wajar jika pemakaian tidak jelas dan nilainya sudah mendekati jumlah aset yang dimiliki, maka perlu melakukan evaluasi kembali hutangnya.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pengelolaan manajemen keuangan keluarga masa pandemi Covid-19. Secara umum, kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan baik dan mendapat sambutan yang baik dari seluruh peserta.

Saran

Berdasarkan evaluasi kegiatan terdapat hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan

dimasa mendatang:

1. Semenjak pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat relatif singkat (1,5 jam). Kegiatan pengabdian dimasa mendatang disarankan durasi waktu kegiatan lebih Panjang sehingga dapat akomodasi pertanyaan-pertanyaan dari peserta unuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen keuangan keluarga.
2. Masih membutuhkan kegiatan pendampingan di masa mendatang untuk membantu peserta dalam aplikasi langsung pengelolaan keuangan untuk setiap keluarga dengan jumlahaset, hutang, sumber pendapatan, dan pengeluaran yang berbeda.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak dapat terealisasi tanpa campur tangan banyak pihak. Ucapan terima kasih kami berikan kepada Ikatan Keluarga Iskandar Armain Samarinda yang telah memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pemahaman akuntansi dan manajemen keuangan keluarga yang kami miliki; sehingga kegiatan PKM ini dapat diselesaikan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman yang telah memberikan dukungan penuh kegiatan PKM serta pendanaan Tahun Anggaran 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. *Pengeluaran Untuk Komsumsi Penduduk Indonesia: Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2020*. BPS Indonesia, Jakarta
- CEICData, 2021. *Indonesia GDP per Capita the year of 2010-2020*. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/gdp-per-capita>
- CEIC Data, 2021. *Indonesia Household expenditure per Capita the year of 2000-2020*. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/annual-household-expenditure-per-capital>
- Hermaliana, M. 2019. *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Mengokobkan Keutuhan Rumah Tangga. As-Syarri: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1 (01). <http://www.journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/50>
- Herujito, Y. M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, ID: Grasindo
- Garman, E. T. & Fogue, R. 2000. *Personal Finance* (6th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
- Raharjo, IT., Puspitawati, H., Krisnatuti, D. 2015 *Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan dan Kesejahteraan pada Keluarga Muda. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 8 (01). <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/10017>
- Rodhiyah, R., 2012, *Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera, Forum Majalah Pengembangan Ilmu Sosial: Kesejahteraan Sosial*, 40 (01). http://eprints.undip.ac.id/35746/1/manajemen_Keuangan_Keluarga_guna_Menuju_Kel_Sejahtera.pdf
- Salirawati, D. 2019. *Manajemen Keuangan Keluarga*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/das-salirawati-msi-dr/14manajemen-keuangan-keluarga.pdf>
- Masassya, E.G. 2004. *Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga*, Gramedia, Jakarta.

BAB 12

RASIONALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA DUKUNGAN PENDANAAN PENANGANAN COVID-19

RASIONALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA DUKUNGAN PENDANAAN PENANGANAN COVID-19

Yana Ulfah

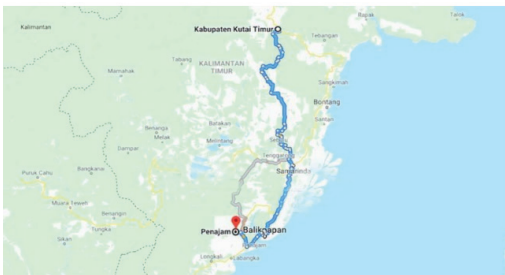
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
yana.ulfah@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh setiap dosen. Adanya pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia berimplikasi pada semua sektor kehidupan termasuk pemerintahan. Dalam upaya untuk menangani dampak pandemi, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 baik melalui APBN maupun APBD. Setiap Kabupaten/Kota wajib mengikuti Surat Edaran Pemerintah sehubungan dengan penanganan Covid-19 termasuk penyesuaian Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa.

Analisis Situasi Mitra

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Penajam, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pada Dinas Kesehatan Kabupaten Panajam Paser Utara sekitar 139 km dari Universitas Mulawarman.



Gambar 1. Peta Kabupaten Penajam Paser Utara



Gambar 2. Lokasi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Perbup No.29 Tahun 2017). Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas melayani bidang kesehatan masyarakat tentu pandemi ini menjadi perhatian khusus. Agar dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat Dinas Kesehatan didukung dengan Anggaran Belanja yang sesuai dengan RPJMD Pemerintah Daerah dan telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi: “Sehubungan dengan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan (*refocusing*) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2021”. Mengacu pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No.903/704/TU-Pim/VI/2021/BKAD perihal Permintaan Rencana Kerja (RKA) Penyesuaian Pengendalian Kegiatan SKPD dan memperhatikan besaran utang 2020 yang harus dibayar maka perlu dilakukan rasionalisasi dan *refocusing* Anggaran Belanja pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan surat edaran pemerintah.

Masalah Pengabdian kepada Masyarakat

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Kesehatan mempunyai utang belanja atas pembangunan puskesmas rawat inap UPT Puskesmas Babulu, bantuan operasional kesehatan tambahan (insentif tenaga medis) Dinas Kesehatan, bantuan operasional kesehatan tambahan (insentif tenaga medis) RSUD yang menjadi beban di tahun 2021. Disamping itu, adanya defisit anggaran pendapatan pada Kabupaten Penajam Paser Utara mengharuskan adanya rasionalisasi anggaran, termasuk pada Dinas Kesehatan. Untuk itulah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan ini dilakukan.

Solusi Yang Ditawarkan

Review atas Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan solusi yang bertujuan untuk menentukan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Dinas Kesehatan, kegiatan lanjutan yang dana berasal dari DAK dan menyesuaikan belanja dengan *output* yang dihasilkan.

Pendampingan rasionalisasi anggaran ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi atas anggaran belanja pada Dinas Kesehatan tahun 2021 dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi Tim TAPD untuk menetapkan kebijakan anggaran pada tahun yang akan datang, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021

dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No.903/704/TU-Pim/VI/2021/BKAD.

Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat

Sasaran kegiatan ini adalah anggaran belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun 2021, dengan memperhatikan *output* dari masing-masing kegiatan maupun sub kegiatan agar terjadi efisiensi anggaran belanja.

B. METODE YANG DIJALANKAN

Cara Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan rasionalisasi dan *refocusing* anggaran ini dilaksanakan secara bersama yang terdiri atas satu orang Dosen dan dua orang Mahasiswa. Tim yang terbentuk menyusun jadwal kegiatan yang akan dilakukan dan selanjutnya mengkomunikasikan jadwal tersebut dengan semua pihak yang terlibat. Adapun tahap-tahap kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada tahap awal, tim mempelajari alur proses bisnis dan perencanaan anggaran yang dilaksanakan di Kabupaten PPU. Selama tahapan ini, tim menggali informasi secara langsung mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan anggaran belanja selama masa pandemi Covid-19 dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.



2. Proses Pengumpulan Data dan Penyusunan Kertas Kerja

Pada tahap ini, tim melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan khususnya data yang berasal dari Dinas Kesehatan. Data yang dikumpulkan antara lain: Surat Edaran Bupati mengenai rasionalisasi belanja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), SP2D. Proses pengumpulan data dan penyusunan kertas kerja dilakukan selama \pm satu minggu.

3. Proses *Review* dan Konfirmasi

Pada tahap ini, tim melakukan *review* terhadap anggaran belanja Dinas Kesehatan 2021 beserta dokumen pendukung lainnya. Temuan yang diperoleh kemudian dituangkan dalam kertas kerja untuk mempermudah proses konfirmasi yang akan dilakukan. Selanjutnya dilaksanakan proses konfirmasi dengan tujuan untuk menggali proses dan kendala yang dihadapi ketika kebijakan *refocusing* diterapkan.

4. Perumusan Rekomendasi

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan disusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut efisiensi anggaran belanja untuk periode berikutnya.

5. Presentasi Pemaparan Hasil *Review* dan Rekomendasi

Presentasi pemaparan hasil *review* dan rekomendasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Hasil *review* dan rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Kesehatan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengambilan kebijakan anggaran periode berikutnya.



C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Keluaran (*output*) yang dicapai:

Setelah melakukan *review* DPA Dinas Kesehatan Tahun 2021, belanja yang tertuang dalam beberapa kegiatan yang direkomendasikan untuk dilakukan rasionalisasi:

- a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen laporan. Perjalanan dinas untuk pengambilan data, perlu direviu kembali karena pengambilan data bisa dilakukan via email atau mekanisme lainnya.
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan dengan *output* berupa laporan keuangan triwulan. Perjalanan dinas untuk pengumpulan data, perlu di-*review* kembali mengingat proses pengumpulan data bisa dilakukan via email atau mekanisme lainnya yang lebih murah.
- c. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Kegiatan Pendataan dapat dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan berulang-ulang untuk efisiensi.
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. *Output* kegiatan ini berupa tersedianya berkas kepegawaian, sementara perjalanan dinas yang dianggarkan dengan tujuannya ke Surabaya untuk mengikuti pelatihan. Tidak sinkron antara *output* dan sub kegiatan.
- e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Perlu dipertimbangkan apakah perlu ada honor pejabat pengadaan bahan habis pakai yang nilainya di bawah satu juta.
- f. Penyediaan peralatan rumah tangga. Mengingat rumah tangga yang dimaksud di sini adalah kantor maka beberapa belanja peralatan rumah tangga perlu dievaluasi

ulang, seperti kompor gas, panci, termos nasi, *magic com*, *centong* sayur.

- g. Penyediaan bahan logistik kantor. Alokasi belanja pada kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, perlu dilakukan evaluasi ulang atau rasionalisasi karena setiap kegiatan sudah ada belanja ATK dan masih terdapat persediaan ATK pada tahun 2020.
- h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Kegiatan perjalanan dinas dilakukan berulang kali untuk proses koordinasi, mengingat pada kondisi pandemi saat ini dan mengacu pada surat edaran yang memotong biaya perjalanan.
- i. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Alokasi belanja ATK untuk setiap kegiatan pemasangan *paving* blok, honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan selain konsultan perencana dan pengawas di setiap pemasangan *paving* blok puskesmas (Gunung Intan, Summersari, dan Penajam), perlu di-*review* ulang tupoksi masing-masing.
- j. Pengadaan obat dan vaksin. Perlu di-*review* kembali perjalanan dinas tujuan ke Surabaya, keterkaitan dengan *output* dan sub kegiatan. Pemusnahan produk farmasi, perlu dievaluasi ulang mengenai mekanisme pengadaan persediaan farmasi sehingga dapat meminimalisir produk kedaluwarsa. Belanja modal terdiri laptop, printer, *stabilizer*, tidak ada hubungannya dengan *output* pengadaan obat dan vaksin.
- k. Pengadaan bahan habis pakai. Adanya honorarium yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan BHP.
- l. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan. Honor narasumber profesional untuk kegiatan pemeliharaan rutin, perlu dikaji keterkaitannya dengan sub kegiatan pemeliharaan rutin. Alokasi belanja perjalanan dinas ke Kalimantan Selatan perlu dilakukan *review* kaitan dengan kegiatan pemeliharaan rutin.
- m. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin. Rujukan persalinan, sebaiknya ke rumah sakit terdekat seperti di Balikpapan. Kualitas pengobatan juga kurang lebih antara Balikpapan dengan Samarinda, perlu dikaji ulang pengalokasian perjalanan dinas untuk rujukan ke Samarinda.
- n. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Alokasi belanja perjalanan dinas ke Samarinda perlu dikaji keterkaitan perjalanan dinas tersebut dengan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar.
- o. Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Kegiatan berupa *workshop* perlu dipertimbangkan pelaksanaannya tanpa harus mengeluarkan belanja sewa gedung, mengingat pesertanya hanya 30 orang.

- p. Ada beberapa kegiatan pokok pikiran (pokir) yang harus diakomodir dalam anggaran belanja sebaiknya lebih memperhatikan kebutuhan dinas kesehatan dan manfaatnya terhadap pelayanan kesehatan.

Dampak Sosial

Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Menurut Todaro dan Smith (2003), persyaratan bagi suatu negara dalam meningkatkan produktivitas masyarakatnya adalah dengan memenuhi salah satu hak dasar mereka, salah satu hak dasar rakyat adalah mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik.

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan adalah upaya untuk memenuhi hak dasar rakyat Indonesia, hak dasar tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya rasionalisasi anggaran belanja diharapkan kegiatan yang dapat direalisasikan adalah kegiatan yang mempunyai kaitan dengan pelayanan Kesehatan baik pembangunan fisik maupun kegiatan non fisik. Kegiatan non fisik seperti sosialisasi penyakit, sosialisasi usia lanjut berdampak pada peningkatan kehidupan sosial bermasyarakat. Begitu pula jika anggaran pembangunan fisik seperti peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas dapat terealisasi maka akan menambah peningkatan kehidupan sosial masyarakat, khususnya hidup sehat.

Dampak Ekonomi

Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan produktivitas sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas produksi. Hasil Penelitian Putri dan Kusreni (2017) menyatakan bahwa tingkat kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di 33 provinsi di Indonesia.

Todaro dan Smith (2003) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Dengan rasionalisasi anggaran belanja diharapkan dapat mengurangi utang pemerintah dan terjadi efisiensi anggaran. Rasionalisasi belanja juga diharapkan agar OPD lebih fokus pada hal yang prioritas. Rasionalisasi atau pengurangan belanja pegawai dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang akhirnya berakibat pada menurunnya kegiatan pada sektor riil. Jika rasionalisasi

pada belanja modal atau belanja pembangunan fisik akan berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja dan akibatnya menurunkan perekonomian.

Tindakan rasionalisasi ini harus dilakukan mengingat kondisi pandemik yang mewajibkan adanya *refocusing* belanja untuk penanganan Covid-19 dan efisiensi belanja untuk membayar hutang dinas kesehatan tahun 2020.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keterbatasan waktu dalam proses pengumpulan data, sehingga beberapa data yang dibutuhkan tidak lengkap atau tidak diperoleh. Hal ini mengakibatkan hasil *review* belum bisa menggambarkan secara komprehensif sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Proses konfirmasi hanya berlangsung dalam satu kali pertemuan dan dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, padahal beberapa jawaban yang diperoleh membutuhkan konfirmasi ulang. Hal ini berdampak pada keterbatasan rekomendasi yang diberikan oleh tim PKM.
- c. Tim tidak melakukan inspeksi secara langsung ke lapangan mengingat keterbatasan waktu, padahal terdapat beberapa kegiatan yang membutuhkan pengamatan secara langsung untuk menentukan apakah kegiatan tersebut perlu dilakukan pada periode tersebut atau dapat ditunda. Hal ini menjadi kendala tersendiri mengingat data anggaran hanya menggambarkan rincian kegiatan dan jumlah pengeluaran biaya, namun tidak bisa menggambarkan bagaimana bentuk dan implementasi kegiatan tersebut, secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap hasil *review* terkait dengan ketepatan *refocusing* anggaran belanja berdasarkan skala prioritas pada Dinas Kesehatan.
- d. Faktor Penghambat rasionalisasi atau *refocusing* ini adalah adanya keinginan OPD yang menghendaki agar semua kegiatan yang tertuang pada DPA dapat terlaksana karena berkaitan dengan kinerja dan penyerapan anggaran.
- e. Jika ditinjau dari dinas kesehatan, kebijakan rasionalisasi berdampak meningkatnya alokasi dana untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga tidak banyak yang bisa dirasionalisasi bahkan bisa menambah anggaran belanja sesuai dengan surat edaran pemerintah.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung selama pelaksanaan kegiatan Pendampingan Rasionalisasi (PKM) adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama kegiatan berlangsung, sehingga proses *review* dapat berjalan dengan lancar meskipun waktu

pelaksanaan kegiatan terbatas.

- b. Dukungan dari dinas kesehatan sehingga pengumpulan data dan proses konfirmasi bisa berjalan dengan lancar.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Kegiatan Pendampingan Rasionalisasi Anggaran Belanja pada Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara Tahun 2021 dapat disimpulkan perlu adanya; 1) Rasionalisasi terhadap Belanja Bahan Habis Pakai yang selalu dianggarkan pada setiap kegiatan ataupun sub kegiatan; 2) Rasionalisasi terhadap belanja perjalanan dinas, memperhatikan keterkaitan perjalanan dengan sub kegiatan dan *output* kegiatan; 3) Rasionalisasi terhadap belanja sewa gedung, kegiatan sosialisasi atau *workshop* yang jumlah pesertanya sedikit sebaiknya dilakukan pada OPD saja, tidak perlu menyewa gedung; 4) Rasionalisasi belanja honorarium kegiatan, seperti narasumber, moderator, harus ada keterkaitan dengan sub kegiatan; 5) Rasionalisasi belanja pemeliharaan, tidak harus pemeliharaan dilakukan setiap bulan; 6) Pisahkan antara kegiatan tupoksi dan kegiatan insidental yang memerlukan kepanitiaan; 7) Rasionalisasi honorarium kepanitiaan, uang lembur dan uang makan lembur; 8) Rasionalisasi anggaran dinas kesehatan tidak hanya berimplikasi pada penundaan atau pembatalan program yang ada pada OPD, namun berimplikasi pada pengurangan anggaran operasionalnya; 9) Kegiatan Pokir (Pokok Pikiran) yang diakomodir dalam anggaran belanja sebaiknya lebih memperhatikan kebutuhan dinas kesehatan dan manfaatnya terhadap pelayanan kesehatan.

Saran

Peningkatan fungsi perencanaan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat. Penerapan tugas dan fungsi OPD dalam penyusunan anggaran belanja agar tercapai efisiensi. Meningkatkan fungsi dan keterlibatan Inspektorat dalam mereview anggaran belanja OPD. Sekretaris Daerah sebagai ketua TAPD harus bertindak tegas dalam penetapan anggaran terutama dalam hal rasionalisasi dan *refocusing*. Perlunya penerapan “*activity-based cost*” dalam menyusun anggaran belanja setiap kegiatan maupun sub kegiatan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Berkenaan dengan kegiatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Pendampingan Rasionalisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2017 Tentang *Susunan Organisasi, tata Kerja, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara*.
- Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 Tentang *Penyesuaian Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021*.
- Surat Edaran No.903/704/TU-Pim/VI/2021/BKAD, *Perihal Permintaan Rencana Kerja (RKA) Penyesuaian Pengendalian Kegiatan SKPD*.
- Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia*. Cetakan Ketiga, Edisi 8, Erlangga: Jakarta.
- Putri, Y.A.K.D & Kusreni, S., 2017, *Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP)* Vol. 17, No 2, November 2017 ISSN (P) 1412-2200, E-ISSN 2548-1851.

BAB 13

FOCUS GROUP DISCUSSION
BINCANG SOLUSI PEMETAAN
SOSIAL POTENSI EKONOMI
PRODUKTIF DI DESA SONGKA
KABUPATEN PASER

***FOCUS GROUP DISCUSSION* BINCANG SOLUSI PEMETAAN SOSIAL POTENSI EKONOMI PRODUKTIF DI DESA SONGKA KABUPATEN PASER**

Mega Norsita

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
mega.norsita@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Songka merupakan salah satu desa yang baru mengalami pemekaran di tahun 2018 dari sebelumnya menyatu dengan Batu Sopang (Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur, 2018). Pemisahan ini memiliki konsekuensi adanya pola administrasi baru termasuk dalam penanganan potensi ekonomi Desa Songka. Di sisi lain, Desa Songka masuk ke dalam wilayah yang terdampak secara geografis dan ekonomis oleh aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tersebut.

Sebagai komitmen perusahaan tambang di sekitar desa, maka akan ada kontribusi program yang dapat diusulkan desa (melalui musyawarah desa) kepada pihak perusahaan. Program yang diusulkan kepada perusahaan, seharusnya merupakan perwujudan dari kepentingan masyarakat desa secara umum (Sutikno, Baihaqi, Yusuf, & Sari, 2018).

Solusi yang ditawarkan

Tim pengabdian pada masyarakat selaku perwakilan dari unsur akademisi, hadir sebagai fasilitator dalam diskusi bersama antara pihak calon pemberi program dan pengusul program tersebut. Langkah yang dapat tempuh ialah mengadakan *Focus Group Discussion* untuk mendengarkan masing-masing pendapat dari berbagai sudut pandang peserta diskusi dan kemudian memberikan simpulan.

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat umum dan unsur perwakilan desa untuk menghadiri *Focus Group Discussion* (FGD) di kantor Desa Songka yang bertujuan memberikan identifikasi potensi ekonomi produktif desa.

B. METODE YANG DIJALANKAN/DIGUNAKAN

Bentuk kegiatan tahap awal, memberikan kuesioner sebagai alat instrumen identifikasi

potensi ekonomi produktif di Desa Songka. Selama proses pengisian tim pelaksana pengabdian pada masyarakat mendampingi dan memberikan petunjuk pengisian kepada warga. Kemudian dilakukan *break* singkat oleh panitia untuk *scamming* hasil instrumen dan kemudian dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FDG) membahas potensi dan solusi berkaitan dengan pengembangan ekonomi produktif di Desa Songka.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan lancar dan menyenangkan yang dilaksanakan secara luring dengan mematuhi standar protokol kesehatan pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 27-28 Mei 2021 pukul 08.00-17.00 WITA di kantor Desa Songka Kabupaten Paser.

Kegiatan diawali dengan perkenalan singkat, pemaparan tujuan diselenggarakannya kegiatan, dan manfaat beserta kontribusi kegiatan bagi kepentingan Desa Songka. Acara berlangsung menyenangkan dan khidmat dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Songka yang turut berperan dalam diskusi grup sebagai pihak yang akan mengusulkan sekaligus menjalankan program dari hasil pemetaan sosial yang telah disepakati bersama.

Dalam *Focus Group Discussion*, terdapat beberapa informasi yang dihasilkan antara lain:

1. Warga desa menyadari diperlukan adanya perubahan pola pikir dari menjadikan sumber penghasilan utama di sektor pertambangan harus mulai bergeser untuk beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan salah satunya ialah ekonomi produktif.
2. Warga mengidentifikasi dari kondisi kesulitan memperoleh air bersih menjadi potensi usaha pengolahan air bersih yang dapat mendatangkan penghasilan bagi kas Desa Songka.
3. Potensi ekonomi produktif di bidang pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan kondisi keterbatasan lahan yang ada, dengan melakukan teknik bercocok tanam hidroponik.
4. Warga Desa Songka golongan pemuda membutuhkan program pelatihan *soft skill* yang memadai sesuai dengan kebutuhan *skill* di masa sekarang yang akan berdampak pada produktivitas pekerjaan.
5. Potensi pengembangan desa wisata di Desa Songka.
6. Masyarakat memerlukan peran akademisi untuk terjun ke lapangan melakukan pendampingan dan pelatihan untuk pengembangan program ekonomi produktif di Desa Songka.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memiliki beberapa dampak, seperti dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dengan diadakan diskusi secara terbuka masyarakat dapat mengeluarkan aspirasi suaranya yang dapat didengar oleh berbagai

elemen termasuk pihak perusahaan, akademisi dan aparaturnya desa setempat. Sedangkan dampak sosial yaitu dengan perkembangan ekonomi produktif di Desa Songka dapat menurunkan jumlah kriminalitas dan kejahatan sosial lainnya seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka dapat disimpulkan bahwa warga desa dapat menemukan potensi usaha ekonomi yang bernilai produktif dari kejadian atau kesulitan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Merubah hambatan sebagai peluang usaha yang dapat memajukan ekonomi Desa Songka secara keseluruhan.

Saran

Kegiatan sejenis ini diharapkan dapat dikembangkan dan dilaksanakan terus menerus secara keberlanjutan dan meluas agar lebih banyak lagi desa yang dapat memetakan potensi ekonomi produktif yang tersimpan di dalam desanya yang dapat mendukung kemajuan ekonomi desa menjadi desa mandiri. Kegiatan ini juga diharapkan mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat terutama lembaga Universitas Mulawarman sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam unsur pengabdian kepada masyarakat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah mengalokasikan anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E, M.Si., Ak., CA., CSRS; Sekretaris Jurusan Akuntansi Ibu Dr. Wulan I. R. Sari, S.E., M.Si., CSP; Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA., CSRS; dan Ketua Panitia PKM Bapak Dr. Hariman Bone, S.E., M.Sc., Ak., CSRS serta semua rekan Dosen Jurusan Akuntansi. Atas bantuan, dukungan dan kerja sama dari Bapak/Ibu sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana sesuai yang direncanakan. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada aparaturnya desa dan masyarakat desa Songka selaku mitra PKM atas perkenannya mengundang tim PKM untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sutikno, S., Baihaqi, I., Yusuf, M., & Sari, N. I. (2018). *Pemetaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Kampus ITS Surabaya*. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0 (1), 23-29. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i1.3339>

BAB 14

OPTIMALISASI POTENSI DAN PENGUATAN SDGs DESA DALAM RANGKA MENUJU DESA SAMURANGAU BERKEHIDUPAN BERKELANJUTAN

OPTIMALISASI POTENSI DAN PENGUATAN SDGs DESA DALAM RANGKA MENUJU DESA SAMURANGAU BERKEHIDUPAN BERKELANJUTAN

Wulan I R Sari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
wulan.sari@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Desa Samurangau memiliki luas total wilayah desa 13.735 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 837 jiwa dan salah satu desa di Kecamatan Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Samurangau memiliki skor indeks desa membangun (IDM) sebagai Desa Maju pada tahun 2020 (Kemendesa, 2021). Status sebagai desa maju menjadi salah satu data dasar penting dalam bagi Pemerintah Desa Samurangau. Status desa maju menjadi dasar acuan *Sustainable development goals* (SDGs) (SDGs) Desa untuk pembangunan desa tahun 2020-2024. Melalui SDGs Desa maka Desa Samurangau melakukan upaya terpadu untuk mewujudkan menjadi salah satu desa yaitu; a) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan; b) Desa ekonomi tumbuh merata; c) Desa peduli kesehatan; d) Desa peduli lingkungan; e) Desa peduli pendidikan; f) Desa ramah perempuan; g) Desa berjejaring; dan h) Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Desa Samurangau termasuk dalam desa yang memiliki aset penghidupan yang Tinggi. Hal ini berdasarkan penilaian aset penghidupan berkelanjutan masyarakat. Adapun kondisi aset penghidupannya dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini.

Penghidupan masyarakat di Desa Samurangau termasuk dalam kategori **tinggi**. Hal ini ditunjang oleh 3 potensi aset sumber daya yang masuk dalam kategori tinggi yaitu sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya alam (*natural capital*), dan sumber daya fisik (*physical*) sedangkan potensi sumber daya sosial (*social capital*) dan sumber daya keuangan (*financial capital*) termasuk dalam kategori cukup. Namun jika dirata-rata, maka kondisi aset penghidupan di Desa Samurangau dinilai tinggi oleh masyarakat karena memiliki peluang aset yang harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi sumber dayanya agar bisa menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi.

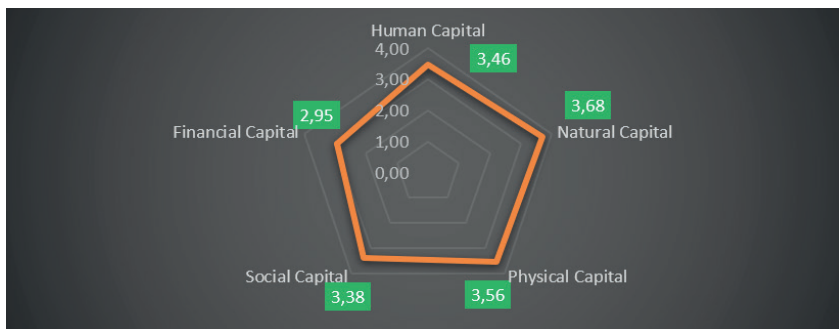
Hasil analisis pola kepemilikan aset sumber daya manusia (*human capital*) menunjukkan bahwa dari enam indikator terdapat dua indikator yang dinilai masyarakat

menggambarkan kondisi yang **tinggi** yaitu aksesibilitas informasi masyarakat (TV, koran, dan internet) dan tingkat ketrampilan masyarakat (inovasi teknologi/tingkat kearifan lokal), sedangkan empat indikator memiliki kondisi yang tinggi yaitu tingkat pendidikan rata-rata masyarakat, aksesibilitas anak usia sekolah terhadap pendidikan, aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar dan ketersediaan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Hal ini berarti bahwa aset penghidupannya sudah dikatakan bagus untuk mendukung penghidupan yang berkelanjutan.

Potensi sumber daya alam (*natural capital*) di Desa Samurangau termasuk dalam kategori **tinggi** dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Hasil analisis pola kepemilikan aset sumber daya alam menunjukkan bahwa lima indikator yang dinilai oleh masyarakat menunjukkan kategori yang tinggi yaitu memiliki potensi sumber daya alam, tingkat kepemilikan lahan atau sumber daya alam, aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini berarti bahwa di Desa Samurangau memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan mampu mendukung kehidupan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Potensi sumber daya fisik (*physical capital*) di Desa Samurangau termasuk dalam kategori **tinggi**. Hal ini menggambarkan bahwa infrastruktur publik menggambarkan kondisi yang sudah cukup bagus. Hasil analisis pola kepemilikan sumber daya fisik/ infrastruktur publik menunjukkan bahwa terdapat dua indikator menunjukkan kondisi yang tinggi yaitu dukungan infrastruktur publik/umum (pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan) dan kesesuaian infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dua indikator menunjukkan kondisi yang cukup yaitu aksesibilitas terhadap infrastruktur komunitas dan pemeliharaan infrastruktur. Agar bisa mendukung kehidupan yang lebih baik lagi, maka di Desa Samurangau memiliki sumber daya fisik yang tinggi dan memiliki peluang bisa ditingkatkan lagi aset yang berada pada desa tersebut agar bisa mendukung kehidupan yang lebih berkelanjutan lagi.

Potensi sumber daya sosial (*social capital*) di Desa Samurangau menunjukkan nilai yang **cukup** berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana terdapat satu indikator yang menunjukkan nilai yang tinggi yaitu adanya toleransi terhadap



Gambar 1. Kondisi Aset Penghidupan Desa Samurangau

pendatang. Hal ini menjadi salah satu modal pendukung kehidupan yang lebih baik. Sedangkan tiga potensi yang lainnya menunjukkan kategori yang cukup yaitu keberadaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di tingkat lokal, kepercayaan antar warga dan akses terhadap lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Kondisi potensi sumber daya sosial yang masuk dalam kategori cukup mendorong adanya peluang pengembangan aset/sumber dayanya agar bisa mendukung kehidupan yang lebih baik lagi.

Sedangkan potensi sumber daya keuangan (*financial aset*) di Desa Samurangau termasuk dalam kategori **cukup**. Hasil analisis pola kepemilikan aset sumber daya finansial menunjukkan bahwa kelima indikator tersebut menunjukkan nilai yang cukup yaitu keberadaan lembaga keuangan(perbankan dan kredit mikro), aksesibilitas rumah tangga miskin (RTM) terhadap keuangan, kemampuan menabung masyarakat, bentuk simpanan selain tabungan di bank (ternak, perhiasan dan lain-lain) dan anggota masyarakat yang bekerja di luar kota (mobilitas eksternal). Sedangkan satu aset berupa kontribusi kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja di luar kota menunjukkan kondisi yang kurang. Hal ini berarti menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan aset finansial masyarakat agar bisa mendukung penghidupan yang berkelanjutan. Namun secara garis besar potensi sumber daya keuangan di Desa Samurangau masuk dalam kategori cukup yang artinya memiliki peluang untuk pengembangan aset potensinya atau masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat mendukung kehidupan yang lebih baik lagi.

Tabel 1. Analisis Aset Penghidupan Masyarakat Desa Samurangau

Sumber daya	Nilai	Kategori	Sasaran
<i>Human Capital</i>	3,46	Tinggi	Peluang dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi
<i>Natural Capital</i>	3,68	Tinggi	Peluang dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi
<i>Physical Capital</i>	3,56	Tinggi	Peluang dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi
<i>Social Capital</i>	3,38	Cukup	Peluang pengembangan aset
<i>Financial Capital</i>	2,95	Cukup	Peluang pengembangan aset
Rata-rata	3,41	Tinggi	

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 1 di atas bahwa kondisi penghidupan aset penghidupan di Desa Samurangau kondisi tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tiga aset sumber daya dalam kategori tinggi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang mana sumber daya tersebut memiliki peluang untuk dipertahankan atau bahkan ditingkat lagi potensi sumber dayanya. Dan dua aset masuk dalam kategori cukup yaitu, sumber daya sosial dan sumber daya keuangan, sehingga secara garis besar sumber daya yang ada di Desa Samurangau masuk dalam kategori tinggi dan mampu mendukung kehidupan yang lebih berkelanjutan.

Sesuai Tabel 1, bahwa nilai kekuatan aset penghidupan/*livelihood asset* keseluruhan pada masyarakat Desa Samurangau yakni sebesar **3,41** dapat dikatakan bahwa nilai

kekuatan aset penghidupan **tinggi**. Artinya lima potensi sumber daya penghidupan masyarakat yakni sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya fisik (*physical capital*), sumber daya sosial (*social capital*) dan sumber daya keuangan (*financial capital*) **tinggi** untuk mendukung penghidupan berkelanjutan masyarakat desa.

Aset penghidupan berkelanjutan yang tinggi Desa Samurangau dan didukung oleh potensi sumber daya alam yang saat ini ada yaitu potensi wisata alam, potensi pertanian dalam arti luas (kelapa sawit, peternakan sapi, tanaman buah semangka, dan sayuran), serta potensi dan bantuan usaha serta pelatihan yang diperlukan saat ini untuk penguatan kehidupan berkelanjutan (Tabel 2).

Potensi dan bantuan usaha	Pelatihan Yang dibutuhkan
Jual beli pupuk, pemberian sarana air bersih, bantuan untuk anak didik, bangunan sarana ibadah masjid	Pelatihan UMKM, pemberdayaan usaha pertanian dan peternakan, Praktik lingkungan bersih tanpa sampah, Ramah lingkungan dengan penghijauan, pelatihan kepada masyarakat untuk daur ulang sampah, Program koperasi simpan pinjam
Usaha warung/ toko sembako	Bantuan pupuk untuk petani sawit
Bantuan pendidikan bagi anak sekolah, manfaat adanya program perusahaan ke lingkungan masyarakat	Pengembangan pertanian dibidang obat-obatan herbal, Usaha perkebunan kelapa sawit, budidaya kolam ikan mas dan nila, peternakan sapi
Kebun sawit	Pelatihan ketrampilan khusus untuk pemasaran, pelatihan untuk pengolahan pupuk organik
Warung makan	Bimbingan usaha perikanan dan bantuan permodalan
Kebun sawit dan karet	Usaha perikanan, peternakan, perkebunan
Perbaikan jalan, beasiswa pendidikan	Bantuan untuk lahan sawit lagi
UMKM	Usaha Kelapa sawit, budidaya ikan nila dan mas, usaha budidaya hortikultura, peternakan sapi
Pemberian honor untuk guru honorer	Perbaikan jalan perkebunan
Bengkel	Peternakan
	Pelatihan UMKM
	Budidaya ikan air tawar (nila dan mas)
	Usaha Kuliner khas Paser
	Usaha warung kelontong
	Pemberian pupuk organik
	Usaha produk anyaman
	Pemeliharaan jalan usaha tani

Tabel 2. Potensi Usaha dan Pelatihan yang Masyarakat Desa Samurangau

Sumber: Data diolah, 2021.

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Sustainable development goals (SDGs) Desa yang saat ini diluncurkan sebagai SDGs Desa merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Agar SDGs Nasional bisa terwujud, kemudian SDGs Nasional diturunkan menjadi SDGs Desa. SDGs Desa diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024. Melalui SDGs Desa, pemerintah desa melakukan upaya terpadu untuk mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan, Desa Ekonomi Tumbuh Merata, Desa Peduli Kesehatan, Desa Peduli Lingkungan, Desa Peduli Pendidikan, Desa Ramah Perempuan, Desa Berjejaring, dan Desa Tanggap Budaya (Permendes No. 13/2020). Untuk mewujudkan SDGs Desa ini, maka tiap desa harus mengembangkan potensi desa dan mengenali tipe desa sesuai SDGs Desa. Masalahnya adalah:

1. Hampir sebagian besar desa belum memahami konsep dan hakikat SDGs Desa,
2. Bagaimana pemerintah desa bisa mewujudkan SDGs Desa sesuai tipe dan potensi desa, dan
3. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk melakukan penguatan SDGs Desa Samurangau.

Solusi yang Ditawarkan

Penguatan SDGs Desa dapat tercapai dengan beberapa langkah yang harus dilakukan bahwa tiap desa harus mengembangkan potensi desa dan mengenali tipe desa sesuai SDGs Desa. Tahap selanjutnya adalah memahami potensi desa dan keterkaitannya dengan tipe SDGs Desa. Pemahaman konsep dan tujuan-tujuan yang relevan dengan tipe SDGs Desa juga perlu disampaikan kepada pemerintah desa dan masyarakat agar tercapai kesepahaman atas program dan kegiatan pembangunan desa. Sehingga, kerja sama dan partisipasi antara pemerintah desa dan masyarakat (*stakeholders*) perlu ditingkatkan dalam semua aspek pembangunan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Kerja sama dan partisipasi ini menjadi kunci utama pencapaian SDGs Desa. Partisipasi masyarakat yang selama ini telah dilibatkan dalam proses pembangunan desa perlu diarahkan pada capaian SDGs Desa. Kualitas kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes) setiap tahun dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus disinkronkan dengan rencana pembangunan menengah desa (RPJMDes).

Singkatnya, untuk mewujudkan SDGs Desa maka Pemerintah Desa Samurangau harus melakukan penyesuaian capaian SDGs Desa sesuai dengan potensi dan tipe tiap desa. SDGs Desa menjadi bagian penting di dalam sistematisasi tahapan penyusunan RPJMDes dan acuan penyusunan rancangan rencana kegiatan pembangunan (RKP) dan APBDes.

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Jurusan Akuntansi Tahun 2021

ini ditujukan kepada aparaturnya pemerintah desa dan masyarakat (*stakeholders*) Desa Samurangau, Kabupaten Paser. Meskipun sasaran utamanya berkaitan dengan dokumen Pemerintah Desa Samurangau tetapi pelibatan masyarakat selaku *stakeholders* sangat penting dalam penguatan SDGs Desa Samurangau. Hal ini karena kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam identifikasi potensi desa perlu dilakukan dan pelibatan secara aktif masyarakat sangat mempengaruhi penguatan capaian SDGs Desa Samurangau. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan SDGs Desa, baik melalui peran serta aktif (partisipasi), pendapat (*sound*) dan pandangannya (*view*) untuk mencapai tujuan pembangunan desa berkelanjutan. Selain itu, pencapaian SDGs Desa bisa menggunakan pendekatan pemetaan potensi desa berbasis aset penghidupan berkelanjutan yang menghubungkan IDM dan SDGs Desa ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran desa.

Untuk itu, integrasi dokumen IDM dan SDGs Desa ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKP) dan anggaran desa (APBDes) harus dilakukan agar memudahkan dalam identifikasi penguatan. Dokumen terkait harus dikumpulkan, dikelompokkan, dan dikembangkan sesuai potensi dan tipe Desa Samurangau. Penguatan dilakukan mulai dari memberikan pemahaman atas konsep, definisi, arah, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) desa. Selanjutnya, adalah melakukan identifikasi, klasifikasi, dan analisis indikator-dimensi indeks desa membangun dari aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Berdasarkan data potensi desa, data tiga aspek dari indeks desa membangun kemudian dikomparasikan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai Permendes No. 13/2020. Tipe SDGs Desa Samurangau akan disesuaikan dengan potensi desa, karakteristik masyarakat Desa Samurangau, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), dan Pemerintah Desa Samurangau.

B. METODE YANG DIJALANKAN/DIGUNAKAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif paradigma konstruktif (*constructivism paradigm*) dengan studi kasus melalui *instrumental case study* (Stake, 1997). Instrumen yang dimaksud adalah tipe desa sesuai *sustainable development goals* (SDGs) Desa, indeks desa membangun (IDM), dan dokumen perencanaan dan anggaran pemerintah desa. Pendekatan ini dipilih karena membutuhkan pemahaman yang lengkap dan detail tentang permasalahan yang diteliti dan melibatkan perangkat Desa Samurangau dan masyarakat (*stakeholders*). Masyarakat (*stakeholders*) terdiri dari badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga musyawarah desa (LMD), tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat/tokoh pendidikan/tokoh perempuan/tokoh pemuda, ketua RT, dan pelaku usaha UMKM di Desa Samurangau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan ini mengimplementasikan konstruksi analisis isi kualitatif (*qualitative*

content analysis) atas tipe desa sesuai SDGs Desa, IDM, dan dokumen perencanaan dan anggaran sebagai hasil sistem dan proses manajemen keberlanjutan yang dilakukan oleh masyarakat (*stakeholders*) dan pemerintah desa. Proses dan aktivitas perencanaan dan anggaran yang didasarkan pada pembangunan berkelanjutan ini dilakukan secara rutin dan berulang-ulang sehingga menjadi budaya dan norma praktik keberlanjutan di masyarakat. Perilaku dan budaya yang dilakukan secara terus-menerus sesuai sistem dan proses pembangunan berkelanjutan mempengaruhi praktik akuntansi manajemen dan pengendalian pembangunan berkelanjutan pemerintah desa yang menjadi inti dari teori institusi.

Sumber data yang digunakan pada kegiatan ini adalah data primer dari wawancara semi terstruktur dan survei lapangan aset penghidupan berkelanjutan. Data sekunder dari dokumen yang digunakan berupa peraturan perundangan yang mendasari SDGs Desa, IDM, dan perencanaan (RPJMDesa), dan anggaran desa (APBDesa). Wawancara semi-terstruktur dan survei aset penghidupan berkelanjutan melibatkan partisipan yang memiliki pengalaman langsung maupun tidak langsung dalam SDGs Desa, IDM, bagian perencanaan, dan anggaran pemerintah Desa Samurangau. Tabel 3 menunjukkan jumlah partisipan terdiri dari perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga musyawarah desa (LMD), tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat/tokoh pendidikan/tokoh perempuan/tokoh pemuda, ketua RT, dan pelaku usaha UMKM dua orang, sehingga jumlah partisipan penelitian ini berjumlah 27 orang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengimplementasikan konstruksi analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) SDGs Desa, IDM, SLA, serta RPJMDes dan APBDes sesuai sistem dan proses pembangunan keberlanjutan.

Tabel 3. Kategori dan Jumlah Partisipan

Kategori Partisipan	Jumlah
Perangkat desa	8
BPD/LMD	6
Tokoh masyarakat/adat	2
Tokoh pendidikan	3
Tokoh perempuan	2
Tokoh pemuda	2
Ketua RT	2
Petani	1
Pelaku UMKM	2
Total Partisipan	27 orang

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Pelaksanaan program dan evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang konsep *Sustainable development goals* (SDGs) Desa;
2. Menjelaskan indeks desa membangun (IDM) meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan;
3. Melakukan identifikasi potensi Desa Samurangau;
4. Melakukan uji coba integrasi potensi desa, IDM, SDGs Desa sesuai tipe Desa Samurangau; dan
5. Evaluasi program dilakukan secara bersama-sama dan selama proses uji coba oleh pemerintah desa dan masyarakat (*stakeholders*).

Sosialisasi konsep *Sustainable development goals* (SDGs) Desa

Sosialisasi konsep SDGs Desa dilakukan dengan memberikan materi berkaitan dengan *Sustainable development goals* (SDGs) Desa. *Sustainable development goals* (SDGs) Desa dikembangkan dari 17 tujuan SDGs United Nations (2016) ditambah satu tujuan baru yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif. Jadi tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa menurut Permendes No. 13/2020 berjumlah 18 tujuan, yaitu :

1. Desa tanpa kemiskinan (T1)
2. Desa tanpa kelaparan (T2)
3. Desa sehat dan sejahtera (T3)
4. Pendidikan desa berkualitas (T4)
5. Desa berkesetaraan gender (T5)
6. Desa layak air bersih dan sanitasi (T6)
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan (T7)
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa (T8)
9. Inovasi dan infrastruktur desa (T9)
10. Desa tanpa kesenjangan (T10)
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan (T11)
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan (T12)
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa (T13)
14. Ekosistem laut desa (T14)
15. Ekosistem daratan desa (T15)
16. Desa damai dan berkeadilan (T16)
17. Kemitraan untuk pembangunan desa (T17)

18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif (T18)

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan SDGs Desa maka tiap desa diidentifikasi tipe desa sesuai SDGs Desa yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan (T1 dan T2), desa ekonomi tumbuh merata (T8, T9, T10, T12), desa peduli kesehatan (T3, T6, T11), desa peduli lingkungan (T7, T13, T14, T15), desa peduli pendidikan (T4), desa ramah perempuan (T5), desa berjejaring (T17), dan desa tanggap budaya (T16, T18). Melalui penentuan tipe desa sesuai SDGs Desa ini maka setiap desa bisa menentukan perencanaan (RPJMDesa, RKP) dan anggaran program dan kegiatan (APBDesa) sesuai tipe desa tersebut. Tujuan dan sasaran pembangunan tipe desa sesuai SDGs Desa ditentukan sesuai indikator capaian kinerja SDGs Desa.

Indikator capaian kinerja SDGs Desa berkaitan dengan 18 tujuan dan sasaran pembangunan tipe desa sesuai SDGs Desa telah diberikan Kemendesa dan contoh pengaplikasian tipe desa sesuai SDGs Desa sudah disesuaikan dengan Permendesa No. 13/2020. Bentuk-bentuk pengaplikasian program dan kegiatan tersebut sudah diuraikan secara mendetail berikut contoh-contohnya. Dokumen perencanaan yaitu RPJMDesa telah memasukkan aspek-aspek keberlanjutan pembangunan jangka menengah pemerintah desa yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Indeks desa membangun (IDM) memiliki tiga indeks komposit sosial (IKS), indeks komposit ekonomi (IKE) dan terdiri dari 6 dimensi, 47 indikator, dan 480 data. Adapun kewenangan terbagi menjadi kewenangan pusat (12 indikator), kewenangan provinsi (16 indikator, kewenangan kabupaten (27 indikator), kewenangan *stakeholders* (27 indikator), dan kewenangan desa (31 indikator) (Gambar 2).

Indeks Desa Membangun (IDM) dan keberlanjutan

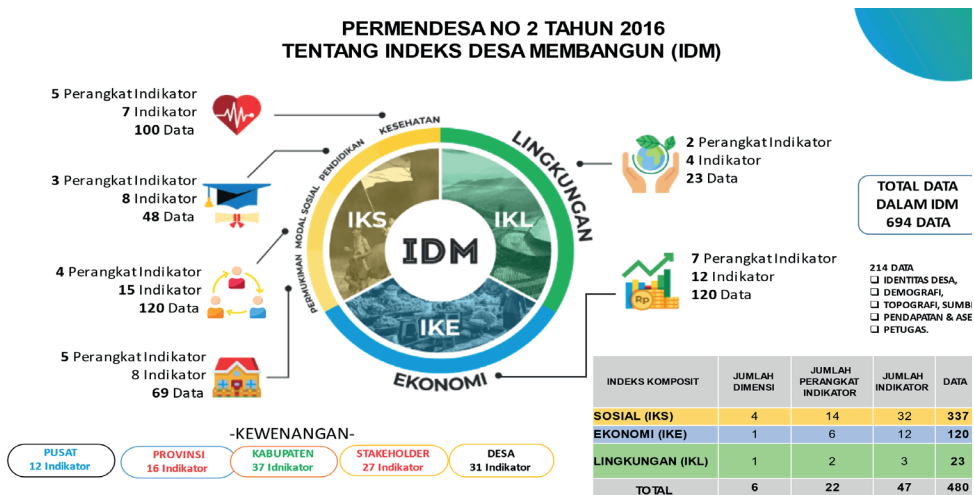
IDM ini berfungsi menjadi indikator kinerja dalam capaian pembangunan SDGs Desa sesuai Permendesa No 13/2020, sehingga indikator ini diperlukan untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran telah tercapai sesuai tipe desa. Berkaitan dengan pemerintah desa maka indikator kinerja ini penting di pengukuran kinerja sektor publik dengan menggunakan indikator *input*, *output*, dan *outcome*. Jika dikaitkan dengan keberlanjutan, maka pengukuran kinerja keberlanjutan sektor publik ini berkaitan dengan perbaikan kinerja organisasi publik, dalam hal ini adalah pemerintah desa. (Adams dkk, 2014). Demikian halnya dengan tipe desa SDGs juga memiliki indikator capaian program dan kegiatan desa sebagai bagian sistem dan proses manajemen dari kegiatan perencanaan dan penganggaran berkelanjutan (Rimmel, 2021). Capaian perbaikan kinerja pemerintah desa tercermin dari status IDM desa yang setiap tahun dilakukan penilaian oleh Kemendesa. Status IDM desa ini selain berkaitan dengan pemerintah desa juga berkaitan dengan indikator modal sosial masyarakat (*stakeholders*). Indikator modal sosial masyarakat (*stakeholders*) ini berkaitan dengan potensi desa yang mendukung

kehidupan berkelanjutan. Potensi desa ini harus digali dan dirumuskan bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat (*stakeholders*) sebagai dasar pertimbangan bagi penentuan tipe SDGs Desa.

Potensi Desa Samurangau

Potensi sumber daya alam (*natural capital*) Desa Samurangau termasuk dalam kategori tinggi dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Hasil analisis pola kepemilikan aset sumber daya alam menunjukkan bahwa lima indikator yang dinilai oleh masyarakat menunjukkan kategori yang tinggi yaitu memiliki potensi sumber daya alam, tingkat kepemilikan lahan atau sumber daya alam, aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini berarti bahwa di Desa Samurangau memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan mampu mendukung kehidupan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Potensi sumber daya fisik (*physical capital*) di Desa Samurangau termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa infrastruktur publik menggambarkan kondisi yang sudah cukup bagus. Hasil analisis pola kepemilikan sumber daya fisik/ infrastruktur publik menunjukkan bahwa terdapat dua indikator menunjukkan kondisi yang tinggi yaitu dukungan infrastruktur publik/umum (pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan) dan kesesuaian infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dua indikator menunjukkan kondisi yang cukup yaitu aksesibilitas terhadap infrastruktur komunitas dan pemeliharaan infrastruktur. Agar bisa mendukung kehidupan yang lebih baik lagi, maka di Desa Samurangau memiliki sumber daya fisik yang tinggi dan memiliki peluang agar bisa ditingkatkan lagi aset yang berada pada desa tersebut agar bisa mendukung kehidupan yang lebih berkelanjutan lagi.



Sumber: Permendes No 2, 2016. Gambar 2. Dimensi, indikator, dan data IDM

Potensi sumber daya sosial (*social capital*) di Desa Samurangau menunjukkan nilai yang cukup berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh partisipan. Terdapat satu indikator yang menunjukkan nilai yang tinggi yaitu adanya toleransi terhadap pendatang. Hal ini menjadi salah satu modal pendukung kehidupan yang lebih baik. Sedangkan tiga potensi yang lainnya menunjukkan kategori yang cukup yaitu keberadaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di tingkat lokal, kepercayaan antar warga dan akses terhadap lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Kondisi potensi sumber daya sosial yang masuk dalam kategori cukup mendorong adanya peluang pengembangan aset/sumber dayanya agar bisa mendukung kehidupan yang lebih baik lagi.

Sedangkan potensi sumber daya keuangan (*financial aset*) di Desa Samurangau termasuk dalam kategori cukup. Hasil analisis pola kepemilikan aset sumber daya finansial menunjukkan bahwa kelima indikator tersebut menunjukkan nilai yang cukup yaitu keberadaan lembaga keuangan (perbankan dan kredit mikro), aksesibilitas rumah tangga miskin (RTM) terhadap keuangan, kemampuan menabung masyarakat, bentuk simpanan selain tabungan di bank (ternak, perhiasan, dan lain-lain) dan anggota masyarakat yang bekerja di luar kota (mobilitas eksternal). Sedangkan, satu aset berupa kontribusi kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja di luar kota menunjukkan kondisi yang kurang. Hal ini berarti menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan aset finansial masyarakat agar bisa mendukung penghidupan yang berkelanjutan. Namun secara garis besar, potensi sumber daya keuangan di Desa Samurangau masuk dalam kategori cukup yang artinya memiliki peluang untuk pengembangan aset potensinya atau masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat mendukung kehidupan yang lebih baik lagi.

Uji Coba Integrasi: RPJMDes, IDM, dan SDGs Desa

Status IDM Desa Samurangau sebagai desa maju tentunya memiliki potensi untuk menjadi desa mandiri di tahun mendatang. Hal ini sangat mungkin bagi Desa Samurangau karena sesuai dengan potensi desa yang diperoleh melalui penilaian aset penghidupan berkelanjutan masuk kategori tinggi, khususnya potensi sumber daya alam. Meskipun aset ekonomi dan indeks komposit ekonomi memiliki nilai terendah dibandingkan aset dan indeks ekonomi lainnya, namun potensi ekonomi yang saat ini dimiliki juga sangat besar dari sumber daya alam. Pemetaan pilihan tipe Desa Samurangau sesuai SDGs Desa dapat dilakukan dengan cara seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks teknik penentuan tipe Desa Samurangau sesuai SDGs Desa

IDM	Aset Penghidupan Berkelanjutan	Tipe Desa Samurangau sesuai SDGs Desa
Indeks komposit sosial (IKS) = 0,7600	<i>Social Capital</i> = 3,38	Desa Tanggap Budaya (T16,T18)
	<i>Human Capital</i> = 3,46	Desa Peduli Pendidikan (T4)
Indeks komposit ekonomi (IKE) = 0,5667	<i>Financial Capital</i> = 2,95	Desa Ekonomi Tumbuh Merata (T8,T9,T10,T12)
	<i>Physical Capital</i> = 3,56	
Indeks komposit lingkungan (IKL) = 0,9333	<i>Natural Capital</i> = 3,68	Desa Peduli Lingkungan (T7,T13,T14,T15)

Sumber: Olah data, 2021.

Berdasarkan Tabel 4 maka tipe Desa Samurangau sesuai SDGs Desa yang bisa dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMDesa/RKP) dan anggaran (APBDes) adalah sebagai desa tanggap budaya, desa peduli pendidikan, desa ekonomi tumbuh merata, dan desa peduli lingkungan. Tipe desa sesuai SDGs Desa ini perlu disepakati bersama antara pemerintah Desa Samurangau dan masyarakat (*stakeholders*), tercermin dalam melakukan proses perencanaan dan anggaran pembangunan berkelanjutan setiap tahunnya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan anggaran selalu didasarkan pada pembangunan berkelanjutan sesuai hasil IDM dan penilaian aset kehidupan berkelanjutan. Beberapa partisipan juga mengharapkan agar pemerintah Desa Samurangau melakukan perencanaan pembangunan berkelanjutan khususnya berkaitan dengan ekonomi kreatif. Hal ini disampaikan oleh Bapak TA1 bahwa “*saat ini banyak warga yang memerlukan pekerjaan dan kepala desa [Samurangau] harus membuat program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat*”. Pendapat ini juga didukung oleh Bapak TA2 bahwa:

Pembangunan Desa Samurangau harus ditingkatkan lagi khususnya ekonomi kreatif karena desa ini memiliki potensi wisata alam yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi warga. Terlebih lagi, nanti jika ibu kota negara [IKN] mulai pindah ke sini maka kita harus memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat...Ada bantuan perusahaan K yang membangun Kawasan Wisata Samurangau. Itu dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan [warga sini] dan sekaligus melestarikan hutan adat (TA2).

Peran tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Samurangau sangat berpengaruh dan aktif dalam membantu program pembangunan desa. Masyarakat dilibatkan dalam

proses perencanaan APBDes setiap tahun, seperti yang disampaikan RT2 bahwa “*kami selalu dilibatkan pada saat penyusunan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh desa*”.

Tahun 2021, indeks komposit ekonomi Desa Samurangau paling rendah tetapi modal fisik (sarana dan prasarana) tinggi sehingga rendahnya modal ekonomi ini bisa juga disebabkan oleh masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau menurun pendapatannya. Pandemi Covid-19 secara tidak langsung berdampak pada pencapaian SDGs (Hörisch, 2021) karena beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan mengalami kendala capaiannya. Seperti yang disampaikan oleh M1 bahwa, “*selama masa pandemi [Covid-19] usaha jualan keripik menurun dan kami kesulitan untuk memasarkan keripik ke tempat lain...yah sekarang libur [tidak berjualan] dulu*”

Evaluasi Program

Desa Samurangau memiliki prioritas pembangunan jangka menengah meliputi pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik dan non-fisik telah dipisahkan sesuai aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Berkaitan dengan keberlanjutan maka dokumen perencanaan sudah disusun strukturnya sesuai peraturan perundang-undangan baik IDM maupun SDGs Desa. Namun, APB Desa Samurangau menunjukkan anggaran yang belum mencerminkan keberlanjutan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang tidak cukup jika sesuai dengan dokumen prioritas pembangunan Desa Samurangau, sesuai yang disampaikan oleh SD1:

Anggaran [APBDesa] setiap tahun tidak mencukupi jika sesuai dengan prioritas pembangunan sesuai RPJMDes itu makanya kami terbantu [tambahan anggaran] dengan program PPM dari perusahaan K. Bahkan untuk infrastruktur jalan, sekolah, dan listrik banyak dibantu mereka. Tapi kayak apa ya ini ada SDGs Desa juga yang kami masih belum paham maksudnya. Maunya sih sesuai SDGs Desa tapi belum cukup saat ini untuk anggarannya. Kalo rutin setiap tahun selalu ada tapi SDGs itu kayak apa kami masih mencari tahu ini (SD1).

Pemerintah Desa Samurangau telah menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes) sesuai struktur telah sesuai kriteria pembangunan berkelanjutan dan IDM namun kualitas ini rincian program dan kegiatan masih belum menunjukkan pembangunan berkelanjutan sesuai tipe desa SDGs Desa. Demikian juga dengan dokumen anggaran (APBDes) yang masih berisi kegiatan dan belum mencantumkan program keberlanjutan. Hal ini bisa dimaklumi karena ada keterbatasan pengetahuan perangkat desa saat ini. Sebaliknya, interaksi untuk kegiatan berkelanjutan dengan pihak lain juga rutin dilakukan setiap tahun bahkan memperoleh tambahan keuangan untuk program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Artinya peluang Desa Samurangau untuk melakukan integrasi program pembangunan berkelanjutan selanjutnya akan sangat baik dilakukan sesuai

sistem dan proses manajemen pembangunan berkelanjutan dengan melakukan sinergi dengan pihak ketiga/perusahaan. Pihak ketiga/perusahaan juga mendapatkan manfaat dari sisi laporan keberlanjutan dengan melakukan integrasi program pengembangan pemberdayaan masyarakat perusahaan ke dalam SDGs Desa.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Sustainable development goals (SDGs) Desa merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. SDGs Desa merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Agar SDGs Nasional bisa terwujud, kemudian SDGs Nasional diturunkan menjadi SDGs Desa. SDGs Desa diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024. Masalahnya, hampir sebagian besar desa belum memahami konsep dan hakikat SDGs Desa dan bagaimana pemerintah desa bisa mewujudkan SDGs Desa sesuai tipe desa.

Melalui SDGs Desa, pemerintah desa melakukan upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya (Permendes No. 13, 2020). Untuk mewujudkan SDGs Desa ini maka tiap desa harus mengembangkan potensi desa dan mengenali tipe desa sesuai SDGs Desa melalui kerja sama dan partisipasi antara pemerintah desa dan masyarakat (*stakeholders*). Kerja sama dan partisipasi ini menjadi kunci utama pencapaian SDGs Desa. Partisipasi masyarakat yang selama ini telah dilibatkan dalam proses pembangunan desa berkaitan dengan musyawarah rencana pembangunan desa (*musrembangdes*) setiap tahun dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk mewujudkan SDGs Desa maka Pemerintah Desa Samurangau harus melakukan penyesuaian capaian SDGs Desa dengan potensi dan tipe tiap desa. SDGs Desa menjadi menjadi bagian penting di dalam sistematisasi tahapan penyusunan RPJMDes dan acuan penyusunan rancangan rencana kegiatan pembangunan (RKP) dan APBDes.

Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Samurangau, Kecamatan Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Hasil uji coba integrasi potensi desa, IDM, SDGs Desa, dan dokumen perencanaan desa menunjukkan beberapa tipe desa yang bisa dipilih. Untuk lebih fokus pada capaian SDGs Desa sebaiknya ditentukan satu tipe desa yang memiliki menunjukkan kekuatan terbesar Desa Samurangau dibandingkan semua pilihan tipe desa.

SDGs Desa yang nantinya dipilih harus mencerminkan potensi desa, keinginan masyarakat, dan tujuan pembangunan Desa Samurangau. Untuk memastikan bahwa tipe SDGs Desa Samurangau bisa diterima oleh masyarakat (*stakeholders*) dan bisa dijalankan oleh Pemerintah Desa Samurangau maka perlu koordinasi dan kerja sama dengan pihak kecamatan dan kabupaten. Koordinasi dengan pihak dan lembaga terkait perlu penguatan dan dukungan agar secara formal sehingga bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Samurangau. Integrasi SDGs Desa dalam dokumen RPJMDes, RKP, dan APBDDes perlu penguatan secara administrasi dan keuangan agar bisa diimplementasikan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman (FEB Unmul) yang membiayai PKM ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada mahasiswa pendamping kegiatan PKM, Kepala Desa Samurangau dan perangkatnya, serta masyarakat yang terlibat dalam membantu melaksanakan kegiatan PKM ini. Akhir kata, semoga pengabdian kepada masyarakat ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, CA. Muir, S. dan Hoque, Z. 2014. Measurement of sustainability performance in the public sector. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* vol. 5 no. 1, pp. 46-67.
- Hörisch, J. 2021. The relation of COVID-19 to the UN sustainable development goals: implications for sustainability accounting, management and policy research. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, vol. 12, no. 5, pp. 877-888
- Lembaran Negara. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 tentang *Indeks Desa Membangun*. Jakarta.
- Lembaran Negara. 2017. Peraturan Presiden No. 59 tentang *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta.
- Lembaran Negara. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta.
- Lembaran Negara. 2021. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan No. 398.4.1 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 30 Tahun 2016 tentang *Status Kemajuan dan Kemandirian Desa*. Jakarta.
- Rimmel, G. 2021. Sustainability management system and processes in Rimmel, G. *Accounting for Sustainability*. Routledge, New York.
- Stake, RE 1995, *The art of case study research*, Sage Publication, California.
- United Nations. 2016. *The Sustainable Development Goals Report*, United Nations: New York.

BAB 15

PENYUSUNAN KELAYAKAN BISNIS USAHA BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PENYUSUNAN KELAYAKAN BISNIS USAHA BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Irwansyah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
irwansyah@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Sedangkan Unit Usaha BUMDes adalah badan usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes.

Analisis Situasi Mitra

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kelanjutan dari Kabupaten Kutai sebelum terjadi pemekaran wilayah pada tahun 1999. Wilayah Kabupaten Kutai sendiri, termasuk Balikpapan, Bontang dan Samarinda, sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota Kutai Kartanegara berada di Kecamatan Tenggarong, yang berbatasan dengan Kota Samarinda. Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi dalam 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja,



Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan perekonomian desa di Kabupaten Kutai Kartanegara maka diperlukan BUMDes, agar BUMDes ini berjalan efektif dalam pengembangan usahanya di perlukan kajian kelayakan usaha. Hasil dari kegiatan kajian kelayakan usaha sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan.

Solusi yang Ditawarkan

Perlunya penyusunan kelayakan bisnis usaha BUMDes. Kajian Kelayakan Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggunakan cara yang tepat akan memberikan kemanfaatan, meliputi:

1. Terpilihnya jenis usaha yang dapat menghasilkan kemanfaatan paling besar atau paling layak untuk dilaksanakan.
2. Dapat memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian.
3. Tersedianya data dan informasi tentang kelayakan usaha mempermudah penyusunan perencanaan usaha (*business plan*).
4. Meningkatnya kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional dan modern.
5. Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha. Misalnya, warga desa atau lembaga keuangan (bank) tertarik menanamkan modal atau meminjamkan uang untuk mendukung pengembangan usaha yang dilakukan BUMDes

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyusunan kajian kelayakan usaha dapat memberikan manfaat untuk pengembangan BUMDes dimasa yang akan datang. Menurut Hastowiyono dan Suharyanto (2014) tujuan kajian kelayakan usaha adalah

1. Memperhitungkan keadaan internal desa (potensi dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal desa (peluang dan ancaman pengembangan usaha)
2. Memanfaatkan gagasan ekonomi
3. Merencanakan sumber daya manusia
4. Merancang organisasi unit usaha
5. Memperhitungkan peluang dan risiko usaha
6. Menentukan jenis usaha yang menguntungkan

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara *offline* dengan cara pemberian pelatihan kepada pengelola BUMDes Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 17 November 2021.

C. PELAKSANAAN PROGRAM dan EVALUASI

Menurut Hastowiyono dan Suharyanto (2014) bahwa langkah-langkah penyusunan kelayakan usaha adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Kelayakan Usaha (TPKU). Pembentukan TPKU sebaiknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. TPKU sebaiknya terdiri atas kepala desa dan warga desa yang cukup berpendidikan, mengenal dengan baik keadaan desa, dan memiliki komitmen (rasa tanggung jawab) untuk memajukan desanya atau yang sering dikenal sebagai kader-kader penggerak desa. TPKU ini lebih diutamakan bagi desa yang belum terbentuk kelembagaan BUMDes. Bagi desa yang telah membentuk kelembagaan BUMDes, penyusunan kelayakan usaha dapat dilakukan oleh Pengurus dan Pengelola Unit Usaha BUMDes.
2. Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan/didayagunakan melalui pengelolaan usaha/bisnis. Kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh TPKU. Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi (mengenal) dan menginventarisasi (mencatat) potensi yang dimiliki desa. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengenali potensi desa adalah dengan pengamatan langsung terhadap keadaan desa dan menjangkau informasi dari warga desa.
3. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa maupun masyarakat luas (masyarakat luar desa). Kegiatan ini dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada warga desa tentang jenis barang atau jasa yang mereka harapkan dapat dilayani melalui BUMDes.
4. Menggagas bersama warga desa untuk menentukan pilihan-pilihan jenis usaha yang memungkinkan untuk dilakukan. Pada tahap ini TPKU terlebih dahulu telah menyusun rancangan alternatif jenis usaha beserta hasil kajian aspek-aspek kelayakan usaha dan kemungkinan pengembangannya. Rancangan alternatif usaha beserta kajian kelayakan usaha kemudian ditawarkan kepada warga desa untuk dibahas bersama melalui forum musyawarah desa.
5. Menggalang kesepakatan warga untuk menentukan unit usaha ekonomi desa yang akan diwadahi BUMDes. Kesepakatan bersama warga desa sangat diperlukan untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan dan mengembangkan suatu unit usaha BUMDes. Ketika warga desa menyepakati pendirian unit usaha BUMDes, maka tentunya mereka merasa ikut memiliki dan bertanggungjawab atas keberlangsungan usaha. Kesepakatan mendirikan unit usaha BUMDes bersama warga desa hendaknya dilakukan melalui forum musyawarah desa.

Aspek-Aspek Kelayakan Usaha

Beberapa aspek-aspek kelayakan usaha yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kelayakan usaha BUMDes di Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan usaha. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni produk, harga, promosi dan tempat.

a. Harga

Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan.

b. Produk

Sebelum unit usaha BUMDes memproduksi barang atau jasa, harus diketahui terlebih dahulu jenis produk (barang/jasa) apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Pastikan pula bahwa masyarakat atau calon konsumen akan terus-menerus membutuhkan produk tersebut dalam jangka waktu yang lama. Kegiatan usaha BUMDes dalam menghasilkan produk sudah barang tentu harus mengeluarkan sejumlah biaya dan mengharapkan bagian keuntungan (margin laba) dari produk yang dijual kepada konsumen. Di sisi lain, konsumen bersedia untuk membeli barang/jasa jika harga yang ditawarkan unit usaha BUMDes dapat mereka terima dan sesuai dengan kualitas produk yang dibeli.

c. Promosi

Promosi bertujuan untuk menginformasikan ke *market* atau konsumen mengenai produk atau bisnis BUMDes. Promosi dapat berupa iklan, *public relations*, publikasi (media sosial dan media cetak), dan promosi penjualan

d. Tempat

Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk yang dihasilkan BUMDes.

2. Aspek Teknis dan Teknologi

Kajian terhadap aspek teknis dan teknologi merupakan hal penting untuk dilakukan dalam penyusunan kelayakan usaha. Kajian pada aspek ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara teknis suatu unit usaha BUMDes di Kabupaten

Kutai Kartanegara dapat dioperasikan (dijalankan) dan apakah teknologi yang diperlukan tersedia. Ada beberapa unsur pokok kelayakan usaha yang dinilai dari aspek teknis dan teknologi, yaitu:

a. Perencanaan Produk

Pastikan bahwa Produk yang dihasilkan sesuai kebutuhan konsumen.

b. Kualitas produk

Produk yang akan ditawarkan unit usaha BUMDes adalah produk yang memiliki keunggulan.

c. Persediaan Bahan Baku

Persediaan bahan baku digunakan untuk menjaga keberlangsungan proses produksi dan mengantisipasi permintaan konsumen yang tiba-tiba meningkat. Persediaan bahan baku yang tidak lancar akan mengganggu proses produksi. Jumlah persediaan bahan baku hendaknya sesuai dengan kebutuhan produksi.

d. Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi berkaitan dengan kemampuan unit produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dalam waktu tertentu.

e. Pemilihan Teknologi

Teknologi untuk memproduksi barang maupun jasa berkembang terus sesuai dengan kemajuan zaman. Penggunaan teknologi yang canggih belum tentu menguntungkan jika digunakan dalam proses produksi yang akan dijalankan. Oleh karena itu, untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan.

f. Lokasi Usaha

Dalam pemilihan lokasi usaha mempertimbangkan pemasaran produk, biaya pengangkutan, dan persediaan bahan baku. Faktor lokasi harus diperhitungkan dan dipertimbangkan secara tepat dan benar, baik dari segi ekonomisnya maupun dari segi teknis serta kemungkinan pengembangan usaha di masa datang.

3. Aspek Manajemen

Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan baik itu pembangunan maupun pengembangan. Aspek manajemen untuk membangun usaha didasarkan pada pendekatan fungsi manajemen, meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Tujuan kajian kelayakan usaha pada aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah pembentukan dan

pelaksanaan usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan.

4. Aspek Keuangan

Kajian aspek keuangan dimaksudkan untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah usaha akan dapat berlanjut. Tujuan menganalisis aspek keuangan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas dari rencana usaha, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya suatu unit usaha BUMDes dijalankan. Aspek keuangan yang perlu dikaji meliputi: 1) kebutuhan dana serta sumbernya, 2) aliran kas, 3) perkiraan laba-rugi, dan 4) penilaian investasi.

5. Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Lingkungan

a. Aspek Ekonomi

Kegiatan Usaha BUMDes harus mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong perekonomian desa.

b. Aspek Sosial Budaya

Kegiatan usaha BUMDes di Kabupaten Kutai Kartanegara harus sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Kegiatan usaha yang akan dilaksanakan BUMDes jangan sampai menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat.

c. Aspek Politik

Usahakan unit kegiatan usaha BUMDes mendapatkan dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan desa seperti Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Aspek Lingkungan Usaha

Beberapa pertimbangan dalam aspek lingkungan usaha, yaitu:

- Pilihlah jenis kegiatan usaha yang tidak menyaingi dan mematikan usaha yang sudah dijalankan oleh warga masyarakat setempat.
- Perhitungkan secara cermat kondisi persaingan usaha antar BUMDes dan Perusahaan lainnya serta kemampuan BUMDes untuk menghadapi persaingan.

e. Aspek Lingkungan Hidup

Dalam merencanakan usaha yang akan dijalankan harus memperhitungkan dampak lingkungan. Kegiatan usaha BUMDes jangan sampai menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan hidup. Terutama apabila kegiatan

usahanya itu memproduksi barang yang menimbulkan limbah,

f. Aspek Hukum

Beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam menyusun studi kelayakan yaitu:

- Bentuk badan usaha dan perizinan
- Kesesuaian Usaha BUMDes dengan Perencanaan Pembangunan Desa
- Status kepemilikan usaha dan lahan.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Untuk melakukan kajian kelayakan usaha Badan Usaha Milik Desa diperlukan pengetahuan terkait beberapa disiplin ilmu seperti aspek pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek ekonomi, sosial budaya, aspek lingkungan, dan aspek hukum.

Saran

Penyusunan kelayakan usaha yang baik belum menjamin keberhasilan kegiatan usaha. Keberhasilan kegiatan usaha harus didukung komitmen yang kuat dari berbagai *stakeholder*, integritas dan komitmen pemimpin desa, pengurus dan pengelola BUMDes.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Berkenaan dengan kegiatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hastowiyono dan Suharyanto 2014, *Seri Buku Pintar BUMDes: Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUMDes*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.

Kasmir dan Jakfa. 2020. *Studi Kelayakan Bisnis*. Kencana Media Prenada Grup. Jakarta.

BAB 16

EDUKASI MENYUSUN ANGGARAN KEUANGAN KELUARGA DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KOTA SAMARINDA

EDUKASI MENYUSUN ANGGARAN KEUANGAN KELUARGA di KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KOTA SAMARINDA

Salmah Pattisahusiwa

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
salmah.pattisahusiwa@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Kota Samarinda atau biasa dikenal dengan Kota Tepian adalah salah satu dari 10 Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Timur. Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi memiliki luas wilayah sebesar 718,00 Km², dengan jumlah penduduk 858.080 jiwa pada tahun 2018. Kota Samarinda terbagi menjadi 10 Kecamatan, dan 59 kelurahan. Salah satu kelurahan di Samarinda yang digunakan sebagai tempat Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun 2021 adalah Kelurahan Sempaja Timur.

Kelurahan Sempaja Timur merupakan salah satu kelurahan yang dibentuk pada Tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemekaran Kelurahan dalam Wilayah Kota Samarinda. Kelurahan Sempaja Timur merupakan pemekaran dari Kelurahan Sempaja Selatan yang saat ini terbagi menjadi tiga wilayah kelurahan. Kelurahan Sempaja Timur memiliki 50 (lima puluh) wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan populasi penduduk ± 23.000 jiwa. Perumahan Bumi Sempaja City termasuk salah satu perumahan (hunian keluarga) berlokasi di Kelurahan Sempaja Timur, dimana Rukun Tetangga terbagi menjadi dua yaitu RT.001 dan RT.002. Kehidupan warga Perumahan Bumi Sempaja terutama dalam hal kehidupan ekonominya sebagian besar tergolong menengah atas.

Namun, sebagian besar ibu rumah tangga belum memikirkan pengelolaan dan perencanaan keuangan jangka panjang. Jika sudah ada uang di tangan yang diberikan oleh suaminya dari hasil pekerjaan atau hasil bisnis, mereka hanya berpikir bagaimana uang yang sudah mereka peroleh tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari saja. Adanya kecenderungan menggunakan uang untuk mengikuti keinginan. Apalagi di masa sulit Covid-19 segala kebutuhan ekonomi rumah tangga terjadi fluktuasi harga pada kebutuhan pokok, sehingga memerlukan perencanaan pengelolaan anggaran rumah tangga dengan baik.

Pengelolaan keuangan keluarga menjadi salah satu aspek penting bagi kebahagiaan dan

keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan keluarga bisa terganggu bila istri sebagai pengelola keuangan rumah tangga tidak menjalankan fungsi pengelolaan dengan baik. Istri sebagai ibu rumah tangga mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dalam keluarga. Menurut Budisantoso, Indrasto & Gunanto (2010), “Mengelola keuangan pribadi dan keluarga adalah suatu kegiatan yang gampang-gampang susah”. Orang bijak berkata mengelola pengeluaran terkadang lebih sulit daripada menghasilkan uang itu sendiri. Seorang ibu rumah tangga harus cermat dan bijaksana dalam mengatur keuangan karena menyangkut masalah uang.

Menurut Senduk (2009:4), ada beberapa alasan kenapa keluarga memerlukan perencanaan keuangan yakni:

1. Adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai;
2. Tingginya biaya hidup saat ini;
3. Naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun;
4. Keadaan perekonomian tidak akan selalu baik;
5. Fisik manusia tidak akan selalu sehat; dan
6. Banyaknya alternatif produk keuangan.

Menurut Senduk (2009: 35), setiap keluarga memiliki cara yang berbeda dalam mengelola keuangan keluarga. Ada suami yang menyetorkan seluruh penghasilan kepada istri, selanjutnya istri bertanggung jawab atas pengelolaan uang itu. Ada juga keluarga yang suami maupun istri sama-sama bekerja, dan keduanya menyimpan penghasilan sendiri-sendiri. Segala kebutuhan keluarga dibiayai suami, tetapi ada juga suami istri yang sama-sama menanggung pengeluaran keluarga, 50%-50%.

Berdasarkan situasi dan kondisi ketidakpastian inilah akhirnya kami dari tim pengabdian kepada masyarakat dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, ingin memberikan penyuluhan dan mengedukasi ibu-ibu rumah tangga khususnya kelompok ibu-ibu Dasawisma Perumahan Bumi Sempaja Blok H tentang pentingnya edukasi penyusunan dan mengelola anggaran keuangan keluarga karena ibu-ibu rumah tangga adalah pihak yang paling berperan penting di dalam membina keluarga.

Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada tanggal 31 Mei 2021 tim pengusul PKM melakukan survei dan wawancara dengan ibu-ibu Dasawisma Blok H. Berdasarkan keterangannya, permasalahan umum yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Ibu rumah tangga khususnya ibu-ibu Dasawisma Blok H tidak membiasakan diri dengan melakukan pencatatan sumber pendapatan baik yang rutin maupun yang

tidak rutin setiap periodenya. Sumber pendapatan tetap biasanya berasal dari gaji dan bonus. Pencatatan sumber pendapatan ini sangat penting dilakukan karena sebagai dasar di dalam membuat anggaran belanja rumah tangga.

- b. Ibu rumah tangga khususnya ibu-ibu Dasawisma Blok H juga tidak membuat anggaran belanja dan mengelompokkan pengeluaran keluarga yang terjadi setiap harinya baik yang rutin maupun yang non rutin. Sehingga segala sesuatu pengeluaran dan pembelanjaan dilakukan berdasarkan kebiasaan saja. Parahnya lagi, terkadang sering sekali pengeluaran rumah tangga keluarga lebih besar dari pada pendapatan yang diperoleh. Mereka menganggap bahwa pencatatan pengeluaran itu tidak terlalu penting untuk dilakukan.
- c. Sebagian besar ibu rumah tangga khususnya ibu-ibu Dasa Wisma Blok H masih sedikit pengetahuan tentang penyusunan anggaran keuangan keluarga dan mengelola anggaran keuangan keluarga. Masih tergantung pada kebutuhan jangka pendek, kurang mengetahui cara memulai dan Pemilihan Usaha/Bisnis keluarga yang tepat saat pandemi Covid-19 kepada ibu-ibu Dasawisma Blok H, Perumahan Bumi Sempaja.

Solusi yang ditawarkan

Solusi dan tindaklanjut terhadap adanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan pada ibu-ibu kelompok Dasawisma adalah dengan memberikan materi tentang penyusunan anggaran keuangan keluarga menggunakan materi yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang disampaikan dalam beberapa cara/tahap seperti memberikan ceramah dan diskusi, tutorial/praktik, dan evaluasi.

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan pembelajaran dan pembimbingan cara menyusun anggaran keuangan keluarga (Rumah Tangga), khususnya pada kelompok ibu-ibu Dasawisma Perumahan Bumi Sempaja Blok H. Kegiatan dilaksanakan pada salah satu rumah dari kelompok ibu-ibu Dasawisma Blok H yang berjumlah 25 orang.

B. METODE YANG DIJALANKAN/DIGUNAKAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, tutorial, dan evaluasi praktik yang dilakukan oleh ibu-ibu peserta dengan rincian sebagai berikut:

1. Metode ceramah, menggunakan teknik presentasi materi dengan *powerpoint*, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Metode ini dilakukan secara langsung tatap muka (luring) namun dengan menerapkan protokol kesehatan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung.

2. Metode tutorial yaitu proses pembuatan anggaran pendapatan dan anggaran belanja rumah tangga keluarga dimulai dari pencatatan sumber pendapatan tetap dan tidak tetap. Para peserta khususnya ibu-ibu kelompok Dasawisma akan dibimbing secara manual membuat anggaran belanja rumah tangga keluarga baik yang rutin maupun yang non rutin dengan rencana yang diinginkan. Setelah itu barulah menyusun biaya-biaya yang bersifat variabel seperti biaya makan, listrik, air PDAM, arisan, dan lain-lain.
3. Metode evaluasi, pada tahap ini ibu-ibu kelompok Dasawisma akan diarahkan untuk mempraktikkan proses pembuatan dan penyusunan anggaran keuangan keluarga (rumah tangga) baik yang rutin maupun yang tidak rutin dalam satu periode sesuai dengan yang telah diajarkan oleh para tim dosen pengabdian. Pendampingan nantinya akan melihat dan mengukur sejauh mana para Ibu-Ibu kelompok Dasawisma dapat membuat dan merinci anggaran pendapatan dan anggaran belanja kemudian melaporkan hasil evaluasi kepada tim dosen pengabdian kepada masyarakat.

Data Dasar	Masalah	Tahapan Kegiatan	Solusi yang Efektif
<p>Cara mendapatkan data dasar:</p> <p>Melihat bahan yang disediakan oleh OJK, KemenSos, dan BKKBN pada website, aplikasi <i>online</i>.</p>	<p>Masalah dapat ditemukan pada:</p> <p>Peran ibu-ibu Dasa Wisma dalam pengelolaan anggaran keuangan</p>	<p>Perencanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan Evaluasi kegiatan</p>	<p>Solusi disampaikan dan dilaporkan dalam bentuk:</p> <p>Ceramah materi yang akan diberikan dengan menggunakan <i>powerpoint</i> Diskusi tanya jawab mengenai faktor hambatan, pendukung dan solusinya.</p>

Gambar 1. Proses Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

C. PELAKSANAAN PROGRAM dan EVALUASI

Ide pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berangkat dari kondisi pandemi Covid-19 berkepanjangan yang berimbas pada kehidupan sosial dan ekonomi ibu-ibu kelompok Dasawisma Blok H pada Perumahan Bumi Sempaja. Masalah pengelolaan keuangan keluarga (rumah tangga) menjadi masalah utama sehingga menjadikan ibu-ibu kelompok Dasawisma menganggap penting untuk mengetahui anggaran keuangan keluarga, cara menyusun anggaran dan mengelola anggaran keuangan keluarga (rumah tangga) dengan benar dan bijak. Rasa antusias, dukungan dan saling

bekerja sama yang dimiliki oleh ibu-ibu kelompok Dasawisma juga menjadi faktor utama kelancaran kegiatan.

Keluaran yang dicapai (*output*) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama pada kelompok ibu-ibu Dasawisma adalah sebagai berikut:

1. Bagi ibu-ibu Dasawisma yang diberikan edukasi/pembelajaran dari pengetahuan tentang anggaran keuangan keluarga (rumah tangga) dan cara menyusun anggaran keuangan keluarga dalam satu periode (satu bulan).
2. Dari hasil ceramah tim dosen, maka diketahui kelompok ibu-ibu Dasawisma dapat memahami isi materi pembelajaran penyusunan anggaran keuangan keluarga (rumah tangga) satu periode (per bulan). Di akhir sesi ceramah para dosen, yaitu diskusi tanya jawab mengenai faktor hambatan dan faktor pendukung serta solusinya.
3. Dapat menyusun anggaran keuangan keluarga (rumah tangga) dengan cara manual atau dengan menggunakan Program *Excel*.

Kegiatan ini juga diyakini memiliki dampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan dimensi lainnya. Dapat dijelaskan dampaknya pada kehidupan sosial, antara lain:

1. Memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan anggaran keuangan keluarga (rumah tangga) masing-masing.
2. Jujur dan transparansi dalam melaporkan anggaran keuangan keluarga per bulan (satu periode) pada keluarga khususnya suami (kepala rumah tangga).
3. Terampil dalam menyusun anggaran keuangan keluarga secara manual atau dengan menggunakan aplikasi *Excel*.
4. Dapat menyampaikan sosialisasi pengetahuan tentang anggaran keuangan keluarga pada kelompok ibu-ibu Dasawisma blok lainnya dan kelompok ibu-ibu pengajian di dua RT Perumahan Bumi Sempaja.

Sedangkan dampaknya pada kehidupan ekonomi, adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan anggaran keuangan keluarga dengan benar.
2. Memiliki potensi dasar dan mengelola anggaran keuangan keluarga secara rutin per bulan.
3. Dapat merencanakan kegiatan berdasarkan penyusunan anggaran keuangan keluarga dengan bijak dan hemat.
4. Dapat memulai dan memilih usaha/bisnis keluarga yang tepat pada masa pandemi Covid-19 untuk peningkatan kehidupan rumah tangga.

Sebagai bentuk evaluasi dan tindak lanjut hasil kegiatan, tim pengabdian kepada masyarakat tetap menawarkan pendampingan secara periodik kepada ibu-ibu kelompok

Dasawisma Blok H untuk menjaga kualitas perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan anggaran keuangan keluarga (rumah tangga) secara baik dan bijak.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan, peranan ibu rumah tangga dalam keluarga memiliki kewajiban dalam rangka membuat pengelolaan keuangan keluarga, yang diharapkan agar tidak terjadi kekurangan atau defisit. Sebagai dasar tersebut, tim dosen dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman ingin memberikan kontribusi Pengabdian Masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma perguruan tinggi berupa pelatihan dengan tema “Edukasi Penyusunan Anggaran Keuangan keluarga selama masa pandemi Covid-19 pada kepada ibu-ibu kelompok Dasawisma Blok H Perumahan Bumi Sempaja, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara. Penyelesaian masalah dilakukan dengan penyampaian materi melalui ceramah dan diskusi, tutorial/praktik dan evaluasi serta pendampingan sebagai tindak lanjut.

Saran

Adapun saran yang diajukan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah pentingnya pelaksanaan edukasi dan pendampingan oleh tim dosen dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dalam penyusunan anggaran keuangan keluarga kepada ibu-ibu rumah tangga. Sehingga dapat membantu dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman ibu-ibu rumah tangga dalam menyusun dan mengelola anggaran keuangan keluarga (rumah tangga) dengan benar dan bijak.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah mengalokasikan anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E, M.Si., Ak., CA., CSRS; Sekretaris Jurusan Akuntansi Ibu Dr. Wulan I. R. Sari, S.E., M.Si., CSP; Koordinator Program Studi Akuntansi Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA., CSRS; dan Ketua Panitia PKM Bapak Dr. Hariman Bone, S.E., M.Sc., Ak., CSRS dan semua rekan Dosen Jurusan Akuntansi. Atas bantuan, dukungan dan kerja sama dari Bapak/Ibu sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana sesuai yang direncanakan. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kelompok Dasawisma blok H selaku mitra PKM atas perkenannya mengundang tim PKM untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. 2020. “*Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Era Pandemi COVID-19*” In Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, , 1–21.
- Budisantoso, Indrasto & Gunanto. 2010. *Cara Gampang Mengelola Keuangan Pribadi dan Keluarga*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kementerian Sosial. 2018. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan & Perencanaan Usaha*. In Kementerian Sosial Republik Indonesia, 1–74.
- Otoritas Jasa Keuangan. “*Perencanaan Keuangan Ibu Rumah Tangga.*” In Otoritas Jasa Keuangan, 1–84.
- Otoritas Jasa Keuangan. “*Perencanaan Keuangan Keluarga.*” In Otoritas Jasa Keuangan, 1–24.
- Senduk, Safir. 2009. *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga: Mengelola Keuangan Keluarga*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

BAB 17

PENDAMPINGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DALAM PENILAIAN INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU PADA PT. INDO PUSAKA BERAU

PENDAMPINGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DALAM PENILAIAN INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU PADA PT. INDO PUSAKA BERAU

Muhammad Ikbal

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
ivaganza@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Peran perguruan tinggi khususnya dari sisi pengabdian masyarakat adalah memberikan pendampingan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Salah satu unsur masyarakat adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya mendapat berbagai kendala, salah satunya adalah kendala dalam keahlian akademik. Keahlian akademik yang dimaksud salah satunya dalam analisis keuangan dan analisis investasi. Akademisi memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan arahan khususnya dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan di dalam dunia nyata. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri, termasuk di dalamnya kebijakan anggaran dan kebijakan investasi.

Saat ini, kewenangan daerah akan semakin kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan (Fanggidae & Manafe, 2019). Sistem pemerintahan otonomi daerah adalah kemandirian daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya. Pemerintah daerah memerlukan alat-alat perlengkapannya sendiri (Nurfurqon, 2020). Wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berarti pula membiarkan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri. Untuk merealisasi hal tersebut, daerah membutuhkan sumber keuangan sendiri dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri, dan hal tersebut memerlukan peraturan yang tegas agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah (Fauzi, 2019). Inisiasi daerah dalam hal sumber keuangan ini berkaitan erat akan kehadiran berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Baik perusahaan daerah maupun pusat/negara sama-sama merupakan salah satu sumber keuangan negara dan daerah (Ikhwansyah, Chandrawulan, & Amalia, 2018).

Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Berau melakukan Perjanjian Konsorsium antara

Pemkab Berau, PT Indonesia Power dan PT Pusaka Jaya Baru (OJB) untuk membentuk perusahaan yang diberi nama PT Indo Pusaka Berau (IPB). Tujuan utama konsorsium BUMD ini adalah selain mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pembangkit listrik juga memasarkan dan memperdagangkan hasil produksinya di dalam negeri. Secara khusus, untuk membentuk perusahaan energi yang memasok listrik bagi PLN di wilayah Kabupaten Berau (LAKIP Kab. Berau, 2019).

Tahun 2018 salah satu anggota konsorsium yang juga pemegang saham yakni PT Pusaka Jaya Baru (OJB) mengumumkan dan menawarkan penjualan saham terbatas kepada Pemerintah Kabupaten Berau dan PT Indonesia Power. Hingga Pemerintah Kabupaten Berau merespons penawaran ini dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU. 92669.AH.01.02. Kemudian tahun 2008 adanya AD/RT tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Indo Pusaka Berau pasal 7 ayat 6 bahwa: para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

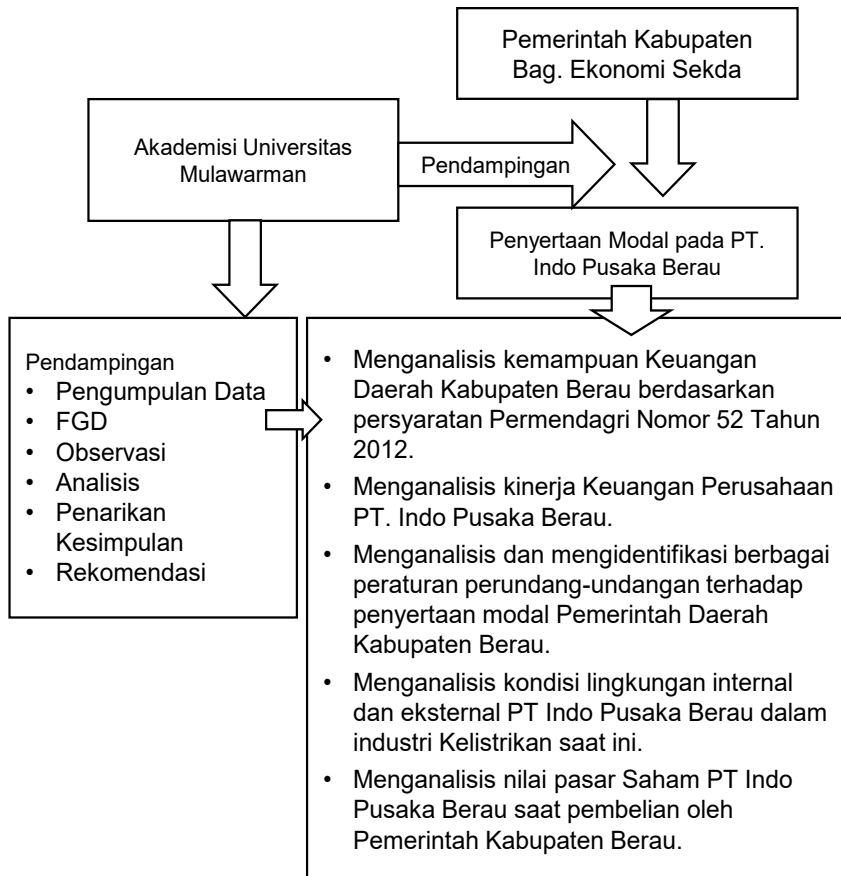
Pertimbangan kedua, apabila saham tersebut tidak dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Berau dan PT. Indonesia Power yang membelinya maka Pemerintah Kabupaten Berau bukan lagi sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga bukan lagi sebagai pengambil keputusan yang dominan. Dengan memperhatikan komposisi kepemilikan saham pada saat ini, yaitu Pemkab Berau sebesar 49,49 %, PT. Indonesia Power sebesar 46,53% dan PT. Pusaka Jaya Baru sebesar 3,99%.

Sebagai pertimbangan teknis untuk pengambilan kebijakan membeli atau tidak membeli saham yang ditawarkan PT. Pusaka Jaya Baru maka perlu melakukan beberapa pengkajian, antara lain:

- a. Posisi Neraca Kabupaten Berau harus dalam keadaan surplus untuk dapat melakukan penyertaan modal dibuktikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau beberapa tahun terakhir.
- b. Penyertaan Modal sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Investasi Pemerintah Daerah serta aturan lain yang relevan, yakni salah satunya: Analisis investasi dilakukan oleh penasihat investasi yang independen, profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- c. Penyertaan Modal Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Berau.

Pemerintah daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi yang didampingi oleh para akademisi, supaya dalam penyusunan analisis investasi pemerintah daerah tersebut memiliki arah yang jelas (Supratiwi & Agustia, 2019). Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasihat investasi yang independen dan

profesional, yang melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Masalah Pengabdian kepada Masyarakat

Dari pertimbangan di atas, muncul isu dan permasalahan detail. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dengan segala keterbatasan tenaga fungsional bidang penelitian membutuhkan bantuan dari akademisi dan secara kontekstual perlu mengidentifikasi apakah pembelian saham yang ditawarkan oleh PT. Pusaka Jaya Baru masih layak atau tidak. Oleh karena itu, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Berau ini, terkait dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Berau berdasarkan persyaratan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012. Kemudian terkait dengan regulasi bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyertaan modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Berau ini, baik dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permen hingga Peraturan Daerahnya, terkait pula dengan

penilaian aspek internal PT Indo Pusaka Berau (IPB), bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal PT Indo Pusaka Berau (IPB) dalam industri kelistrikan saat ini, hal lain yang perlu dianalisis terkait dengan kelayakan investasi, bagaimana kelayakan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau di PT Indo Pusaka Berau (IPB) dibandingkan industri lainnya.

Solusi yang Ditawarkan

Pihak Pemerintah Kabupaten Berau diwakili oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah tidak memiliki Tenaga Ahli Fungsional dalam melakukan suatu analisis akademis dalam hal ini analisis Kelayakan dan Penilaian Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada PT. Indo Pusaka Berau.

Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat

Secara umum maksud dari kegiatan ini, adalah membantu dan mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun analisis investasi yang dikerjakan secara bersama-sama. Pihak Pemerintah Kabupaten Berau diwakili oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah yang bertanggungjawab dengan jalannya kegiatan. Kemudian tujuan khusus dari kegiatan ini adalah menyusun analisis Kelayakan dan Penilaian Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada PT. Indo Pusaka Berau ini adalah sebagai, berikut:

1. Menganalisis kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan persyaratan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
2. Menganalisis kinerja Keuangan Perusahaan PT. Indo Pusaka Berau.
3. Menganalisis dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
4. Menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal PT Indo Pusaka Berau dalam industri kelistrikan saat ini.
5. Menganalisis nilai pasar saham PT Indo Pusaka Berau saat pembelian oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

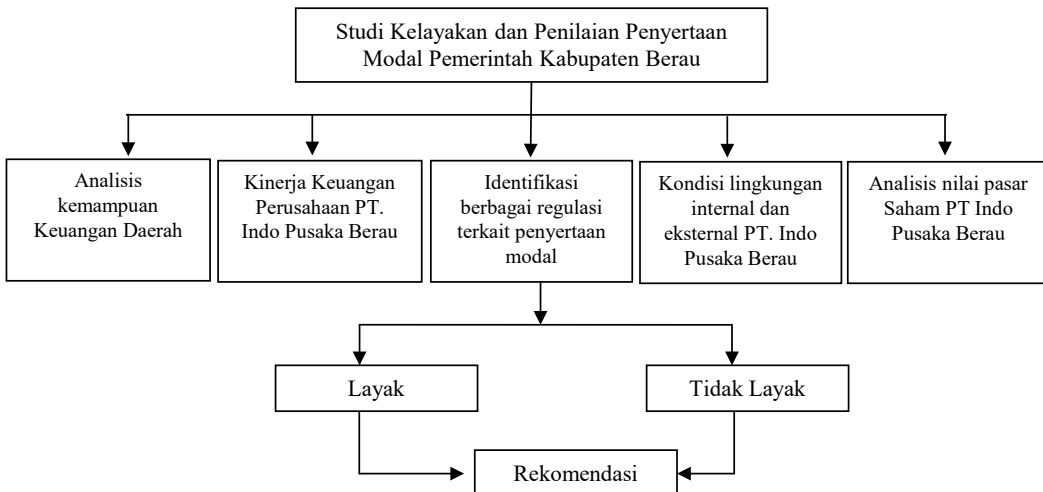
B. METODE YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau terdiri dari beberapa tahapan, yakni terkait kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Berau, kinerja internal Perusahaan PT. Indo Pusaka Berau, peraturan perundang-undangan terhadap penyertaan modal, kondisi lingkungan internal dan eksternal PT Indo Pusaka Berau serta nilai pasar Saham PT Indo Pusaka Berau. Lebih rincinya empat tahapan analisis yaitu:

1. Analisis kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan persyaratan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
2. Menganalisis kinerja Keuangan Perusahaan PT. Indo Pusaka Berau.
3. Menganalisis dan mengidentifikasi berbagai regulasi terkait penyertaan modal

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

4. Menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal PT Indo Pusaka Berau dalam industri Kelistrikan saat ini.
5. Menganalisis nilai pasar Saham PT Indo Pusaka Berau saat pembelian oleh pemerintah Kabupaten Berau.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan cara observasi atau pengamatan, wawancara, kuesioner, dan opini pakar. Data sekunder diperoleh dari buku, internet, jurnal, laporan keuangan perusahaan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Survei lapangan yaitu pengamatan langsung objek penelitian dengan tujuan untuk memahami kondisi lapangan yang sebenarnya.
2. *In depth interview* dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan rencana umum penyertaan modal yaitu PT Indo Pusaka Berau dan pihak Pemerintah Kab. Berau.
3. Kuesioner berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada PT Indo Pusaka Berau dan pihak Pemerintah Kabupaten Berau.
4. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder untuk diolah lebih lanjut. Kebutuhan, sumber data, jenis data, metode pengumpulan, dan analisis data disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan, sumber data, jenis data, metode pengumpulan, dan analisis data

Kebutuhan Data	Jenis Data	Metode	Sumber Data
Analisis kemampuan Keuangan Daerah	▪ Sekunder	▪ Dokumentasi	Pemkab Berau: BPKAD
Analisis kinerja Keuangan Perusahaan PT. Indo Pusaka Berau	▪ Sekunder	▪ Dokumentasi	PT. Indo Pusaka Berau
Identifikasi berbagai regulasi terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.	▪ Sekunder	▪ Dokumentasi	Pemerintah Pusat Pemkab Berau
Analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal PT Indo Pusaka Berau dalam industri Kelistrikan saat ini.	▪ Primer ▪ Sekunder	▪ Observasi ▪ Wawancara ▪ Dokumentasi	PT. Indo Pusaka Berau
Analisis nilai pasar Saham PT Indo Pusaka Berau	▪ Sekunder	▪ Dokumentasi	PT. Indo Pusaka Berau

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Analisis Kinerja Perusahaan

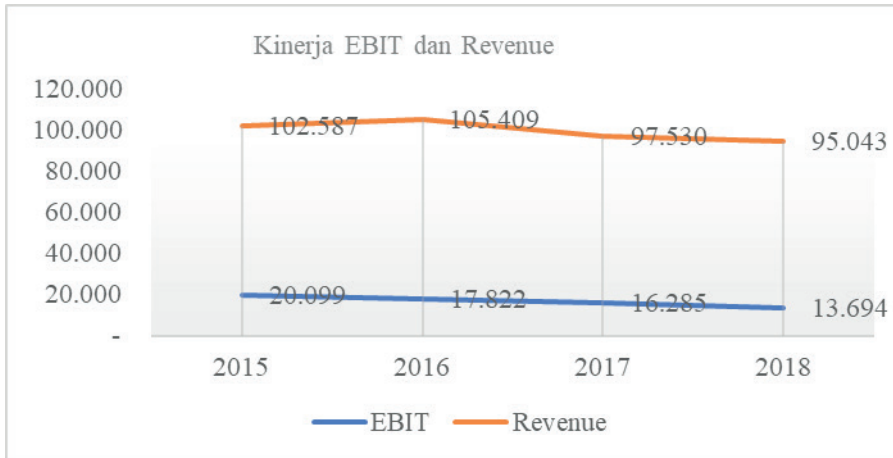
Analisis Finansial bertujuan untuk mengetahui profitabilitas dan kelayakan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau pada PT. Indo Pusaka Berau. Pada kajian ini untuk mengetahui kelayakan finansial PT. Indo Pusaka Berau digunakan kriteria ROA (*Return on Asset*) yang diuraikan pada penjelasan di bawah ini:

a. *Operating Profit Margin.*

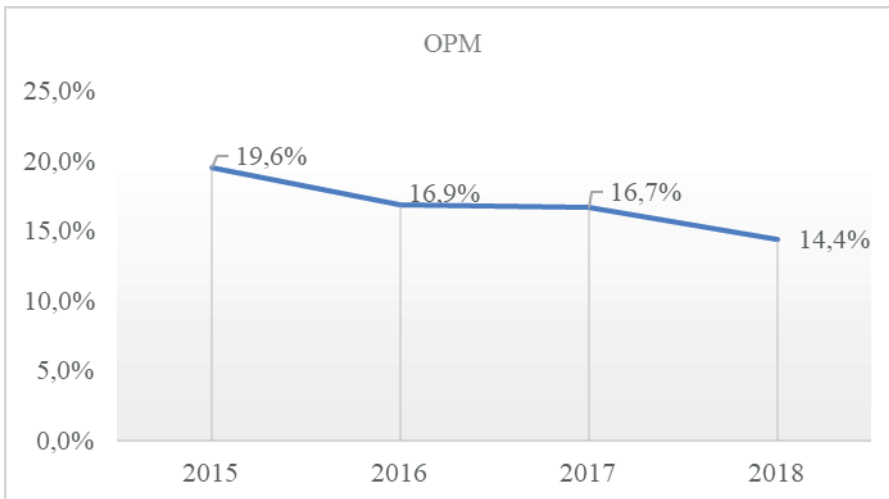
Operating Profit margin menggambarkan laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari penjualan perusahaan. Rasio ini dapat dilihat pada laporan laba rugi pada bagian analisis *common size*. Rasio ini juga diinterpretasikan sebagai ukuran efisiensi bagaimana perusahaan menekan biaya-biaya pada suatu periode. Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan Kinerja Perusahaan dengan indikator *Operating Profit margin*.

Tabel 2. Hasil perhitungan Kinerja Perusahaan dengan indikator *Operating Profit* margin

	2015	2016	2017	2018
EBIT (<i>Earning Befor Tax</i>)	20.099	17.822	16.285	13.694
<i>Revenue</i>	102.587	105.409	97.530	95.043
OPM	19,6%	16,9%	16,7%	-10,8%



Gambar 3. Fluktuasi kinerja laba dan pendapatan



Gambar 4. Fluktuasi *operating profit margin*

Secara umum sejak tahun 2015 kinerja laba perusahaan cukup stabil hingga tahun 2017, namun terjadi penurunan laba tahun 2018, hingga memperoleh laba hanya sebesar Rp13,6 Milyar, walaupun sebenarnya perusahaan mencatat kerugian

sebesar Rp10,23 Milyar yang diakibatkan oleh Akun Penurunan Nilai Piutang sebesar Rp23,98 yang membuat tergerusnya nilai laba. Namun untuk menilai OPM akun Akun Penurunan Nilai Piutang sebesar Rp23,98 harus dikeluarkan.

Rasio margin laba operasi merupakan ukuran untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan PT Indo Pusaka Berau dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan. Laba operasi perusahaan merupakan laba bersih sebelum pajak dan bunga. Laba operasi juga biasa disebut dengan laba usaha. Kalau dilihat rata-rata tahun 2016-2017 masih berkisar antara 14% sampai 20%, artinya kemampuan memperoleh laba masih rendah dan semakin menurun di tahun 2018.

2. Net Profit Margin.

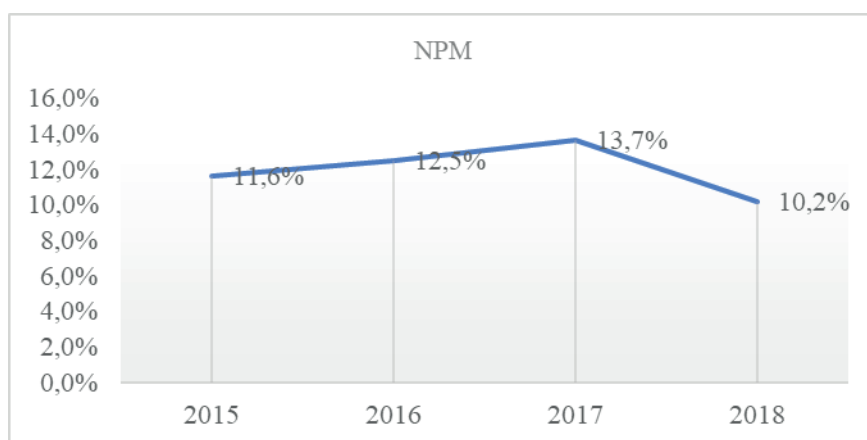
Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu penjualan rupiah. Semakin tinggi rasio artinya semakin baik, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan Kinerja Perusahaan dengan indikator *Net Profit Margin*.

Tabel 3. Hasil perhitungan Kinerja Perusahaan dengan indikator *Net Profit Margin*

	2015	2016	2017	2018
Eraring After interest & Tax	11.933	13.155	13.344	9.688
Revenue	102.587	105.409	97.530	95.043
NPM (<i>Net Profit Margin</i>)	11,6%	12,5%	13,7%	10,2%

Hasil perhitungan dengan menggunakan NPM terlihat jelas bahwa tahun 2018 PT IPB mengalami kerugian sebesar Rp14,29 Milyar, namun dianggap bukan kerugian *ril*, tapi hanya karena ada angka pengurang penurunan nilai piutang



Gambar 5. Fluktuasi *net profit margin*

sebesar Rp23,98., sehingga dalam analisis ini angka pengurang tersebut tidak dikalkulasi, sehingga 2018 nilai NPM sebesar 10,2%

Margin Laba Bersih ini menunjukkan proporsi penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya terkait. Bagi Investor dalam hal ini pemerintah Kabupaten Berau, Margin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa efisien manajemen mengelola perusahaannya dan juga memperkirakan profitabilitas masa depan berdasarkan peramalan penjualan yang dibuat oleh manajemennya.

Dengan membandingkan laba bersih dengan total penjualan, pemerintah Kabupaten Berau sebagai investor dapat melihat berapa persentase pendapatan yang digunakan untuk membayar biaya operasional dan biaya non-operasional serta berapa persentase tersisa untuk membayar dividen ke para pemegang saham ataupun berinvestasi kembali ke perusahaannya.

c. *Return on Assets (ROA)*

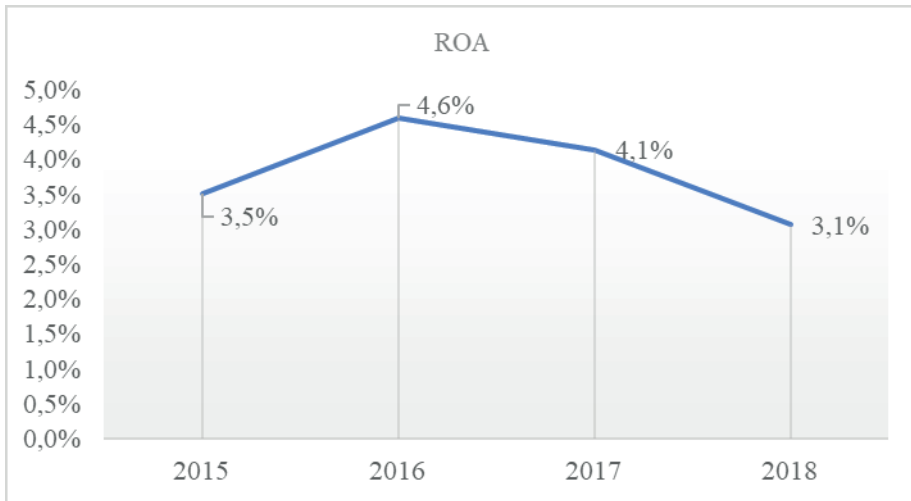
ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan *after tax operating profit* dari total aset yang dimiliki perusahaan. Laba yang dihitung adalah laba setelah bunga dan pajak atau EAT (*Earning After Interest and Tax*). Hasil perhitungan kinerja perusahaan dengan indikator *Return on Assets* digambarkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil perhitungan Kinerja Perusahaan dengan indikator *ROA*

	2015	2016	2017	2018
EAT (<i>Earning After Tax</i>)	11.933	13.155	13.344	9.688
Total Aset	338.775	286.050	321.633	315.439
ROA	3,5%	4,6%	4,1%	3,1%

Sumber: Perhitungan LK PT IPB

Dapat dikatakan bahwa satu-satunya tujuan aset perusahaan adalah menghasilkan pendapatan dan tentunya juga menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. Rasio ROA atau *Return on Assets* ini dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengonversi investasinya pada aset menjadi keuntungan atau laba (*profit*).



Gambar 6. Fluktuasi *return on assets*

Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. ROA akan sangat bermanfaat apabila dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri yang sama, karena industri yang berbeda akan menggunakan aset yang berbeda dalam menjalankan operasionalnya. Misalnya, perusahaan industri manufaktur harus menggunakan peralatan yang besar dan mahal, sementara perusahaan perangkat lunak (*software house*) hanya menggunakan komputer dan server dalam menjalankan bisnisnya.

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005:65).

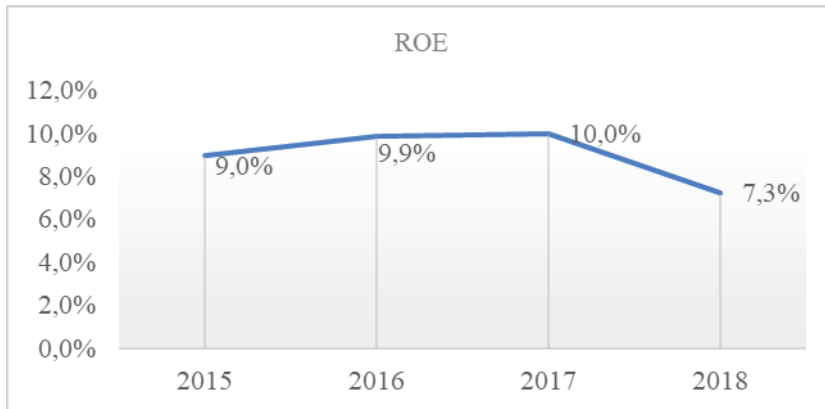
d. Return on Equity (ROE)

Return on equity (ROE) adalah salah satu rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor untuk menganalisis saham. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas tim manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan pemegang saham. Hasil perhitungan kinerja perusahaan dengan indikator *return on equity* digambarkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil perhitungan Kinerja Perusahaan dengan indikator *ROE*

	2015	2016	2017	2018
EAT	11.933	13.155	13.344	9.688
Equity (Modal Saham)	133.150	133.150	133.150	133.150
ROE	9,0%	9,9%	10,0%	7,3%

Sumber: Perhitungan LK PT IPB



Gambar 7. Fluktuasi *return on equity*

Return on equity (ROE) ini mengukur sejauh mana sebuah perusahaan dalam menggunakan setiap rupiah yang mereka dapatkan untuk menghasilkan laba. Oleh karena itu seorang investor harus selalu menelusuri sebuah pasar untuk mendapatkan perusahaan yang bisa mendulang angka ROE yang baik & masuk akal.

ROE sangat menarik bagi pemegang saham maupun calon pemegang saham, dan juga bagi manajemen karena rasio tersebut merupakan ukuran atau indikator penting dari *shareholders value cration*, artinya semakin tinggi rasio ROE, semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Menurut Brigham, Enrhardt (2005:225), ROE mengukur daya perusahaan untuk menghasilkan laba pada investasi nilai buku pemegang saham, semakin tinggi ROE semakin baik kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba dan menjaga kontinuitas perusahaan dalam jangka panjang.

Analisis Strategi Lingkungan Internal dan Eksternal Perusahaan

Pada bagian ini dalam rangka memetakan kekuatan dan kelemahan perlu menganalisis hal-hal yang berhubungan internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal berisi

tentang kekuatan dan kelemahan dari perusahaan sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor dari luar perusahaan seperti ancaman dan peluang.

Analisis internal dan eksternal perusahaan PT Indo Pusaka Berau adalah sebagai berikut:

1. Analisis Internal

Analisis internal adalah analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekuatan yang dimiliki oleh PT Indo Pusaka Berau Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Baku

Bahan Baku yang digunakan sebagai bahan bakar adalah batu bara. Bahan baku ini mudah didapat secara kontinu dalam jumlah besar. Perusahaan telah bekerja sama dengan PT Berau Coal untuk memasok kebutuhan Batu Bara. Proses pemanfaatannya relatif sederhana, sehingga investasi yang dibutuhkan lebih murah, yaitu dalam proses produksi perusahaan memanfaatkan *exhaust steam* yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengkondensasi uap bekas menjadi air.

b. Memiliki SDM yang berkualitas.

SDM merupakan salah satu faktor utama penunjang kesuksesan suatu perusahaan. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Indo Pusaka Berau ditunjang oleh kemampuan SDM yang berkualitas dan bersertifikat serta memiliki pengalaman kerja yang telah diakui. Perekrutan pegawai dipilih secara ketat berdasarkan kompetensi yang terbaik dan dalam peningkatannya selalu diberikan *training* ataupun *workshop* agar kemampuan dan kompetensi yang dimiliki karyawan akan terus berkembang.

c. Reputasi perusahaan.

Dalam bisnis penyediaan tenaga listrik, PT Indo Pusaka Berau Unit memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan maupun pesaingnya. Dengan peralatan yang modern dan didukung oleh SDM yang berkualitas, serta pengalaman kerja dalam bidang produksi dan pemeliharaan, PT Indo Pusaka Berau dipercaya dalam menjalankan bisnis pembangkit maupun peralatan mesin lainnya. Selain itu, PT Indo Pusaka Berau Unit Bisnis adalah salah satu mitra PLN yang merupakan penyedia tenaga listrik di Kabupaten Berau.

d. Kemampuan perusahaan dalam bidang *maintenance*.

PT Indo Pusaka Berau memiliki kemampuan dalam bidang *overhaul*, *assessment*, *commissioning*, *troubleshooting*, dan relokasi unit pembangkit secara mandiri. PT Indo Pusaka Berau menangani pemeliharaan mesin pembangkit pada unit pembangkitan milik PT Indo Pusaka Berau.

e. Memiliki pasar internal.

PT Indo Pusaka Berau merupakan pembangkit yang melayani wilayah Kabupaten Berau dan PT Berau Coal, sehingga memiliki pasar yang jelas atas pelayanan penyediaan listrik yang bekerja sama dengan PT PLN Persero.

f. Pelayanan

Selama 15 tahun perusahaan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Berau melalui PT PLN sebagai pemilik Jaringan. PT Indo Pusaka Berau adalah perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara (PLTU Lati) dengan kapasitas 3 x 7 MW di Kabupaten Berau. Perusahaan senantiasa memantau kualitas limbah untuk membantu melestarikan alam sekitar. Pengelolaan lingkungan dilaksanakan sejak tahap awal dan telah disetujui oleh Komisi AMDAL DLH Kab. Berau.

g. Kerja sama

PT Indo Pusaka Berau telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik kerja sama konsorsium pendirian perusahaan, kerja sama pemasok dengan PT Berau Coal maupun kerja sama penjualan listrik dengan PT PLN Persero. Kerja sama ini akan menjadikan perusahaan membuka peluang pertumbuhan dalam jangka panjang.

h. Tujuan

Selain bertujuan menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat Kabupaten Berau, perusahaan juga bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang menjamin pertumbuhan yang berkesinambungan serta berupaya mencapai tingkat kerja setara dengan perusahaan pembangkit tenaga listrik kelas dunia.

Di samping kekuatan-kekuatan yang ada, terdapat juga beberapa kelemahan yang dimiliki oleh PT Indo Pusaka Berau. Kelemahan tersebut diantaranya:

a. Belum memiliki *workshop*/ bengkel sendiri.

Dalam pemeliharaan peralatannya, PT Indo Pusaka Berau masih tergantung dengan *workshop-workshop* pendukungnya (*workshop* luar dan institusi pendukung seperti PT Indonesia Power dan PLN). Hal ini menyebabkan peralatan yang dimiliki PT Indo Pusaka Berau tidak disimpan dan dikelola di dalam sebuah *workshop* yang akan memudahkan pemeliharaan peralatannya serta menyebabkan risiko kehilangan dan kerusakan pada peralatan.

b. Manajemen peralatan yang belum memadai.

PT Indo Pusaka Berau belum memiliki manajemen peralatan yang baik sehingga peralatan yang ada belum dapat dipergunakan dengan optimal. Misalnya jika peralatan yang ada di salah satu unit bisnis pembangkit tidak digunakan, PT Indo Pusaka Berau belum dapat memanfaatkannya dengan baik. Padahal jika

manajemen peralatan yang dimiliki PT Indo Pusaka Berau sudah berjalan dengan baik, maka akan memberikan keuntungan lebih bagi PT Indo Pusaka Berau.

c. Masa umur ekonomi Pabrik yang masih tersisa 15 tahun.

Dengan memiliki peluang yang baik sebagai penyedia listrik, dan investasi yang cukup besar, perusahaan dihadapkan masa umur ekonomi pabrik yang semakin mendekati usia habis masa pakai.

2. Analisis Eksternal

Analisis eksternal memperhatikan kesempatan dan ancaman yang dimiliki oleh PT Indo Pusaka Berau dalam menjalankan bisnisnya. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh PT Indo Pusaka Berau:

a. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk sejalan dengan meningkatnya konsumsi. Salah satu konsumsi yang wajib bagi masyarakat adalah konsumsi listrik rumah tangga maupun industri

b. Bahan baku yang murah

Ketersediaan bahan baku batu bara yang relatif murah yang diberikan oleh PT Berau Coal dengan hanya membayar royalti atas penggunaan sumber daya alam tersebut.

c. Kompetitor

Masih minimnya kompetitor dari pihak swasta yang menyediakan sumberdaya listrik sebagai mitra PLN di Kabupaten Berau.

d. Perluasan Pasar

PT Indo Pusaka Berau masih memiliki peluang untuk meluaskan pasar, bukan hanya konsumsi bagi masyarakat Kabupaten Berau dan PT Berau Coal, perluasan pasar juga bisa untuk industri lainnya di wilayah Kabupaten Berau.

Beberapa ancaman yang mengganggu PT Indo Pusaka Berau Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan dalam menjalankan bisnisnya adalah sebagai berikut:

a. AFTA (Asia Free Trading Area)

Akan diberlakukannya AFTA dapat membuat persaingan menjadi lebih ketat karena perdagangan semakin bebas, sehingga memungkinkan perusahaan dari luar negeri yang bergerak dalam bidang bisnis yang sama dapat masuk dengan mudah.

b. Meningkatnya persaingan

Dalam persaingan bisnis di bidang industri listrik, sudah banyak perusahaan lain yang juga bergerak dalam bidang yang sama, yang kondisinya sudah mapan

dan beberapa diantaranya telah memiliki aset yang lengkap.

c. Tingginya harga BBM

Tingginya harga BBM dapat menyebabkan harga *spare part* maupun peralatan pemeliharaan yang dibutuhkan menjadi semakin mahal. Dengan meningkatnya harga BBM, maka akan berpengaruh terhadap harga peralatan untuk pemeliharaan yang menyebabkan pengeluaran pembelian peralatan menjadi semakin besar.

d. Kurs Nilai Rupiah terhadap Dollar USA

Nilai rupiah terhadap dolar sangat berpengaruh pada harga *spare part* yang masih diimpor dari luar negeri. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada biaya pemeliharaan karena ketergantungan PT. Indo Pusaka Berau dengan OEM (*Original Equipment Manufacturing*) yang masih tinggi.

Analisis Regulasi dan Kelembagaan

Analisis Regulasi dan Kelembagaan bertujuan untuk mengetahui peraturan perundangan-undangan baik yang mendukung dan menghambat penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Berau pada PT Indo Pusaka Berau. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Analisis Peraturan Perundang-Undangan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Peraturan	Perihal
1	24/UU RI/No. 24 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 24	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Pusat/ Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum.• Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.• Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.

No	Peraturan	Perihal
2	24/UU RI/No. 24 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25	<ul style="list-style-type: none"> • Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah. • Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja Negara/Daerah.
3	24/UU RI/No. 24 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 28	<ul style="list-style-type: none"> • Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/ daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral. • Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/ daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. • Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.
4	24/UU RI/No. 24 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 38	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan Undang-undang APBN. • Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah /BUMN/ BUMD. • Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara. • Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

No	Peraturan	Perihal
5	24/UU RI/No. 24 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. • Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. • Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. • Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. • Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah /swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.
6	75/PP RI/No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75	Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan
7	151/PP RI/No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 115	Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
8	151/PP RI/No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65	Pengertian Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

No	Peraturan	Perihal
9	<p>19/PP/No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>Penjelasan Pasal 19 Ayat 2</p>	<p>Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerja sama dengan pihak lain termasuk masyarakat. Kerja sama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah</p>
10	<p>118/PP RI/No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Penjelasan Pasal 118 ayat 1</p>	<p>Karakteristik investasi jangka pendek adalah: a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan; b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan berisiko rendah. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti pembelian SUN jangka pendek dan SBI.</p>
11	<p>118/PP RI/No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Penjelasan Pasal 19 Ayat 3</p>	<p>Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.</p>
12	<p>19/PP/No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>Penjelasan Pasal 119 Ayat 2</p>	<p>Investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui badan usaha milik Daerah. Sementara yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat. Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan</p>

No	Peraturan	Perihal
13	119/PP RI/No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penjelasan Pasal 119 Ayat 3	Komponen investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/ atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
14	119/PP RI/No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penjelasan Pasal 119 Ayat 3	Komponen investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Sumber: Data diolah, 2021.

Analisis regulasi dan kelembagaan tersebut di atas mendukung investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal, melalui pengalihan saham PT Pusaka Jaya Baru. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dapat melakukan investasi jangka panjang berdasarkan penilaian kinerja perusahaan, selagi semua analisis menunjukkan laba positif dan dapat memberikan manfaat ekonomi seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan manfaat sosial seperti pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat, ataupun manfaat lainnya. Investasi pada sektor kelistrikan dapat mendatangkan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya sehingga investasi ini dianggap layak.

Investasi jangka panjang yang dimaksudkan dalam peraturan adalah membeli surat berharga pada suatu badan usaha untuk menambah kepemilikan dan menjaga hubungan baik, seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau pada PT Indo Pusaka Berau. Investasi jangka panjang seperti penanaman modal dalam bentuk saham hanya dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang memberikan *benefit* ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Penilaian Harga Saham

Pemerintah Kabupaten Berau perlu melakukan penilaian harga saham yang ada. Perhitungan penilaian harga berdasarkan fundamental, ada beberapa rasio perhitungan

yang digunakan oleh para analis dalam menganalisis harga wajar suatu saham, tetapi yang umum dipakai, yaitu *price earnings ratio* (PER) dan *price to book value* (PBV).

PER digunakan jika investor yang memang menginginkan berinvestasi di saham berdasarkan fundamental dan menjadikannya sebuah investasi menguntungkan dalam jangka panjang. Mengapa dalam jangka panjang? Karena investor ini bukan tipikal investor spekulan yang berharap besok harga saham sudah naik lagi, kemudian dilepas. Jika dilihat dari arti kata, *price earnings ratio* berarti harga berbanding dengan laba (*earning*). Lalu laba yang bagaimana yang dimaksud? laba yang dimaksud yaitu laba bersih per saham atau *earning per share* (EPS). Harga saham yang dimaksud di sini adalah harga pasar saham tersebut saat perhitungan PER. Jadi, PER didapat dari harga pasar dibagi EPS. Untuk mengetahui nilai PER, kita harus tahu berapa EPS saham tersebut yang didapat dari laba bersih setahun dibagi dengan jumlah seluruh saham perusahaan:

a. EPS (*Earning Per Share*)

Maksud sebenarnya dari mencari laba per saham ini adalah untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang didapat investor dari tiap lembar saham yang ia pegang. Karena yang ingin kita cari adalah berapa nilai yang dihasilkan dari tiap lembar saham perusahaan yang beredar, maka yang kita hitung adalah laba/rugi yang terbaru dari perusahaan.

Adapun rumusnya:

$$\text{EPS} = \text{Laba Bersih} / \text{Jumlah Saham Beredar}$$

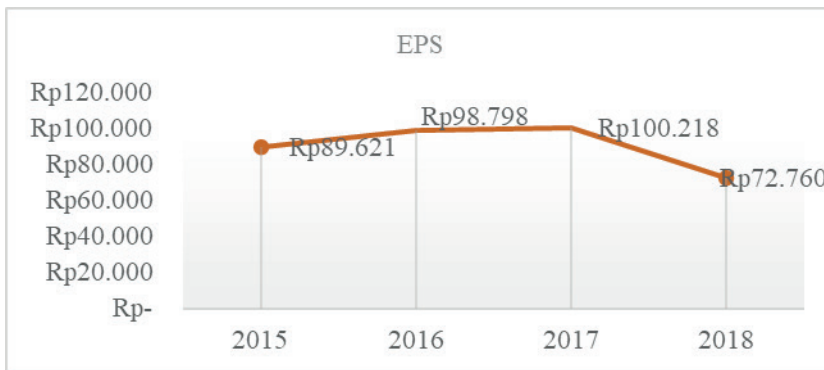
Hasil perhitungan penilaian harga saham dengan indikator EPS digambarkan pada kalkulasi Tabel 7.

Tabel 7. Hasil perhitungan penilaian harga saham dengan indikator EPS

	2015	2016	2017	2018
Laba Bersih	Rp 11.933*)	Rp 13.155*)	Rp 13.344*)	Rp 9.688*)
Saham Beredar	133.150	133.150	133.150	133.150
EPS	Rp89.621	Rp 98.798	Rp 100.218	Rp 72.760

Sumber: Perhitungan LK PT IPB

*) dalam jutaan rupiah



Gambar 8. Fluktuasi nilai EPS

Umumnya, laba per saham (EPS) yang tinggi menandakan profitabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan laba per saham yang rendah. Artinya, perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk dibagikan ke pemegang sahamnya. Meskipun demikian, investor tidak hanya memperhatikan nilai dari Laba per lembar saham ini saja untuk membuat keputusan membeli atau tidak membeli saham pada perusahaan yang bersangkutan, karena pada dasarnya EPS ini dapat berubah menjadi tinggi apabila jumlah saham yang beredar dikurangi.

b. PBV (*Price to Book Value*)

Pada dasarnya, secara sederhana definisi dari PBV adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Menurut Latief, (2018) PBV adalah rasio untuk menilai harga wajar suatu saham dengan menghitung nilai harga saham terbaru atas nilai buku dari laporan keuangan perusahaan yang terbaru pula. Untuk itu, jelas sekali bahwa untuk menghitung akurasi dari PBV perusahaan adalah dengan menggunakan harga penutupan saham yang terbaru di hari itu dan *book value*-nya yang terbaru pula yang didapat dari rilis laporan keuangan pada periode tersebut. Tabel 8 menunjukkan nilai buku per lembar saham dan PBV.

Price to Book Value dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PBV = \frac{\text{Harga Per Lembar Saham}}{\text{Nilai Buku Per Lembar Saham}}$$

dimana

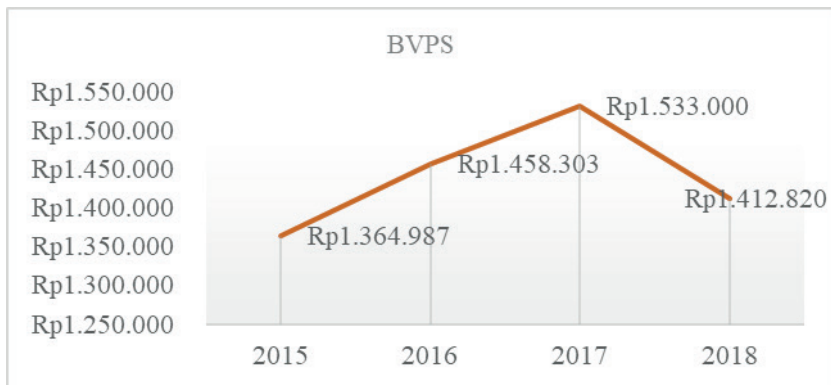
$$BVPS = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Tabel 8. Hasil perhitungan Nilai Buku Per lembar saham dengan indikator BVPS

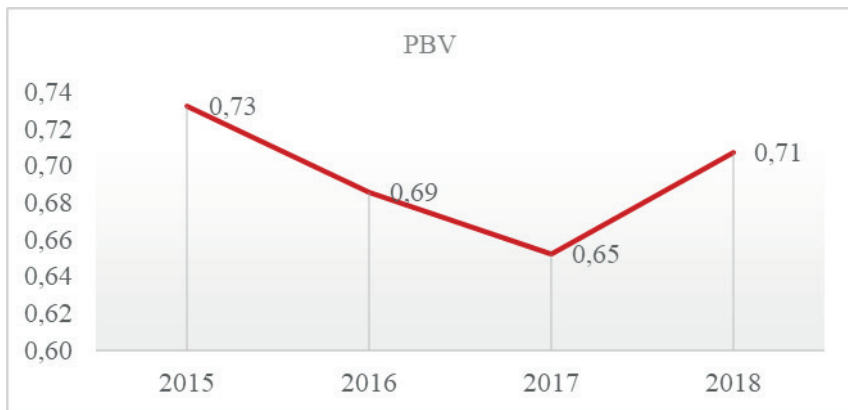
	2015	2016	2017	2018
Total Equitas	181.748*)	194.173*)	204.119*)	188.117*)
Saham Beredar	133.150	133.150	133.150	133.150
Harga Per lembar	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BVPS	1.364.987	1.458.303	1.533.000	1.412.820
PBV	0,73	0,69	0,65	0,71

Sumber: Perhitungan LK PT IPB

*) dalam jutaan rupiah



Gambar 8. Fluktuasi nilai BVPS



Gambar 9. Fluktuasi nilai PBV

Nilai buku per saham atau *book value per share* ini sering digunakan untuk membandingkan nilai pasar per saham perusahaan. Jika nilai BVPS perusahaan lebih

tinggi dari nilai pasar per sahamnya, maka sahamnya “*undervalued*” atau “murah” yang berarti perdagangan saham lebih rendah dari harga yang ditentukan perusahaan. Namun apabila nilai BVPS perusahaan lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai pasar per sahamnya, maka saham perusahaan tersebut dapat dikatakan kemahalan atau “*overvalued*” atau harga saham lebih tinggi dari harga yang ditentukan perusahaan.

Dengan demikian, nilai buku per saham atau BVPS ini dapat menentukan apakah saham suatu perusahaan telah “*overvalued*” atau masih “*undervalued*”. Ini dapat membantu para investor untuk mengambil keputusan apakah membeli atau tidak membeli saham tertentu. Berdasarkan perbandingan tersebut bisa dikatakan bahwa harga saham yang ditentukan perusahaan adalah *undervalued*/murah.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Berdasarkan analisis berjenjang, baik analisis internal maupun analisis terhadap posisi PT Indo Pusaka Berau, dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 174 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini diperbaharui dengan Undang-undang 23 tahun 2014, menyatakan dalam hal APBD diperkirakan surplus dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi daerah), sejak tahun 2018 mulai surplus, sebesar Rp197,71 Milyar.
2. Hasil analisis ROA maupun ROE yang dilakukan terhadap pada PT Indo Pusaka Berau hasilnya sangat menarik bagi pemegang saham maupun calon pemegang saham dengan menghasilkan ROA dan ROE positif, dan juga bagi manajemen karena rasio tersebut merupakan ukuran atau indikator penting dari *shareholders value cration*, artinya semakin tinggi rasio ROA dan ROE, semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.
3. Hasil analisis regulasi dan kelembagaan setidaknya ada 14 klausul yang termuat baik dalam undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang mendukung penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Berau pada PT Indo Pusaka Berau dengan cara pembelian saham PT Pusaka Jaya Baru.
4. Hasil analisis penilaian harga saham, berdasarkan analisis nilai buku per saham atau BVPS ini dapat menentukan apakah saham suatu perusahaan telah “*overvalued*” atau masih “*undervalued*”. Hasil analisis ini dapat membantu para Pemerintah Kabupaten Berau untuk mengambil keputusan apakah membeli atau tidak membeli saham tertentu. Berdasarkan perbandingan tersebut bisa dikatakan bahwa harga saham yang ditentukan perusahaan adalah *undervalued* atau masuk kategori “murah”.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2018 realisasi APBD Kab. Berau surplus, tahun 2018 mulai surplus, sebesar Rp197,71 Milyar, sehingga Pemerintah Kabupaten Berau dapat melanjutkan Rencana Penyertaan Modal pada PT Indo Pusaka Berau dengan cara pembelian saham PT Pusaka Jaya Baru, yang didukung dengan regulasi yang mendukung penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Berau tersebut.
2. Hasil analisis finansial perusahaan, analisis ROA maupun ROE yang dilakukan terhadap pada PT Indo Pusaka Berau menghasilkan ROA dan ROE positif, artinya perusahaan selalu dapat memanfaatkan aset dan modalnya untuk memperoleh laba, hal ini menjadi referensi positif untuk proses pembelian saham.
3. Hasil penilaian harga saham selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai buku saham lebih besar daripada harga saham yang ditetapkan perusahaan, sehingga bisa dikatakan bahwa harga penawaran saham adalah *undervalued* atau masuk kategori “murah”, dan layak untuk dibeli sesuai dengan harga yang ditawarkan perusahaan.
4. Pemerintah Kabupaten Berau segera menyusun Rancangan Perda untuk Penyertaan Modal kepada pada PT Indo Pusaka Berau dengan cara pembelian saham PT Pusaka Jaya Baru.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak dapat terealisasi tanpa campur tangan banyak pihak. Ucapan terima kasih kami berikan kepada PT Indo Pusaka Berau yang telah memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan penilaian investasi; sehingga kegiatan PKM ini dapat diselesaikan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan penuh kegiatan PKM serta pendanaan Tahun Anggaran 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA. 2020. *Ekonomi Regional Kabupaten Berau*. Pemerintah Kabupaten Berau
- Fanggidae, H. K., & Manafe, M. W. 2019. *Evaluasi anggaran belanja sebagai alat pengendalian kebijakan pembangunan pada Pemerintah Daerah*. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(02), 45-52.
- Fauzi, A. 2019. *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Ikhwansyah, I., Chandrawulan, A. A., & Amalia, P. 2018. *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 150-161.
- LAKIP. 2019. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
- Nurfurqon, A. 2020. *Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73-81.
- Pramadhony, P., Lazim, M., Homzah, O. F., Sampurno, R. D., & Rusmaryadi, H. 2019. *Studi Awal Potensi Hydropower Sebagai Solusi Kebutuhan Energi Listrik Bagi Masyarakat Pinggiran*. *TURBULEN Jurnal Teknik Mesin*, 2(1), 11-17.
- Supratiwi, W., & Agustia, D. 2019. *Organizational Transformation: Memediasi Pengaruh Investasi Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(3), 403-422.

BAB 18

SOSIALISASI ETIKA DALAM MELAKUKAN PELAYANAN TERHADAP PUBLIK (MASYARAKAT) BAGI PEGAWAI UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SOSIALISASI ETIKA DALAM MELAKUKAN PELAYANAN TERHADAP PUBLIK (MASYARAKAT) BAGI PEGAWAI UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Anisa Kusumawardani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
anisa.kusumawardani@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Peran pegawai negeri sipil (PNS) sebagai aparatur pemerintah dalam kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh pengabdian dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap pegawai negeri sipil

Kewajiban sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugas tentunya berkaitan dengan kewajiban yang berhubungan dengan tugas di dalam jabatan yang diatur dalam Undang-Undang, artinya kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing pegawai negeri sipil. Kewajiban menaati tata tertib bekerja, kewajiban sebagai anggota KORPRI, sampai menaati peraturan tentang larangan korupsi mutlak dilakukan oleh seorang pegawai aparatur Negara.

Pentingnya posisi pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik menjadikan pegawai negeri sipil sebagai salah satu peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga kedudukan dan peranan pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab pegawai negeri sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional dan diwajibkan memberikan keteladanan.

Salah satu peran aparatur negara adalah sebagai pelayan publik. Dalam sebuah lembaga atau instansi, pelayanan publik harus dapat menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat.

Ditinjau dari kebutuhan masyarakat pelayanan publik sangatlah penting, pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan

dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik, memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Adapun pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangannya dalam menentukan standar pelayanan minimal. Untuk itu, diperlukan perhatian semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat regulasi, aparatur negara sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai pengawas jalannya pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, agar berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa tentang buruknya pelayanan publik, dapat segera diatasi dan berganti menjadi kepuasan masyarakat.

UPTD Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. UPTD ini menyelenggarakan pelayanan terfokus pada unit seksi pengembangan teknologi dan laboratorium. Seksi ini melayani penjualan dan pemesanan pupuk dengan nama produk Starter Tricho, Trichoderma Powder, Beauveria Bassiana Powder, dan aneka bibit tanaman kepada para konsumen yang kebanyakan dari unsur para petani dan masyarakat umum yang memerlukan pupuk organik maupun bibit tanaman. Instansi UPTD Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura melayani penjualan dan pemesanan untuk konsumen tidak hanya dari kota Samarinda saja tetapi termasuk dari daerah lain, Tenggarong, Balikpapan, Bontang, Paser, Penajam, Kutim, dan Kubar. Dalam memaksimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat tentunya diperlukan kinerja pelayanan publik yang maksimal, agar dapat memenuhi standar kinerja yang dapat memenuhi kriteria kinerja pelayanan publik yang baik sebagai bagian dari tugas ASN di instansi UPTD tersebut.

Pelayanan publik yang maksimal tentunya tidak lepas dari etika pelayanan publik yang merupakan kode etik atau aturan berperilaku yang benar dan harus dipatuhi oleh semua pemberi pelayanan publik. Oleh sebab itu etika pelayanan publik wajib dipatuhi dan diterapkan di dalam instansi penyelenggara pelayanan publik.

Solusi Permasalahan

Salah satu harapan masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan adalah pelayanan prima yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah (unit instansi) maupun organisasi lainnya sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial serta dinamikanya. Dalam konteks ini, pelayanan menjadi kewajiban dan tanggung jawab birokrasi dalam mengadopsi perubahan beragam kebutuhan sosial berdasarkan kinerja profesional. Hal yang dilematis terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat, tetapi tidak disertai dengan peningkatan keahlian dan keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan. Misalnya, birokrat yang belum memiliki kemampuan

mengoperasionalkan komputer, gagap teknologi, tidak mengenal internet dan lain-lain yang mendukung modernisasi manajerial pelayanan publik.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih penuh dengan ketidakpastian waktu, biaya, dan cara pelayanan. Prosedur pelayanan masyarakat yang di rasakan begitu berbelit-belit, kurang transparan serta adanya tindakan dan perilaku oknum pemberi pelayanan yang tidak sopan, tidak ramah, dan diskriminatif sehingga pelayanan yang dilakukan tidak adil dan tidak mencerminkan profesionalisme. Sebagai konsekuensi logisnya, dewasa ini kinerja pemerintah sebagai pelayan publik banyak menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya demokratis dalam pemerintahan. Masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Melihat betapa kompleksnya masalah yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, maka upaya penerapan etika pelayanan publik di Indonesia menuntut pemahaman dan sosialisasi yang menyeluruh, dan menyentuh semua dimensi persoalan yang etika dan iklim yang lebih dihadapi oleh birokrasi pelayanan.

Etika pelayanan publik pada umumnya merupakan filsafat dan profesional standar (kode etik) atau moral aturan berperilaku yang benar, yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik. Oleh sebab itu, etika pelayanan publik sudah menjadi hal yang wajib dipatuhi dan diterapkan di dalam instansi penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan peran pegawai negeri sipil dalam mewujudkan pelayanan publik yang maksimal pada UPTD Proteksi Tanaman Pangan, maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dengan tema sosialisasi etika dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat dengan mengundang beberapa pegawai UPTD pada sub seksi pengembangan teknologi dan laboratorium, dimana pada sub seksi ini bertugas dalam pelayanan penjualan dan pemesanan pupuk dengan nama produk Starter Tricho, Trichoderma Powder, Beauveria Bassiana Powder, dan aneka bibit tanaman kepada para konsumen yang kebanyakan dari unsur para petani dan masyarakat umum yang memerlukan pupuk organik maupun bibit tanaman.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19 maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Konsep kegiatan berupa sosialisasi pada pegawai UPTD Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura pada Sub Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium

C. PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pelayanan publik sepatutnya dapat memenuhi kepuasan objek yang dilayani, karena

tingkat kepuasan objek yang dilayani menjadi salah satu tolok ukur bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar normatif yang diharapkan masyarakat, dimana pelayanan ini merupakan proses pemenuhan kebutuhan aktivitas secara langsung yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan. Terlebih lagi, apabila pelayanan itu telah menerapkan sistem yang canggih dengan alat teknologi yang memadai. Dengan demikian, waktu pelayanan berjalan efektif dan efisien, dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan dapat dilakukan secara maksimal baik dalam barang publik maupun jasa publik. Semakin tinggi kualitas pelayanan dalam bentuk barang dan jasa publik maka kehidupan masyarakat akan baik, artinya masyarakat yang terlibat atau yang membutuhkan jasa pelayanan tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan atau dalam memenuhi kebutuhannya.

Mengacu pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang mengarah pada sosialisasi etika pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan literasi etika pelayanan publik. Diharapkan pula memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pelayanan publik yang berasal dari instansi. Kemudian, dari kegiatan ini diharapkan akan memberikan dampak positif dimana menimbulkan kesadaran bagi pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik dan melaksanakan fungsi yang terkait dengan kemasyarakatan.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Etika pelayanan publik pada umumnya merupakan filsafat dan profesional standar (kode etik), atau moral aturan berperilaku yang benar, yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik. Oleh sebab itu, etika pelayanan publik sudah menjadi hal yang wajib dipatuhi dan diterapkan di dalam instansi penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara beretika, profesional, efektif, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya.

Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik, memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Adapun pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Sangat diperlukan perhatian semua pihak, pemerintah sebagai pembuat regulasi, aparatur negara sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai pengawas jalannya pelayanan publik.

Saran

Untuk mewujudkan pelayanan publik dengan etika bagi aparatur perlu tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi serta bertanggungjawab dalam melaksanakan komitmen untuk melakukan pelayanan publik yang maksimal, karena salah satu tolok ukur dari pelayanan prima ini dilihat dari kualitas layanan publik yang sudah diberikan kepada masyarakat atau publik. Bekerja dengan standar pelayanan yang baik karena pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak dapat terealisasi tanpa campur tangan banyak pihak. Ucapan terima kasih kami berikan kepada UPTD Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura pada Sub Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium yang telah memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pemahaman etika pelayanan profesional; sehingga kegiatan PKM ini dapat diselesaikan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan penuh kegiatan PKM serta pendanaan Tahun Anggaran 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukarom Z. Laksana W. Nasrudin E. 2020. *Manajemen Pelayanan Publik*, Cetakan ke-3, Bandung; Penerbit Pustaka Setia
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta

BAB 19

TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI PEMBUATAN *WEBSITE* OLEH KELURAHAN LONG KALI BERBASIS WORDPRESS

TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI PEMBUATAN *WEBSITE* OLEH KELURAHAN LONG KALI BERBASIS WORDPRESS

Zaki Fakhroni

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
zaki.fakhroni@feb.unmul.ac.id

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Mitra

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan bahwa dalam rangka penatakelolaan *e-Government*, optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web. Dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) bahwa situs web adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.

Tujuan dari Peraturan Menteri ini secara umum adalah memberikan panduan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan, memfasilitasi integrasi layanan Badan Pemerintahan berbasis elektronik, mewujudkan keterbukaan informasi publik, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat sehingga penanggung jawab pemberdayaan desa harus jeli melihat hal ini, sebagai bagian dari program desa membangun. Sehingga perubahan sosial dari masyarakat desa tidak hanya terjadi pada masyarakat namun melibatkan juga peranan unsur-unsur yang ada di dalamnya. *Website* menjadi bagian dari informasi tentang pemberdayaan desa, dimana masyarakat setempat sebagai subyek pembangunan. Sehingga penuntasan permasalahan kemiskinan dan lapangan pekerjaan dapat diselesaikan sehingga terjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebagai bagian dari Kelurahan Long Kali, keterbatasan informasi mengenai desa masih sangat minim untuk dapat diakses oleh publik. Pembangunan dan potensi desa sangat penting diketahui oleh publik sehingga sangat berdampak positif sehingga terdapat perubahan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Belum adanya wadah untuk mempublikasikan informasi tersebut menyebabkan minimnya akses informasi terhadap desa tersebut. Pemanfaatan *website* sangat dibutuhkan bagi kedua desa tersebut, dimana teknologi informasi telah merata

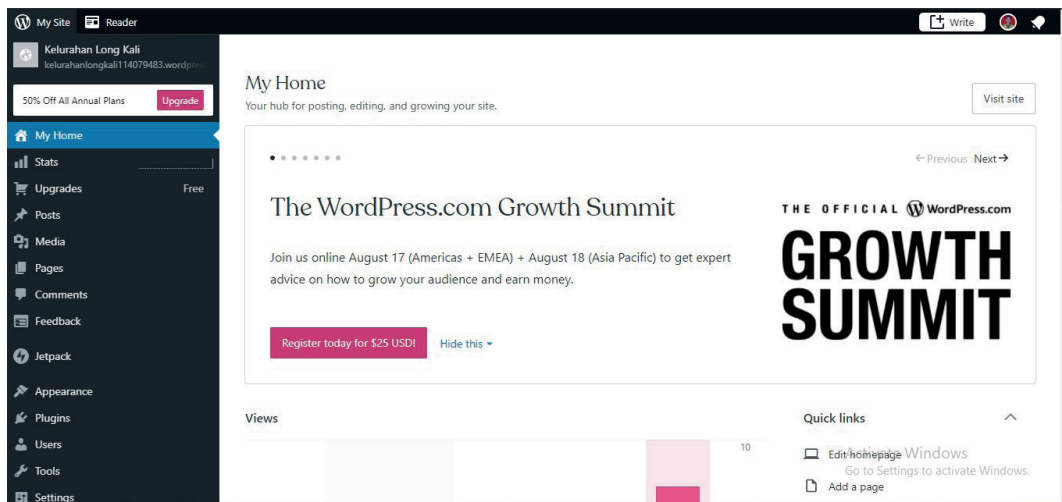
sampai ke pelosok daerah sehingga potensi desa sekitar dapat ditingkatkan.

Target dan luaran dalam program ini adalah Informasi berbasis *website*. Kelurahan Long Kali mempunyai potensi dan sumber daya yang mengandalkan pada sisi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet sehingga kedua potensi ini dapat diinformasikan dalam satu wadah yaitu *website* desa. Penggunaan *website* desa Meliputi beberapa fitur diantaranya informasi kegiatan rutin, profil desa, sejarah kelurahan, struktur organisasi kelurahan, visi dan misi, beranda, dan tentang.

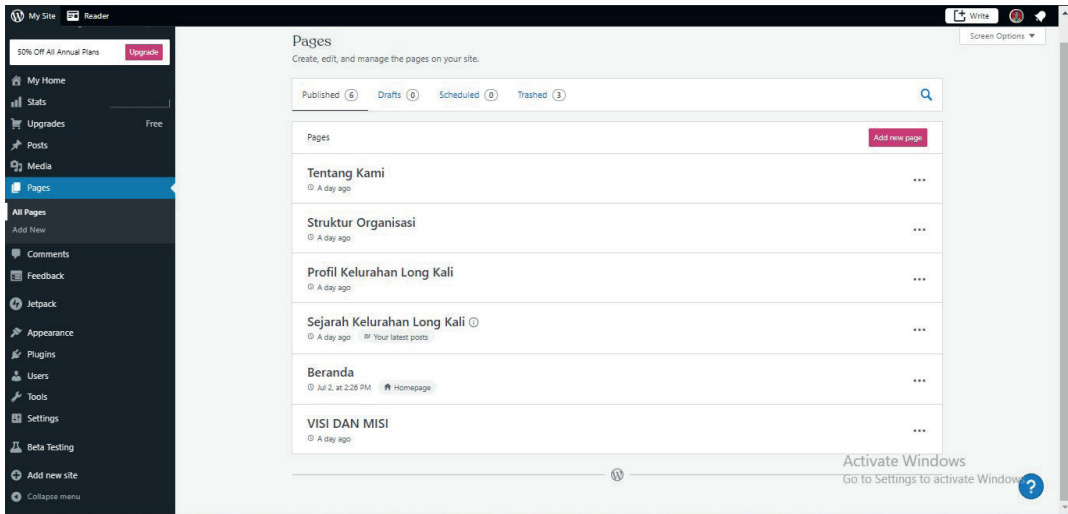
B. METODE PELAKSANAAN

Pembuatan *website* Kelurahan Long Kali menggunakan WordPress memiliki 3 tahap:

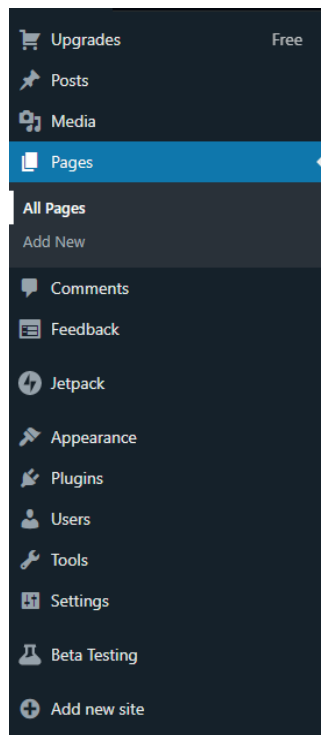
- a. **Objektif.** Melakukan komunikasi dengan Lurah Kelurahan Long kali untuk mendiskusikan topik pengabdian yang akan dilaksanakan yaitu Program Pembuatan Website Kelurahan Long Kali serta mencari data mengenai potensi daerah sekitar dan informasi lainnya
- b. **Desain.** Menyangkut desain grafis atau multimedia, tetapi harus sesuai dengan obyektif. Dalam desain, harus ditentukan juga *layout*, struktur menu, dan yang paling penting materi. Materi termasuk Beranda, Profil Kelurahan, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Sejarah Kelurahan dan Tentang Kami.
- c. **Pembuatan.** Pembuatan website Kelurahan Long Kali menggunakan WordPress dengan menggunakan domain gratis.



Gambar1. Tampilan My Home WordPress.



Gambar 2. Tampilan Edit Halaman *Website*.

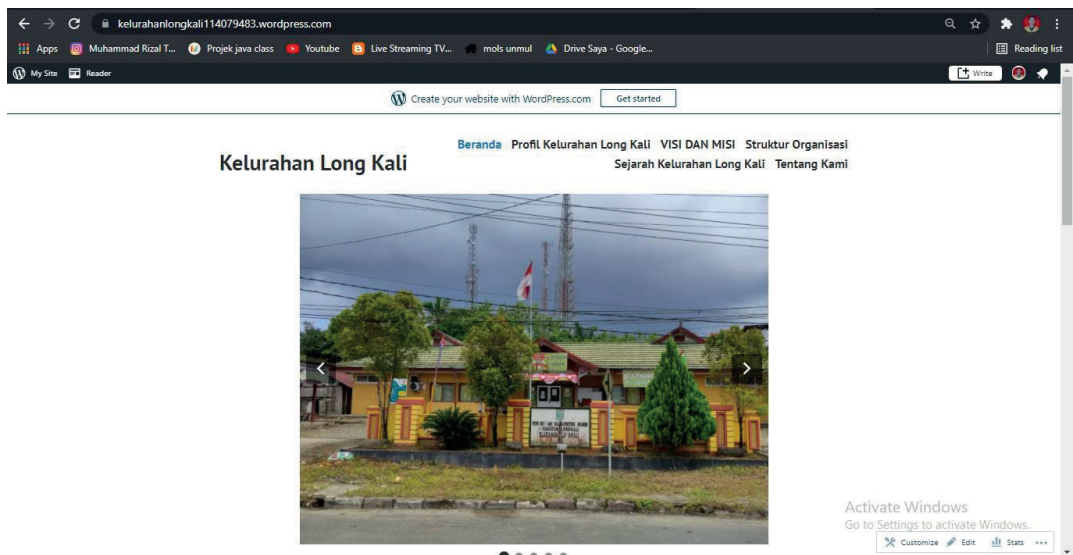


Gambar 3. Tampilan halaman untuk mengatur susunan menu *website*.

C. PELAKSANAAN DAN EVALUASI

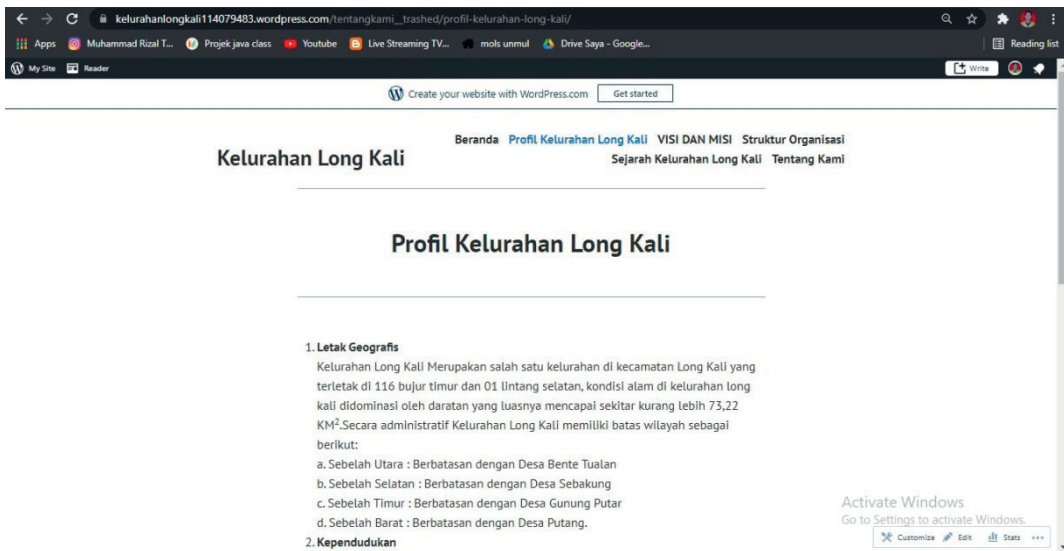
Fungsi utama *website* Kelurahan Long Kali yaitu sebagai sarana publikasi informasi seputar Kelurahan Long Kali yaitu profil kelurahan, visi dan misi, struktur organisasi, sejarah Kelurahan Long Kali dan tentang kami. Oleh karena itu, peran pengelola *website* desa harus sangat diperhatikan. Sehingga *website* selalu *update* tentang informasi-informasi baru yang perlu ditampilkan pada *website* dan menyampaikan laporan dari masyarakat. Administrator memiliki hak akses penuh terhadap *website*. Administrator dapat melakukan segala hal terhadap *website* yang dikelolanya. Administrator memiliki kontrol penuh terhadap *post* artikel, halaman-halaman *website*, dan tema yang diterapkan pada *website*.

Halaman pengunjung adalah halaman yang diakses oleh seluruh pengunjung. Pada halaman pengunjung berisi informasi seputar Kelurahan Long Kali yaitu profil kelurahan, visi dan misi, struktur organisasi, sejarah Kelurahan Long Kali dan tentang kami. Pengunjung tidak perlu melakukan proses *login* untuk melihat halaman *website*, cukup dengan membuka <https://kelurahanlongkali114079483.wordpress.com/>



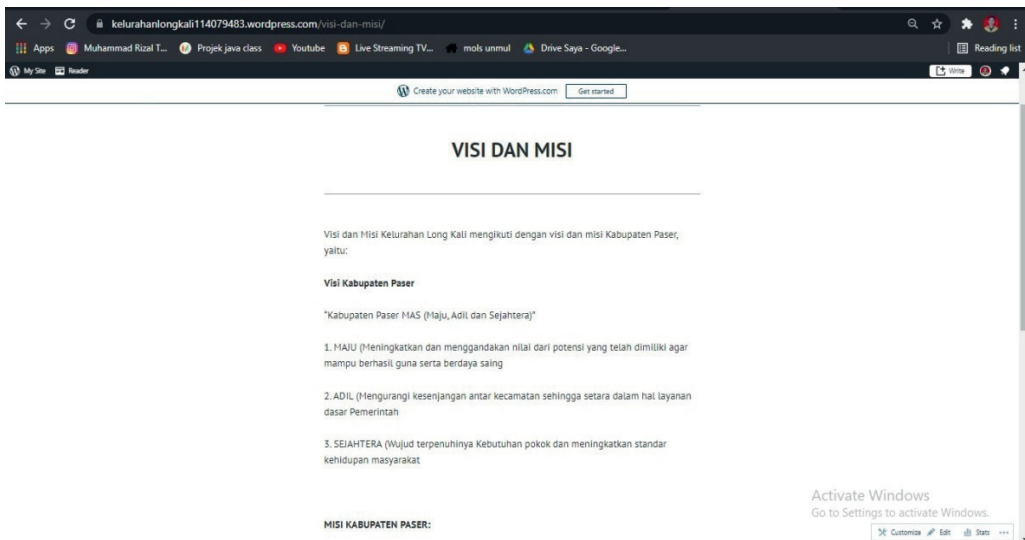
Gambar 4. Tampilan Awal *Website* Kelurahan Long Kali

Pada tampilan awal *website* kelurahan atau biasa disebut dengan beranda terdapat beberapa menu pilihan yaitu ada Profil Kelurahan Long Kali, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Sejarah Kelurahan Long Kali dan Tentang Kami.

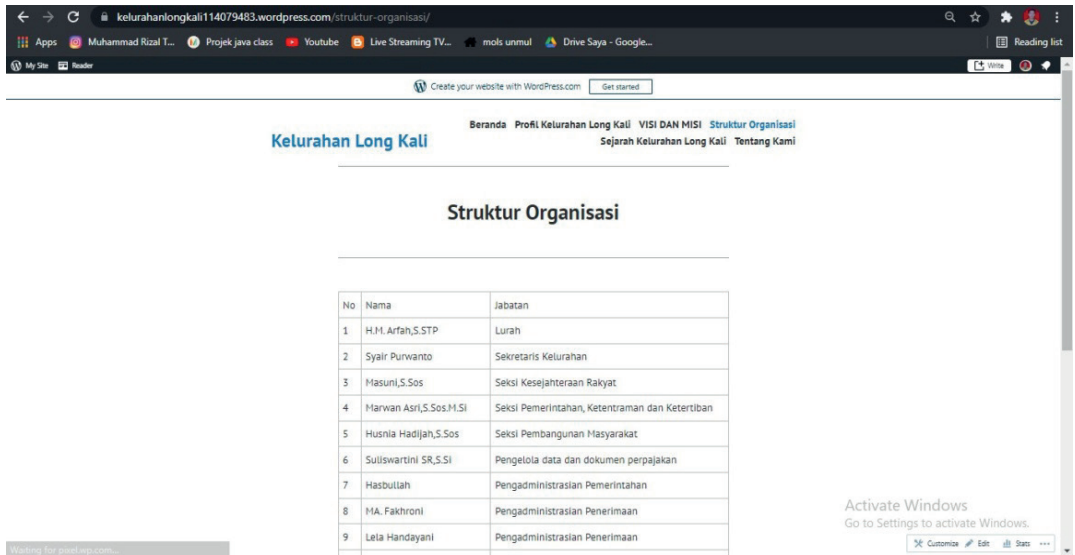


Gambar 5. Tampilan menu Profil Kelurahan Long Kali

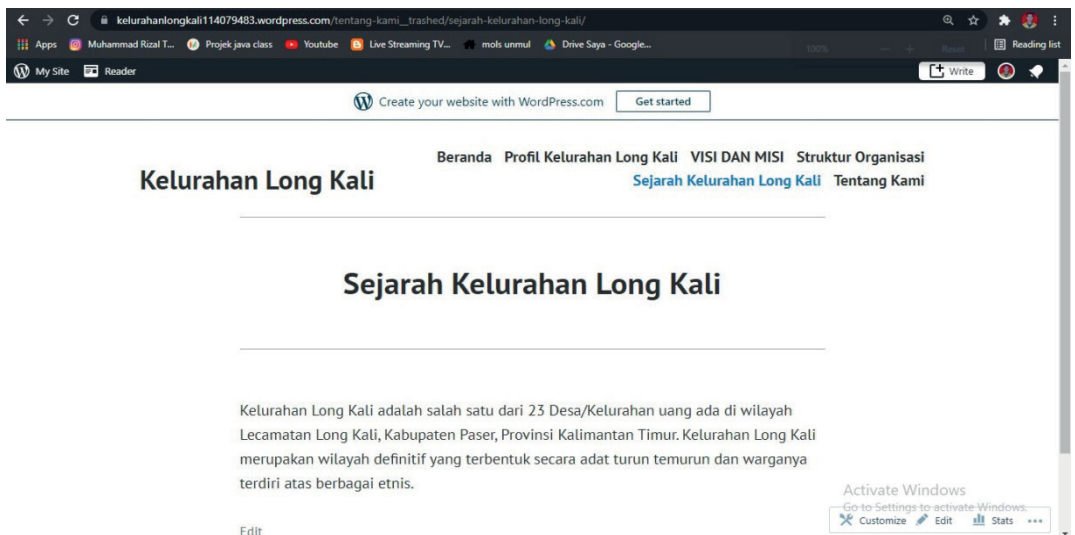
Pada tampilan profil Kelurahan Long Kali terdapat Letak Geografis Kelurahan Long Kali, Kependudukan Kelurahan Long Kali, Sarana dan Prasarana.



Gambar 6. Tampilan Menu Visi dan Misi

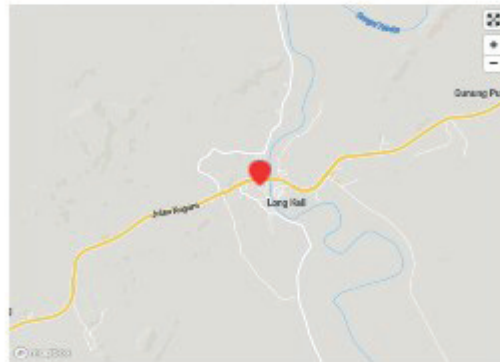


Gambar 7. Tampilan Menu Struktur Organisasi.



Gambar 8. Tampilan Menu Sejarah Kelurahan Long Kali.

Tentang Kami

**Jam Operasional:**

Senin-Kamis 08.00 s/d 16.00

Jumat 08.00 s/d 11.30

Alamat:Jalan Negeri RT 16, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.
Kode Pos 76258

Get:

Kelurahan Long Kali, Create a free website or blog at WordPress.com.

Gambar 9. Tampilan Menu Tentang Kami

D. RANGKUMAN DAN SARAN

Rangkuman

Website Kelurahan Alamat URL pada *website* kelurahan ini yaitu <https://kelurahanlongkali114079483.wordpress.com/>. Pengembangan *website* di lingkungan Kelurahan Long Kali diharapkan dapat mengakomodir informasi bagi masyarakat sekitar. Informasi *website* terdiri atas statistik data masyarakat desa, pelayanan desa, kesehatan dan sebagainya. Kelurahan Long Kali merupakan wilayah dimana mobilitas internet memiliki cakupan yang sangat luas. Sehingga masyarakat mulai memahami pentingnya informasi yang berasal dari pemerintahan desa

Saran

Website Kelurahan Long Kali ini sebagai media untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara penduduk dan perangkat kelurahan.

Agar lebih bermanfaat untuk jangka panjang hendaknya *website* Kelurahan Long Kali harus selalu *update* tentang informasi sehingga pengunjung selalu mendapatkan informasi terbaru dari kegiatan pemerintahan dan masyarakat Long Kali. Agar hal ini dapat tercapai seyogyanya Kelurahan Long Kali menyediakan sumber daya khusus untuk mengelola *website* Kelurahan Long Kali, agar laporan dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik serta *website* selalu *update* dengan info-info terbaru yang berhubungan dengan desa atau lainnya agar selalu menarik untuk dikunjungi.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Berkenaan dengan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Mulawarman, LPPM Universitas Mulawarman dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan dukungan dana dan memberikan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Tidak lupa kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Lurah Long Kali Bapak H.M. Arfah, S.STP yang telah bersedia menerima kami untuk menjalankan program kerja pengabdian masyarakat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Murtir Jeddawi, A. R. 2018. *Studi Kemungkinan Perubahan Status desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 31-32.
- Pressa Perdana S.S.,M.F. (2021). *Sistem Informasi Desa Berbasis Web di Kelurahan Dedikasi MU (Journal of Community Service)*, 658-666.
- Soepeno, D. 2014. *Penggunaan Aplikasi CMS Wordpress Untuk Merancang Website Sebagai Media Promosi pada Maroon Wedding Malang. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 64-65.
- Wati,F. 2017. *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Pada Desa Bogangin Sumpiuh. Journal on Networking and Security.*, 2-3.

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam akuntansi untuk keberlanjutan ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman sebagai bentuk dharma bakti dan kontribusi kepada masyarakat. Aktualisasi ilmu dan praktik akuntansi di masyarakat sangat diperlukan dan saat ini telah menjadi kebutuhan penting baik bagi individu dan bagi lembaga atau organisasi privat maupun organisasi publik.

Kegiatan PKM tahun 2021 ini meliputi sosialisasi peraturan perpajakan dan literasi standar akuntansi keuangan; pendampingan tata kelola keuangan level mikro, level meso, dan level makro; praktik akuntansi keuangan sektor privat dan refocusing serta review anggaran sektor publik; dan penguatan pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Area kegiatan PKM dimaksudkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dari bidang ilmu akuntansi. Sehingga, hasil PKM ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan teknologi dalam mendukung program kemasyarakatan, kewilayahan, dan kewirausahaan sesuai indikator kinerja PKM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Diterbitkan atas kerja sama:
Mata Bangsa dan Puncak Jaya Indonesia dengan
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mulawarman